



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 31 Juli 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Bali;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangli.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan

kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- 11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
- 12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.381.618.573.026,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 52.836.636.963,69 (lima puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.434.455.209.989,69 (satu triliun empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 1.315.502.052.012,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>117.646.859.175,00</u>
Jumlah pendapatan daerah	

setelah perubahan	Rp.	1.433.148.911.187,00
2. Belanja daerah		
a. Semula	Rp.	1.381.618.573.026,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>52.836.636.963,69</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.434.455.209.989,69
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	80.079.285.674,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(66.810.222.211,31)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	13.269.063.462,69
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	13.962.764.660,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	11.962.764.660,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	1.306.298.802,69
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah		
1) Semula	Rp.	267.728.458.013,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>807.750.000,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	268.536.208.013,00
b. Pendapatan transfer		
1) Semula	Rp.	1.047.773.593.999,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>116.839.109.175,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.164.612.703.174,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp.	55.841.316.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.939.862.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	59.781.178.500,00

b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp.	68.947.160.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>123.481.016.085,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	192.428.176.085,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	6.074.596.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	6.074.596.500,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	136.865.385.013,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(126.613.128.085,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	10.252.256.928,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :		
a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp.	838.766.167.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>11.971.629.000,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	850.737.796.000,00
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp.	209.007.426.999,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>104.867.480.175,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	313.874.907.174,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :		
a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional		
1) Semula	Rp.	1.028.142.084.451,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>31.237.176.844,69</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	1.059.379.261.295,69
b. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	182.298.190.725,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>25.718.748.278,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	208.016.939.003,00
c. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	2.250.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(989.981.443,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.260.018.557,00
d. Belanja transfer		
1) Semula	Rp.	168.928.297.850,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.129.306.716,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	165.798.991.134,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	609.931.040.339,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(12.253.805.914,89)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	597.677.234.424,11
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	299.004.269.734,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>53.927.799.205,58</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	352.932.068.939,58
c. Belanja bunga		
1) Semula	Rp.	4.108.376.340,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>312.739.876,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	4.421.116.216,00
d. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	114.841.798.038,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(10.749.556.322,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	104.092.241.716,00

f.	Belanja bantuan sosial		
1)	Semula	Rp.	256.600.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial		
	setelah perubahan	Rp.	256.600.000,00
(2)	Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,		
	terdiri atas :		
a.	Belanja modal tanah		
1)	Semula	Rp.	50.000.000,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(50.000.000,00)</u>
	Jumlah belanja modal tanah		
	setelah perubahan	Rp.	0,00
b.	Belanja modal peralatan dan mesin		
1)	Semula	Rp.	27.076.616.945,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(4.185.013.397,00)</u>
	Jumlah belanja modal peralatan		
	dan mesin setelah perubahan	Rp.	22.891.603.548,00
c.	Belanja modal bangunan dan gedung		
1)	Semula	Rp.	117.431.011.550,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>21.324.102.885,00</u>
	Jumlah belanja modal		
	bangunan dan gedung setelah		
	perubahan	Rp.	138.755.114.435,00
d.	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi		
1)	Semula	Rp.	37.094.922.630,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>7.772.717.290,00</u>
	Jumlah belanja modal jalan,		
	Jaringan dan irigasi		
	setelah perubahan	Rp.	44.867.639.920,00
e.	Belanja modal aset tetap lainnya		
1)	Semula	Rp.	145.639.600,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>356.941.500,00</u>
	Jumlah belanja modal aset		
	tetap lainnya perubahan	Rp.	502.581.100,00
f.	Belanja modal aset lainnya		
1)	Semula	Rp.	500.000.000,00
	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>500.000.000,00</u>
	Jumlah belanja modal aset		
	lainnya setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
(3)	Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5		
	huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :		
a.	Semula	Rp.	2.250.000.000,00
b.	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(989.981.443,00)</u>
	Jumlah belanja tidak terduga		
	setelah perubahan	Rp.	1.260.018.557,00
(4)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d,		
	terdiri atas :		
a.	Belanja bagi hasil		
1)	Semula	Rp.	12.617.333.850,00
2)	Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>700.000.000,00</u>
	Jumlah belanja bagi hasil		
	setelah perubahan	Rp.	13.317.333.850,00
b.	Belanja bantuan keuangan		
1)	Semula	Rp.	156.310.964.000,00

2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.829.306.716,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	152.481.657.284,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	80.079.285.674,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(66.810.222.211,31)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	13.269.063.462,69
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	13.962.764.660,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(2.000.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	11.962.764.660,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp.	80.079.285.674,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(66.810.222.211,31)</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	13.269.063.462,69
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		
	Rp.	0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		
	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal daerah		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.000.000000,00)</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		
	Rp.	0,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp.	11.962.764.660,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		
	Rp.	11.962.764.660,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		
	Rp.	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		
	Rp.	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 20 September 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,


I MADE ARI PULASARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI (12, 51/2024)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 900.1.3/15/DPRD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BANGLI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a. bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah dilakukan pembahasan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Kabupaten Bangli;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwkilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli tentang Persetujuan Terhadap Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menyetujui penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 18 September 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANGLI,



I KETUT SUASTIKA



LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 900.1.3/15 /KEP.PIMP/DPRD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Tujuan Evaluasi Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan: A. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; B. Kepentingan umum; C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).		
II	Kebijakan Umum Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati, Pelaksanaan terhadap evaluasi Perubahan APBD yaitu: A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 1 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangli Tahun 2024 2 Penyampaian Rancangan (P-KUA) dan Rancangan P-PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP 3 Penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (P-KUA) dan Rancangan P-PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD 4 Kesepakatan Rancangan P-KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bangli 5 Kesepakatan Rancangan P-PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bangli	Pemerintah Kabupaten Bangli telah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD sebagaimana maksud Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Sesuai, (paling lambat minggu III bulan Juli) Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus) Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus) Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus) Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)	Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	6 Penyalpaian Rancangan Perda tentang P-APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Bangli 7 Persetujuan bersama DPRD Kabupaten Bangli dan Kepala Daerah tentang Ranperda Perubahan APBD 2024 8 Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang P-APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P-APBD Kabupaten Bangli untuk dievaluasi B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam APBD. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, sebagaimana maksud Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan 1 Kebijakan Pendapatan Daerah, yaitu: a penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta untuk penganggaran target Pajak dan Retribusi mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah dan potensi pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 b rincian jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September) Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berakhir) Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda P-APBD)	

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	c pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.1.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; d penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sesuai maksud butir C.2.a.1).u) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 e pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah 2 Kebijakan Belanja Daerah, yaitu: a Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menganggarkan belanja daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.m.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, antara lain dalam rangka pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli Masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian, penurunan stunting, dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem; b dalam rangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintah yang difokuskan pada prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 a. Pemerintah Kabupaten Bangli menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir c.1.m.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; b dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Bangli memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 c belanja daerah diuraikan menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan d belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana maksud butir C.1.m.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 3 Kebijakan Pembiayaan Daerah, yaitu: a pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.n.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 b klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir C.1.n.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; dan c pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir C.1.n.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023		Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
III	Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang Lebih Tinggi dan Kepentingan Umum A. Kebijakan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target Pendapatan Daerah semula Rp1.315.502.052.012,00 bertambah Rp93.330.197.750,00 menjadi Rp1.408.832.249.762,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari: 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah semula Rp267.728.458.013,00 bertambah Rp7.000.000.000,00 menjadi Rp274.728.458.013,00 atau 19,50% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Realisasi Pendapatan Asli Daerah dirinci sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut: Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli sampai dengan Bulan Juli Tahun Anggaran 2024 Rp129.637.412.995,05 lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp103.980.928.269,82 atau meningkat sebesar Rp25.656.484.725,23. Apabila diprediksi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan Bulan Juli Tahun Anggaran 2024, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp222.235.565.134,37 lebih rendah dari rencana target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp274.728.458.013,00 sehingga akan berpotensi tidak mencapai dari target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp52.492.892.878,63 Untuk itu, penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah harus terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada data potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bangli serta memperhatikan perkiraan asumsi makro Pemerintah Kabupaten Bangli agar tetap realistis, cermat dalam perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dengan tetap mengupayakan langkah-langkah dan inovasi optimalisasi pendapatan daerah, sehingga perencanaan target PAD terukur dan dapat dicapai secara rasional berdasarkan pada potensi pendapatan daerah dimaksud Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari: a. Pajak Daerah		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target Pendapatan Pajak Daerah semula Rp55.841.316.500,00 bertambah Rp3.939.862.000,00 menjadi Rp59.781.178.500,00 atau 4,24% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Sesuai dengan Tabel 3, dapat dilihat bahwa realisasi Pajak Daerah sampai dengan Bulan Juli Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.428.473.876,00 lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp24.302.665.244,00 atau meningkat sebesar Rp2.125.808.632,00, apabila diprediksi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan realisasi Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan Bulan Juli Tahun Anggaran 2024, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 sebesar Rp45.305.955.216,00 lebih rendah dari rencana target Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp59.781.178.500,00 sehingga akan berpotensi kurang dari target Pajak Daerah sebesar Rp14.475.223.284,00 Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan Pajak Daerah: 1) pajak hotel semula Rp3.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp3.000.000.000,00 menjadi Rp0,00; 2) pajak restoran semula Rp16.999.600.000,00 berkurang sebesar Rp16.999.600.000,00 menjadi Rp0,00; 3) pajak hiburan semula Rp165.000.000,00 berkurang sebesar Rp165.000.000,00 menjadi Rp0,00; 4) pajak reklame semula Rp1.077.916.500,00 bertambah sebesar Rp300.000.000,00 menjadi Rp1.377.916.500,00; 5) pajak penerangan jalan semula Rp15.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp15.000.000.000,00 menjadi Rp0,00; 6) pajak parkir semula Rp11.300.000,00 berkurang sebesar Rp11.300.000,00 menjadi Rp0,00; 7) pajak air tanah sebesar Rp660.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2024; 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp4.427.500.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2024; 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp14.500.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2024; dan 10) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp38.815.762.000,00 menjadi Rp38.815.762.000,00. Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perizinannya mempertimbangkan hal sebagai berikut: 1) kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	2) Perangkat Daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan Peraturan Daerah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan 3) objek pajak mineral bukan logam dan batuan, memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a.1).j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 2 Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target Pendapatan Retribusi Daerah semula Rp68.947.160.000,00 bertambah Rp121.481.016.085,00 menjadi Rp190.428.176.085,00 atau 13,52% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa realisasi Retribusi Daerah sampai dengan Bulan Juli Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp32.351.143.181,00 lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp31.097.309.471,20 atau meningkat sebesar Rp1.253.833.709,80. Apabila diprediksi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan Bulan Juli Tahun Anggaran 2024, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 sebesar Rp55.459.102.596,00 lebih tinggi dari rencana target Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp190.428.176.085,00 sehingga akan berpotensi tidak mencapai dari target Retribusi Daerah sebesar Rp134.969.073.489,00. Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan Retribusi Daerah: 1) retribusi jasa umum semula Rp1.857.280.000,00 bertambah Rp123.455.996.085,00 menjadi Rp125.313.276.085,00; 2) retribusi jasa usaha semula Rp63.588.680.000,00 berkurang Rp1.973.780.000,00 menjadi Rp61.614.900.000,00; dan 3) retribusi perizinan tertentu semula Rp3.501.200.000,00 berkurang Rp1.200.000,00 menjadi Rp3.500.000.000,00. Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bangli serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, sebagaimana maksud butir C.2.a.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir C.2.a.1).r) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan: 1) ☐ pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan 3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penggunaan PKB harus berpedoman pada ketentuan PKB paling sedikit 10% untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir C.2.a.1)p)(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Sedangkan, untuk hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	Untuk itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.	Pemungutan pajak dan retribusi daerah telah ditetapkan dengan peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD tetap mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Bangli menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dan butir C.2.a.l).p).(S) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Selanjutnya terhadap penyesuaian regulasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Bangli segera mengupayakan langkah-langkah percepatan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi, sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a.1).r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya untuk penggunaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit 10% dialokasikan untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.	Pemerintah Kabupaten Bangli telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli tetap melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan paling sedikit 10% untuk belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp6.074.596.500,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2024 atau 0,43% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan Tabel 3 tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan Bulan Juli Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.748.201.892,00 lebih rendah bila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.587.017.902,08 atau menurun sebesar Rp838.816.010,08 Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menetapkan target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan potensi penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, dan juga berdasarkan atas realisasi penyetoran bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bangli hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut diuraikan ke dalam objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: 1) bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp5.736.400.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2024; 2) bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp5.500.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2024; dan 3) bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebesar Rp332.696.500,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli agar melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bangli yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain: 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;		Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 tetap memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, dan butir C.2.a.2).b) Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangli harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris/pengawas dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi pemerintah Kabupaten Bangli sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.	Selanjutnya, dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Kabupaten Bangli perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bangli dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam butir C.4.b.2).b).(10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menetapkan target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan potensi penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.	Pemerintah Kabupaten Bangli terus berupaya memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menetapkan target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tetap sesuai dengan potensi penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
	d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula Rp136.865.385.013,00 berkurang Rp118.420.878.085,00 menjadi Rp18.444.506.928,00 atau 1,31% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Berdasarkan Tabel 3 tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan Bulan Juli Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp67.109.594.046,05 lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan yang sama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp43.993.935.652,54 atau meningkat sebesar Rp23.115.658.393,51. Apabila diprediksi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sampai dengan Bulan Juli Tahun Anggaran 2024, maka diproyeksikan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kabupaten Bangli Tahun 2024 sebesar Rp115.045.018.364,66 lebih tinggi dari rencana target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.444.506.928,00 sehingga akan berpotensi melampaui dari target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp96.600.511.436,66 Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut: 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan semula Rp347.000.000,00 bertambah Rp300.000.000,00 menjadi Rp647.000.000,00; 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan semula Rp2.769.724.000,00 berkurang Rp1.384.862.000,00 menjadi Rp1.384.862.000,00; 3) jasa giro sebesar Rp3.706.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2024; 4) pendapatan bunga sebesar Rp3.053.062.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2024; 5) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan semula Rp0,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp200.000.000,00; 6) pendapatan denda pajak daerah semula Rp0,00 bertambah Rp1.750.000.000,00 menjadi Rp1.750.000.000,00; 7) pendapatan denda retribusi daerah semula Rp290.000.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp540.000.000,00;		Dapat kami jelaskan tentang penganggaran pada lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah antara lain adalah, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa BLUD merupakan objek dari Retribusi Daerah maka terjadi penyesuaian rekening anggaran pada target pendapatan BLUD. Tentang realisasi nampak melampau target pada prognosisi sebenarnya masih ada kesalahan teknis dalam mengeksekusi realisasi BLUD dari SKPD/Unit SKPD sehingga nampak ketimpangan terkait hal ini akan dilakukan penyesuaian terhadap realisasi yang masih salah penempatan rekening dimaksud.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	8) pendapatan dari pengembalian semula Rp9.663.582.928,00 berkurang Rp2.500.000.000,00 menjadi Rp7.163.582.928,00; dan 9) pendapatan BLUD semula Rp117.036.016.085,00 berkurang Rp117.036.016.085,00 menjadi Rp0,00 Penetapan target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula Rp1.047.773.593.999,00 bertambah Rp86.330.197.750,00 menjadi Rp1.134.103.791.749,00 atau 80,50% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD 2024 diuraikan sebagai berikut: a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp838.766.167.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2024 atau 59,54% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain: 1) dana perimbangan sebesar Rp763.325.937.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan: a) dana transfer umum-dana bagi hasil sebesar Rp12.633.246.000,00 tidak mengalami perubahan dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBD induk Tahun Anggaran 2024 (di Lampiran Penjabaran terdapat penambahan, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.02, Lampiran V.3, dan Lampiran V.8 , Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 78 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 b) dana transfer umum-dana alokasi umum sebesar Rp571.123.857.000,00 tidak mengalami perubahan dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBD induk Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.11 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp571.123.857.000,00;	Pemerintah Kabupaten Bangli agar tetap realistis, cermat, dan berhati-hati dalam perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dengan tetap mengupayakan langkah-langkah dan inovasi optimalisasi pendapatan daerah, sehingga perencanaan target PAD terukur dan dapat dicapai secara rasional berdasarkan pada potensi pendapatan daerah dimaksud.	Pemerintah Kabupaten Bangli tetap realistis, cermat, dan berhati-hati dalam perencanaan target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dengan tetap mengupayakan langkah-langkah dan inovasi optimalisasi pendapatan daerah, sehingga perencanaan target PAD terukur dan dapat dicapai secara rasional berdasarkan pada potensi pendapatan daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		Selanjutnya untuk alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau agar memperhatikan ketentuan penganggaran sebagaimana butir C.2.b.5).a).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau penganggarnya tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.11 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;	Anggarannya telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
	c) dana alokasi khusus (DAK) terdiri dari: (1) dana alokasi khusus fisik sebesar Rp61.838.838.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.12 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp61.838.838.000,00; dan	Sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.12 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024; dan	Anggarannya telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
	(2) dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp117.729.996.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran V.13 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp117.729.996.000,00.	Sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.13 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;	Anggarannya telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
	2) insentif fiskal sebesar Rp17.010.622.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.17 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.010.622.000,00; dan	Tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.17 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp17.010.622.000,00 untuk itu agar disesuaikan;	Anggarannya akan disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
	3) dana desa sebesar Rp58.429.608.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.17 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp58.429.608.000,00	Sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Lampiran V.16 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.	Anggarannya telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
		Pemerintah Kabupaten Bangli dalam mengalokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat belum sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, dan agar memerhatikan ketentuan penganggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana butir C.2.b.5).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Bangli dalam mengalokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tetap menyesuaikan dengan alokasi yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp209.007.426.999,00 bertambah Rp86.330.197.750,00 menjadi Rp295.337.624.749,00 atau 20,96% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut: 1) Pendapatan Bagi Hasil Target Pendapatan Bagi Hasil dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp88.070.392.493,00 bertambah Rp26.889.942.750,00 menjadi Rp114.960.335.243,00, yang diuraikan pada: (a) pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor semula Rp34.513.179.882,00 bertambah Rp10.796.256.394,00 menjadi Rp45.309.436.276,00; (b) pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor semula Rp17.193.685.727,00 bertambah Rp9.102.613.864,00 menjadi Rp26.296.299.591,00; (c) pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor semula Rp18.006.184.774,00 bertambah Rp6.952.254.835,00 menjadi Rp24.958.439.609,00; (d) pendapatan bagi hasil pajak air permukaan semula Rp35.199.921,00 bertambah Rp38.817.657,00 menjadi Rp74.017.578,00; dan (e) pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp18.322.142.189,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2024	Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dalam hal penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli melakukan penyesuaian atas penggunaan dana TKD dimaksud. Berkenaan dengan hal tersebut, penyesuaian Penganggaran dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli tetap menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penganggaran dana TKD tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah agar disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.900/5197/PADFE/BPKAD tanggal 12 Agustus 2024 hal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk Kabupaten Bangli dialokasikan sebesar Rp107.847.929.918,00 sebagai berikut: (a) pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar Rp36.488.425.952,00; (b) pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp28.592.138.586,00 (c) pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp24.364.956.998,00; (d) pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp144.434.892,00; dan (e) pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp18.257.973.490,00 Pemerintah Kabupaten Bangli juga mengalokasikan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah atas Kewajiban Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023 berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor B.31.900/4884/PADFE/BPKAD tanggal 31 Juli 2024 hal Kewajiban Definitif Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, untuk Kabupaten Bangli dialokasikan sebesar Rp26.889.942.750,00 sebagai berikut: (a) pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebesar Rp10.796.256.394,00; (b) pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp9.102.613.864,00; (c) pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp6.952.254.835,00; dan (d) pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp38.817.657,00.	Selanjutnya, untuk penggunaan pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi harus mempedomani ketentuan sebagai berikut: 1 pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% dari hak Kabupaten/Kota, harus dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 dan butir C.2.a.1).p).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;	Penggarannya telah disesuaikan dengan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi. 10 % dari PKB telah dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 dan butir C.2.a.1).p).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	2) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp120.937.034.506,00 bertambah Rp59.440.255.000,00 menjadi Rp180.377.289.506,00, yang diuraikan pada: (a) bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebesar Rp50.762.034.506,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2024; dan (b) bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota semula Rp70.175.000.000,00 bertambah Rp59.440.255.000,00 menjadi Rp129.615.255.000,00 Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud, dengan mempedomani butir C.2.b.5).b).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. B Kebijakan Belanja Daerah Penyediaan alokasi Belanja Daerah Kabupaten Bangli semula Rp1.381.618.573.026,00 bertambah Rp28.519.975.539,00 menjadi Rp1.410.138.548.565,00 atau 2,06% dari dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu: 1 Penyediaan alokasi Belanja Daerah Kabupaten Bangli dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.410.138.548.565,00	2 penerimaan pajak rokok dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan 3 dalam rangka mendukung Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Kabupaten Bangli menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Pemerintah Kabupaten Bangli untuk Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana maksud butir C.2.a.1).p).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; Agar disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam lampiran surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor: B.13.900/9257/PADFE/BPKAD tanggal 4 Desember 2023 hal : Pagu Sementara Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud, dengan mempedomani butir C.2.b.5).b).(2).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:	100% dari Pajak Rokok dipakai mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Telah disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam lampiran surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor: B.13.900/9257/PADFE/BPKAD tanggal 4 Desember 2023 hal : Pagu Sementara Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Penganggaran pendapatan bantuan keuangan tetap berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD pemberi bantuan keuangan.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	2 Pendanaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut: a. SPM Bidang Pendidikan Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan semula Rp24.960.478.950,00 bertambah Rp3.842.921.500,00 menjadi Rp87.408.469.208,00 atau 13,44% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Pendidikan Rp650.264.080.252,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada: 1) kegiatan pengelolaan pendidikan dasar semula Rp5.228.920.000,00 bertambah sebesar Rp771.380.000.00,00 menjadi Rp6.000.300.000,00; 2) kegiatan pengelolaan Pendidikan Usia Dini (PAUD) semula Rp12.895.966.000,00 berkurang sebesar Rp2.076.127.500,00 menjadi Rp14.972.093.500,00; dan 3) kegiatan pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan semula Rp6,835,592,950 bertambah sebesar Rp995.414.000,00 menjadi Rp7.831.006.950,00. b SPM Bidang Kesehatan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan semula Rp1.669.285.500,00 berkurang Rp244.741.000,00 menjadi Rp1.424.544.500,00 atau 3,26% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Kesehatan Rp282.324.130.227,00	a Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. b Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Terhadap bertambahnya alokasi anggaran SPM Bidang Kesehatan maka Pemerintah Kabupaten Bangli harus meningkatkan kualitas dan target capaian kinerja untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir E.2.a.11 dan Tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Telah disesuaikan dengan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi. Telah disesuaikan dengan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berusaha mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada: 1) ☐ sub kegiatan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar semula Rp346.703.000,00 dari berkurang Rp3.018.000,00 menjadi Rp343.685.000,00; 2) ☐ sub kegiatan pelayanan kesehatan pada usia produktif semula Rp98.250.000,00 berkurang Rp8.250.000,00 menjadi Rp90.000.000,00; 3) ☐ sub kegiatan pelayanan kesehatan pada usia lanjut semula Rp16.275.000,00 berkurang Rp.9.750.000,00 menjadi Rp6.525.000,00; 4) ☐ sub kegiatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar Rp5.500.000,00 tidak mengalami perubahan; 5) ☐ sub kegiatan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus semula Rp219.052.000,00 berkurang Rp6.000.000,00 menjadi Rp213.052.000,00; 6) ☐ sub kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat semula Rp6.720.000,00 berkurang Rp6.720.000,00 menjadi Rp0,00; 7) ☐ sub kegiatan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis semula Rp63.275.000,00 bertambah Rp7.675.000.00,00 menjadi Rp70.950.000,00; 8) ☐ sub kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) semula Rp23.583.000,00 berkurang Rp15.033.000.00 menjadi Rp8.550.000,00; 9) ☐ sub kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil semula Rp455.048.500,00 dari berkurang Rp112.180.000,00 menjadi Rp342.868.500,00; 10) ☐ sub kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar Rp124.513.000,00 bertambah Rp35.311.000,00 menjadi Rp159.824.000,00; 11) ☐ sub kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar Rp72.020.00000 tidak mengalami perubahan; dan 12) ☐ sub kegiatan pelayanan kesehatan balita semula Rp238.346.000,00 berkurang Rp121.276.000,00 menjadi Rp117.070.000,00;	Terhadap berkurangnya alokasi anggaran SPM Bidang Kesehatan maka Pemerintah Kabupaten Bangli harus memenuhi capaian indikator untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan serta butir E.2.a.21 dan Tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berusaha mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	c SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp7.595.000.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 menjadi Rp7.645.000.000,00 atau 0,98% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp313.114.708.109,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada:		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	1) ☐ kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota semula Rp7.445.000.000,00 bertambah Rp50.000.000,00 menjadi Rp7.495.000.000,00; dan 2) ☐ kegiatan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebesar Rp150.000.000,00 tidak mengalami perubahan.	Terhadap bertambahnya alokasi anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka Pemerintah Kabupaten Bangli harus meningkatkan kualitas dan target capaian kinerja untuk memenuhi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 8.2.a.31 dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berusaha mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	d SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp175.000.000,00 tidak mengalami perubahan atau 0,60% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp97.568.901.862,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada: 1) ☐ kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota semula Rp100.750.000,00 bertambah Rp85.000.000,00 menjadi Rp185.750.000,00; dan 2) ☐ kegiatan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota Rp235.375.000,00 bertambah Rp52.180.750,00 menjadi Rp397.475.000,00.	Terhadap alokasi anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Bangli harus meningkatkan kualitas dan target capaian kinerja untuk memenuhi pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 serta butir E.2.a.4) dan Tabel E. 10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berusaha mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
	e SPM Trantibumlinmas Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas semula Rp813.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.089.522.000,00 menjadi Rp2.902.522.000,00 atau 3,36% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp78.643.880.226,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada: 1) penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota semula Rp298.175.955,00 berkurang sebesar Rp10.312.200,00 menjadi Rp287.863.755,00;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana semula Rp651.337.991,00 berkurang sebesar Rp651.337.990,0 menjadi Rp1,00; 3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana semula Rp424.366.590,00 berkurang sebesar Rp204.000.000,00 menjadi Rp220.366.590,00; dan 4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tetap sebesar Rp40.000.000,00. f SPM Bidang Sosial Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial semula Rp59.473.000,00 bertambah Rp101.485.000,00 menjadi Rp160.958.000,00 atau 8,82% dari total belanja urusan pemerintahan Bidang Sosial Rp17.850.197.404,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam pelayanan dasar antara lain pada: 1). kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sebesar Rp325.750.000,00 tidak mengalami perubahan; 2). kegiatan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sebesar Rp325.750.000,00 tidak mengalami perubahan; 3). kegiatan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sebesar Rp325.750.000,00 tidak mengalami perubahan; 4). kegiatan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti sebesar Rp325.750.000,00 tidak mengalami perubahan; dan 5). kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota sebesar Rp15.750.000,00 tidak mengalami perubahan	Terhadap bertambahnya alokasi anggaran SPM bidang Trantibumlinmas maka Pemerintah Kabupaten Bangli harus meningkatkan kualitas dan target capaian kinerja untuk memenuhi pencapaian SPM bidang Trantibumlinmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.6) dan Tabel E.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Bangli harus tetap memprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM bidang Sosial sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E. 14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berusaha mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Trantibumlinmas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berusaha mengalokasikan anggaran untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	3 Dukungan Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Prioritas Nasional Tahun 2023 meliputi: a. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan (PN1), dianggarkan sebesar Rp78,753,603,146,00 tidak mengalami perubahan atau 5,58% dari total belanja daerah, yang diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, digitalisasi, dan ekonomi hijau; b mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN2), dianggarkan sebesar Rp209,792,500,00 tidak mengalami perubahan, atau 0,01% dari total belanja daerah yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pada Tahun 2024 pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah; c meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (PN3), dianggarkan sebesar Rp36.397.630.050,00 tidak mengalami perubahan atau 2,58% dari total belanja daerah, yang diarahkan pada pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing merupakan salah satu modal dalam percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM Tahun 2024 difokuskan pada percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial; d revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN4), dianggarkan sebesar Rp239,416,343,364,00 tidak mengalami perubahan atau 16,98% dari total belanja daerah, yang diarahkan menjadi instrumen penting untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan diarahkan melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian; e memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan sebesar dan pelayanan dasar (PN5), dianggarkan semula Rp684,616,045,048,00 tidak mengalami perubahan atau 48,55% dari belanja daerah yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur Tahun 2024, sebagai pilar pendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar, dan konektivitas memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	f membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN6), dianggarkan sebesar Rp202.293.080.161,00, tidak mengalami perubahan atau 14,35% dari total belanja, yang diarahkan untuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan terhadap bencana, dan upaya mengantisipasi perubahan iklim pada Tahun 2024 yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan; dan g memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN7), dianggarkan sebesar Rp67.256.758,035,00, tidak mengalami perubahan atau 4,77% dari total belanja daerah, yang diarahkan pada pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan yang diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerjasama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN), serta fokus pada peningkatan	Berdasarkan Tabel 5 tersebut, alokasi anggaran dalam rangka Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 harus diupayakan untuk ditingkatkan untuk mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Bangli pada Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023. Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Bangli sebesar 71,99%.	Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berusaha mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Bangli pada Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.
4	Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024 yang tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2024, Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024 yang tertuang pada Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2024, meliputi: a Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata; b Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan; c Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial; d Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya; e Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; f Infrastruktur; dan g Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran dalam rangka Sinkronisasi terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024	Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli harus menyesuaikan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2024 tersebut dengan program Prioritas Pembangunan Provinsi Bali yang tertuang pada Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2024 sebagaimana telah direkomendasikan kedalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 956/04-E/HK/2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan	Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berusaha menyesuaikan dengan program prioritas pembangunan Provinsi Bali sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemerintah Kabupaten Bangli telah menyelaraskan program Prioritas Pembangunan Provinsi Bali sesuai dengan Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2024 kedalam sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bangli Tahun 2024. 5. Pendanaan Urusan Wajib Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: a Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan Penyediaan anggaran untuk fungsi Pendidikan semula Rp354.622.117.450,00 atau 27,99% dari total belanja daerah Rp1.266.926.417,797,00 pada APBD induk Tahun Anggaran 2024 bertambah menjadi Rp382.232.045.220,00 atau 27,11% dari total belanja daerah Rp1.410.138.548.565,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir E.1 a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penyediaan Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut, dialokasikan untuk: 1) program pada urusan bidang pendidikan dan kepemudaan dan olahraga yang antara lain diuraikan pada: a). program pengelolaan pendidikan Rp77.316.912.812,00 atau 20,23% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; b). program pengendalian perizinan pendidikan dianggarkan tetap sebesar Rp38.341.400,00 atau 0,005% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; c). program pengembangan daya saing keolahragaan Rp32.627.830.000,00 atau 8,54% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; d). program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan Rp147.875.000,00 atau 0,04% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan e) program pengembangan kapasitas kepramukaan Rp150.000,00 atau 0,04% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan. 2) program pada urusan bidang kebudayaan antara lain diuraikan pada:	Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan tersebut, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Bangli sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.	Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berusaha mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam butir E.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	a) program pengembangan kebudayaan Rp1.522.047.000,00 atau 9,74% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; b) program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya Rp39.000.000,00 atau 0,01% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan c) program Pengembangan kesenian tradisional Rp4.970.820.000,00 atau 1,30% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan. 3) program pada urusan keperpustakaan antara lain diuraikan pada: a) program pembinaan perpustakaan Rp122.151.000,00 atau 0,03% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan; dan b) program pengelolaan arsip Rp8.162.000,00 atau 0,002% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan. b Alokasi Anggaran Kesehatan Penyediaan Anggaran Kesehatan dialokasikan semula Rp257.662.502.286,00 atau 28,15% dari total belanja daerah di luar gaji ASN Rp915.457.671.638,00 pada APBD induk Tahun Anggaran 2024 bertambah menjadi Rp306.122.461.067,00 atau 28,70% dari total belanja daerah di luar gaji ASN Rp1.066.463.620.558,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Penyediaan alokasi anggaran kesehatan antara lain tercantum pada: 1) program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Rp64.551.818,00 atau 21,09% dari total anggaran untuk kesehatan; 2) program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan semula Rp2.302.722.000,00 atau 0,75% dari total anggaran untuk kesehatan;	Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, harus konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sebagaimana dimaksud dalam butir E.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan yaitu peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kesejahteraan bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan, dimana kebutuhan Kesehatan daerah mengacu pada program Kesehatan Nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja di Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.	Penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik tetap berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan ,menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, tetap konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sebagaimana dimaksud dalam butir E.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	3) program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dianggarkan Rp372.331.000,00 atau 0,12% dari total anggaran untuk kesehatan; dan 4) program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Rp187.943.500,00 atau 0,06% dari total anggaran untuk anggaran kesehatan. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain: 1) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit; 2) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting yaitu: a peningkatan skrining anemia remaja putri; b konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri; c pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care); d konsumsi TTD ibu hamil; e pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK); f pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set; g pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan; h pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta); i tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (weight faltering, utasting, dan stunting); j peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan k edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita. 3) pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: a tuberkulosis (TBC); b HIV; c malaria; dan d penyakit menular lainnya 4) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama: a diabetes melitus; b hipertensi; dan c penyakit tidak menular lainnya. 5) penguatan jejaring pelayanan primer, melalui pemenuhan:	Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.	Penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik tetap berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan ,menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik tetap berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan ,menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	a sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk Prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); b sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) prima dan Posyandu; c obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis pakai (BMHp); d penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uro neurology) dan sarana rumah sakit mampu pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (pONEK); dan e penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). 6) penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan: a 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi; b perawat dan bidan pada entitas Puskesmas Pembantu; c 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uro neurology); d tenaga kesehatan di labkesda; e insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; dan f peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu. c Alokasi anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa yang dianggarkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan uraian perhitungan Tabel 8 sebagai berikut:	Pemerintah Kabupaten Bangli belum mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik yaitu belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa semula Rp300.670.708.763,00 bertambah menjadi Rp12,761,520,278 menjadi Rp313.432.229.041,00 atau 25.19% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sebagaimana maksud butir E.l.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	d Alokasi Anggaran untuk Pengawasan Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Bangli semula Rp11.602.194.027,00 bertambah Rp805.750.000,00 menjadi Rp12.407.944.027,00 atau 0,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut: 1) alokasi belanja gaji dan tunjangan pada Inspektorat semula Rp4.177.947.000,00 bertambah Rp1.023.727.000,00 menjadi Rp5.021.674.000,00 atau 0,39% dari total belanja daerah; dan 2) alokasi belanja Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan semula Rp7.424.247.027,00 berkurang Rp217.977.000,00 menjadi Rp7.206.270.027,00 atau 0,51% dari total belanja daerah. Program yang mendukung pengawasan yaitu: 1) program penyelenggaraan pengawasan tetap sebesar Rp150.270.000,00; dan 2) program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dianggarkan semula Rp654.000.000,00 berkurang Rp133.200.000,00 menjadi Rp520.800.000,00. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi: (1) Kegiatan pengawasan, yaitu:	Berdasarkan Tabel 8 tersebut, Perhitungan Infrastruktur Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Bangli belum mencantumkan alokasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagai komponen perhitungan, sebagaimana dimaksud dalam Tabel E3. Format Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bangli agar menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 sampai batas waktu Tahun 2027. Kabupaten Bangli belum mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Bangli sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan pada Inspektorat dan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja diluar gaji dan tunjangan pada Inspektorat dan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.	Pemerintah Kabupaten Bangli terus berusaha mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berusaha memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat sekurang-kurangnya 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja diluar gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat dan di atas Rp10.000.000.000,00 yang menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	a) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksaan kinerja; b) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD; c) pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah; d) reviu laporan keuangan; e) kegiatan pengawasan lainnya meliputi probity audit, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; f) sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan g) penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	2) peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP; dan 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain. sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. e Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran yang tercantum pada Urusan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp848.529.900,00 tidak mengalami perubahan atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain diuraikan pada kegiatan: 1) pengembangan pengembangan kompetensi ASN sebesar Rp169.185.000,00 tidak mengalami perubahan; dan 2) kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional sebesar Rp400.149.000,00 tidak mengalami perubahan. 6 Penyediaan Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: a. ☐ Alokasi Anggaran untuk Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran penurunan prevalensi kekurangan (underweight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi stunting (kurus) pada anak balita semula Rp36.372.198.200,00 bertambah Rp19.547.395.000,00 menjadi Rp55.919.593.200,00 atau 4,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang antara lain tercantum pada: dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK kabupaten melalui:	Pemerintah Kabupaten Bangli belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Berkaitan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bangli agar mempertahankan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berusaha memenuhi alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi yang menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	1) ☐ sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Rp523.800.000,00 antara lain diuraikan kedalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp523.800.000,00; 2) ☐ sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Rp999.600.000,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp999.600.000,00; dan 3) ☐ sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp2.235.323.500,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Rp1.424.770.500,00. Uraian Belanja pada sub kegiatan tersebut agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan stunting di Daerah, Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 400.5.2/0335/Bangda tanggal 17 Januari 2024 tentang Hasil Pemetaan Sub Kegiatan Percepatan Penurunan stunting berdasarkan indikator Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 serta berpedoman butir E.1.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. b. ☐ Alokasi Anggaran dalam rangka Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem semula Rp94.031.950.941,00 bertambah Rp19.869.604.212,00 menjadi Rp113.901.555.153,00 atau 8,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang antara lain tercantum pada: dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK kabupaten melalui: 1) sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp624,677,000,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp550.000.000,00; 2) sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Rp735.707.000,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp735.707.000,00; 3) sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Rp1.788.760.000,00; 4) sub kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat Rp654.164.800,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp544.425.000,00; dan 5) sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp5.978.037.000,00 diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp5.978.037.000,00	Pemerintah Kabupaten Bangli agar mensinkronisasikan program Pemerintah Daerah dengan program pemerintah pusat dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk sinkronisasi data penerima program supaya data dimaksud tidak tumpang tindih.	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Uraian Belanja pada sub kegiatan tersebut agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.l.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. c. ☐ Alokasi Anggaran dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pengendalian inflasi di daerah semula Rp1.749.392.300,00 bertambah Rp39.274.765,00 menjadi Rp2.134.465.500,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain dianggarkan pada: 1) sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sebesar Rp493.235.335,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp320.000.000,00; 2) sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp624.677.000,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp550.000.000,00; 3) sub kegiatan pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Rp161.313.000,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp90.360.000,00 dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp33.000.000,00; dan 4) sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Rp208.599.200,00 antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp142.000.000,00 dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp49.200.000,00. Uraian Belanja pada sub kegiatan tersebut agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir c.l.m.4) Lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi pemerintah Kabupaten Bangli agar tetap fokus terhadap pengendalian inflasi antara lain: (1) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis; (2) pengendalian laju alih fungsi lahan; (3) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran;		Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	(4) penguatan tata kelola logistik daerah; dan (5) pengawasan harga dan operasi pasar, Sebagaimana maksud butir C.1.m.c) dan butir E.2.ad.2).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. d. ☐ Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran TP-PKK semula Rp2.058.759.500,00 bertambah Rp15.300.000,00 menjadi Rp2.074.059.500,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pada program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat. Dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK kabupaten melalui: 1) ☐ upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; 2) ☐ dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga ann trafficking. dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; 3) ☐ mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian; 4) ☐ mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan / pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga; 5) ☐ dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;		Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	6) ☐ pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi: a) ☐ penghayatan dan pengamalan Pancasila; b) ☐ gotong royong; c) ☐ pangan; d) ☐ sandang; e) ☐ perumahan dan pendidikan dan keterampilan; f) ☐ kesehatan; g) ☐ pengembangan kehidupan berkoperasi; h) ☐ kelestarian lingkungan hidup; dan i) ☐ perencanaan sehat. 7) ☐ dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi/ kabupaten/ kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 17 Tahun 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 8) ☐ Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah. Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada butir E.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam Nomor 15 Tahun 2023. e. alokasi Anggaran untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran untuk Forkompinda pada Sekretariat Daerah semula Rp513.538.700,00 bertambah Rp166.850.000,00 menjadi Rp680.388.700,00 atau 0,05% dari total Belanja Daerah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain tercantum pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 dan butir E.2.v.d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 f. alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)		Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran untuk FKUB Rp123.250.000,00 tidak mengalami perubahan atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, diuraikan pada Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, diuraikan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bangli dengan alokasi anggaran yang ada untuk tetap mengoptimalkan dan menjaga kerukunan beragama di Kabupaten Bangli.		Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
	g. alokasi Anggaran Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp398.113.923.448,00 atau 75,00% dari total Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Pebruari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah	Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli harus mengupayakan penyediaan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	h. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda (Paskibraka) Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan semula Rp740.527.100,00 bertambah Rp45.250.000,00 menjadi Rp745.777.100,00 atau 0,05% dari total Belanja Daerah dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purna Paskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purna Paskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purna Paskibraka sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.aj Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. i. Alokasi anggaran Peningkatan Investasi	Pemerintah Kabupaten Bangli dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.n.5).a). Lampiran Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	emerintah Kabupaten Bangli dalam pengadaan barang/jasa tetap mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang undangan. Pemerintah Kabupaten Bangli berusaha lebih meningkatkan konsistensi alokasi anggaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengahsekurang kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.n.5).a) Lampiran Peraturan Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	anggaran dalam rangka peningkatan investasi semula Rp927.681.700,00 bertambah Rp115.255.000,00 menjadi Rp1.042.936.700,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 antara lain dianggarkan pada: 1) sub kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota sebesar Rp59.886.000,00; 2) sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sebesar Rp82.090.000,00 bertambah Rp33.690.000,00 menjadi Rp115.780.000,00 3) sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya sebesar Rp38.946.820,00; dan 4) sub kegiatan penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usaha sebesar Rp95.165.000,00 dari semula tidak dianggarkan. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, serta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 tetap mengarah kepada pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang meliputi sasaran strategis utama peningkatan investasi antara lain: 1) kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem Online Single Submission (OSS); dan 2) mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber daya manusia. sebagaimana ditegaskan pada butir C.1.m.2).d) dan butir E.2.ad.2).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 7 Belanja Operasi Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp1.028.142.084.451,00 bertambah sebesar Rp6.520.794.098,00 atau 0,63% menjadi sebesar Rp1.034.662.878.549,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada objek belanja: a. Belanja Pegawai Penganggaran Belanja Pegawai semula Rp609.931.040.339,00 berkurang sebesar Rp2.382.319.091,00 atau 0,39% menjadi Rp607.548.721.248,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024		Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Selanjutnya jumlah alokasi Belanja Pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp552.548.162.248,00 atau 39,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% dari total belanja daerah. Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada: 1) ☐ Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp351.468.709.908,00 berkurang Rp7.793.781.901,00 atau 2,22% menjadi Rp343.674.928.007,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(l), butir C.3.a.1).h).(2), dan butir C.3.a.1).h).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. 2) ☐ Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang tercantum pada: a) belanja iuran jaminan kesehatan ASN dan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH sebagai berikut: (1) belanja iuran jaminan kesehatan ASN semula Rp17.824.418.187,00 berkurang Rp374.374.967,00 atau 2,10% menjadi Rp17.450.043.220,00.	Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli harus mengupayakan pengalokasian belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir C.3.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam maksud butir C.3.a.1).h).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Bangli tetap mengupayakan pengalokasian belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Penganggaran Gaji dan Tunjangan ASN pada APBD Tahun Anggaran 2024 tetap memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam maksud butir C.3.a.1).h).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (2) belanja iuran jaminan kesehatan bagi DPRD sebesar Rp66.000.000,00 tidak mengalami perubahan yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel 10 sebagai berikut; Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan DPRD dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (3) belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH semula sebesar Rp42.000.000,00, tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir C.3.a.1).h).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	(4) belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan pada (a) enyediaan alokasi anggaran belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada: 1) belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN semula sebesar Rp538.848.800,00 bertambah sebesar Rp9.332.207,00 atau 1,73% menjadi Rp548.181.007,00; dan 2) belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp1.615.269.200,00 berkurang sebesar Rp3.797.747,00 atau 0,24% menjadi Rp1.611.471.453,00, belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya: (b) penyediaan alokasi anggaran belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH, Pimpinan dan anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada: 1)Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp1.200.000,00 tidak mengalami perubahan;	Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN serta Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubahndengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli untuk menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 22	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	2) belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp3.600.000,00 tidak mengalami perubahan; 3) belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD sebesar Rp6.000.000,00 tidak mengalami perubahan; dan 4) belanja jaminan kematian DPRD sebesar Rp36.000.000,00 tidak mengalami perubahan. dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 (5) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain: a) belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp20.382.178.050,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu: belanja uang representasi DPRD sebesar Rp671.790.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli telah memenuhi amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023	kemauan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir C.3.a.1).h).(6). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Uang Representasi DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023	mempertahankan kemampuan keuangan daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	(6) belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp974.095.500,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 sebesar 145% dari uang representasi (7) belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp122.134.950,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp2.268.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, sebesar Rp2.268.000.000,00. (9) belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp567.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, sebesar Rp567.000.000. (10) penyediaan alokasi anggaran yang tercantum dalam rincian objek belanja:	Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bangli harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% dari uang representasi sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli harus mempertahankan secara terus menerus dalam konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli harus mempertahankan secara terus menerus dalam konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.	

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	belanja tunjangan perumahan DPRD sebesar Rp10.220.700.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD induk Tahun Anggaran 2024; (a) belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp4.836.468.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD induk Tahun Anggaran 2024; dan (b) belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp284.760.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD induk Tahun Anggaran 2024. (c) Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (11) penyediaan anggaran belanja dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp110.880.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 15 sebagai berikut; Pemerintah Kabupaten Bangli telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, sebesar Rp110.880.000,00. (12) belanja penerimaan lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Selanjutnya, alokasi anggaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli agar tetap konsisten dalam mengalokasikan anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017	

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp600.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari anggaran APBD induk Tahun Anggaran 2024, dapat dianggarkan dengan penentuan besarnya disesuaikan dengan mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% dari jumlah Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp412.092.687,02. Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan penyediaan anggaran untuk Dana Operasional KDH/WKDH mempedomani Pasal 9 ayat (2) huruf f dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak daerah dan belanja insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan retribusi daerah. (13) tambahan penghasilan ASN Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula Rp129.361.958.153,00 berkurang sebesar Rp3.000.001.000,00 atau 2,27% dari APBD induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp132.361.959.153,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN Rp102.636.166.561,00 berkurang sebesar Rp27.962.667.592,00 atau 21,41% dari APBD induk Tahun Anggaran 2024 Rp130.598.834.153,00; b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN Rp26.725.791.592,00 bertambah sebesar Rp24.962.666.592,00 atau 1.415,82% dari APBD induk Tahun Anggaran 2024 Rp1.763.125.000,00; c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN Rp59.924.261.718,00 bertambah sebesar Rp1.236.493.000,00 atau 2,11% dari APBD induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp58.687.768.718,00; d. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN Rp1.171.315.218,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2024;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		Dapat dianggarkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, Bupati Bangli dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bangli juga memperhatikan kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(7). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	
	e. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula Rp48.501.687.000,00 berkurang Rp1.148.991.000,00 atau 2,37% menjadi Rp47.352.696.000,00; f. belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD semula Rp269.000.000,00 bertambah Rp28.000.000,00 atau 10,41% menjadi Rp297.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024	dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir C.3.b.5).a).(5).(e).iii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	
(14)	belanja honorarium semula Rp4.082.330.000,00 berkurang Rp330.880.000,00 atau 8,11% menjadi Rp3.751.450.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024	Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium agar berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir C.3.a.1).h).(7).(c).ii.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Penggaran pemberian honorarium pada APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir C.3.a.1).h).(7).(c).ii.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
(15)	belanja pegawai BOS Penyediaan anggaran belanja pegawai BOS semula Rp5.845.003.000,00 bertambah Rp244.800.000,00 atau 4,19% menjadi Rp6.089.803.000,00	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Penganggaran Belanja Pegawai BOS pada APBD Tahun Anggaran 2024 tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
(16)	belanja pegawai BLUD		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyediaan anggaran Belanja Pegawai BLUD semula Rp38.960.405.029,00 bertambah Rp6.936.435.810,00 atau 17,80% menjadi Rp45.896.840.839,00	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Penganggaran Belanja Pegawai BLUD pada APBD Tahun Anggaran 2024 tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
8	Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang/Jasa semula Rp299.004.269.734,00 bertambah sebesar Rp22.036.614.635,00 atau 7,37% menjadi Rp321.040.884.369,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024	Harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	Tetap digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran.
	1) belanja barang semula Rp72.880.071.857,00 berkurang sebesar Rp13.515.060.432,00 atau 18,54% menjadi Rp59.365.011.425,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek		
	a) belanja barang pakai habis semula Rp72.880.071.857,00 berkurang sebesar Rp13.515.060.432,00 atau 18,54% menjadi Rp59.365.011.425,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi semula Rp1.823.732.728,00 bertambah sebesar Rp289.254.000,00 atau 15,86% menjadi Rp2.112.986.728,00; (2) belanja bahan-bahan bakar dan pelumas semula Rp6.823.950.273,00 berkurang sebesar Rp1.185.721.821,00 atau 17,38% menjadi Rp5.638.228.452,00; (3) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas semula Rp1.031.385.900,00 bertambah sebesar Rp142.301.700,00 atau 13,80% menjadi Rp1.173.687.600,00; (4) belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya semula Rp13.665.934.200,00 bertambah sebesar Rp5.757.130.000,00 atau 42,13% menjadi Rp19.423.064.200,00; (5) belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya semula Rp17.126.082.800,00 berkurang sebesar Rp15.738.315.000,00 atau 91,90% menjadi Rp1.387.767.800,00; (6) belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat semula Rp12.015.711.500,00 bertambah sebesar Rp781.427.300,00 atau 6,50% menjadi Rp12.797.138.800,00; (7) belanja natura dan pakan-natura semula Rp2.908.081.400,00 berkurang sebesar Rp977.300.000,00 atau 33,61% menjadi Rp1.930.781.400,00;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	(8) belanja makanan dan minuman rapat semula Rp3.782.935.500,00 berkurang sebesar Rp1.786.941.000,00 atau 47,24% menjadi Rp1.995.994.500,00; (9) belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan semula Rp2.258.226.000,00 berkurang sebesar Rp490.441.000,00 atau 21,72% menjadi Rp1.767.785.000,00; dan (10) belanja Pakaian Dinas lapangan (PDL) semula Rp145.100.000,00 berkurang sebesar Rp136.000.000,00 atau 93,73% menjadi Rp9.100.000,00	Harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).2).c).(1).(a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain sebagaimana butir 1).a).(22) dan butir 1).a).(23) di atas dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, dan usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima. sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2).c).(1).(b) dan butir C.3.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	Dalam pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran Penganggarannya tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah, memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait, dan usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.
	2) belanja jasa semula Rp118.785.741.721,00 bertambah sebesar Rp31.320.004.283,00 atau 26,37% menjadi Rp150.105.746.004,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	a) belanja jasa kantor semula Rp84.986.078.020,00 bertambah sebesar Rp11.066.061.567,00 atau 13,02% menjadi Rp96.052.139.587,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan semula Rp7.310.090.000,00 berkurang Rp3.494.084.000,00 atau 47,80% menjadi Rp3.816.006.000,00; (2) belanja jasa tenaga pendidikan semula Rp5.433.750.000,00 bertambah Rp1.554.000.000,00 atau 28,60% menjadi Rp6.987.750.000,00; (3) belanja jasa tenaga administrasi semula Rp22.561.000.000,00 bertambah Rp7.095.150.000,00 atau 31,45% menjadi Rp29.656.150.000,00; (4) belanja jasa pelayanan umum semula Rp23.667.147.200,00 bertambah Rp5.570.528.567,00 atau 23,54% menjadi Rp29.237.675.767,00; danrang Rp1.162.000.000,00 atau 93,44% menjadi Rp81.600.000,00; (5) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp130.000.000,00; (6) belanja tagihan listrik semula Rp2.511.711.000,00 bertambah Rp530.802.000,00 atau 21,13% menjadi Rp3.042.513.000,00	Harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peran dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penganggaran jasa juga sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya, serta untuk penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi Pemerintah Kota, asosiasi DPRD Kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Besaran alokasi anggaran tersebut tetap dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peran dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan sub kegiatan.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	b) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja iuran jaminan/asuransi semula Rp46.453.935.916,00 bertambah sebesar Rp20.131.685.716,00 atau 76,48% dari APBD induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp26.322.250.200,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan ketentuan untuk penganggaran iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, dan iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli, mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, menganggarkan iuran jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembayaran iuran 1% kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bangli agar berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran, menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran, menganggarkan atas pembayaran Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran, menganggarkan kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran PBPUPemerintah Daerah, bantuan iuran PBPUP/BP dan iuran bantuan iuran PBPUP mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Penganggarannya pada APBD Tahun Anggaran 2024, dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).vi. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Bangli tetap memperhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ Tanggal 23 September 2021 tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan ketentuan untuk penganggaran iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, dan iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli, mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, menganggarkan iuran jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembayaran iuran 1% kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bangli agar berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran, menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran, menganggarkan atas pembayaran Bantuan Iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran, menganggarkan kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	c) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja sewa tanah sebesar Rp30.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja sewa tanah untuk bangunan tempat kerja; d) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja sewa peralatan dan mesin semula Rp1.864.992.500,00 bertambah sebesar Rp463.250.000,00 atau 24,84% menjadi Rp2.328.242.500,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:	Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) minimal 98% dari total penduduk pada Tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, maka Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPJ dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional, dan penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPJ dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Bangli tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2).c).(2).b). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penyediaan anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2).c).(2).d). dan butir C.3.a.2).c).(2).e). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	(1) belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan semula Rp261.350.000,00 bertambah sebesar Rp650.000,00 atau 0,25% menjadi Rp262.000.000,00; (2) belanja sewa kendaraan bermotor penumpang semula Rp481.100.000,00 berkurang sebesar Rp17.300.000,00 atau 3,60% menjadi Rp463.800.000,00; (3) belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp3.000.000,00 atau 100,00% menjadi Rp3.000.000,00; (4) belanja sewa alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebesar Rp9.600.000,00 tidak mengalami perubahan; (5) belanja sewa alat kantor lainnya semula Rp452.795.000,00 bertambah sebesar Rp226.900.000,00 atau 50,11% menjadi Rp679.695.000,00; (6) belanja sewa alat rumah tangga lainnya (Home Use) semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp250.000.000,00 atau 100,00% menjadi Rp250.000.000,00; (7) belanja sewa peralatan mainframe sebesar Rp168.147.500,00 tidak mengalami perubahan; dan (8) belanja sewa peralatan jaringan sebesar Rp492.000.000,00 tidak mengalami perubahan. e) penyediaan anggaran yang tercantum pada belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula Rp1.208.900.000,00 berkurang sebesar Rp293.300.000,00 atau 24,26% menjadi Rp915.600.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) belanja sewa bangunan gedung kantor semula Rp31.500.000,00 berkurang sebesar Rp21.000.000,00 atau 66,67% menjadi Rp10.500.000,00; (2) belanja sewa bangunan gudang sebesar Rp30.000.000,00 tidak mengalami perubahan; (3) belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan semula Rp992.200.000,00 bertambah sebesar Rp260.800.000,00 atau 26,29% menjadi Rp731.400.000,00; (4) belanja sewa bangunan gedung tempat kerja semula Rp80.000.000,00 berkurang sebesar Rp36.500.000,00 atau 45,63% menjadi Rp43.500.000,00; (5) belanja sewa bangunan gedung tempat kerja semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp25.000.000,00 atau 100,00% menjadi Rp25.000.000,00;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	(6) belanja sewa hotel sebesar Rp3.200.000,00 tidak mengalami perubahan; dan (7) belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp100.000.000,00 tidak mengalami perubahan. Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 f) penyediaan anggaran yang tercantum pada: 1 belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp100.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 2 belanja jasa konsultansi non konstruksi semula Rp860.000.000,00 berkurang sebesar Rp50.000.000,00 atau 5,81% menjadi Rp810.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 3 belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan semula Rp3.413.521.001,00 bertambah sebesar Rp2.307.000,00 atau 0,07% menjadi Rp3.415.828.001,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat	

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten. Sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2).c).(2).(i).ii dan butir C.3.a.2).c).(2).(i).iii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan, penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 3) belanja pemeliharaan semula Rp3.530.720.000,00 bertambah sebesar Rp80.172.000,00 atau 2,27% menjadi Rp3.610.892.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja pemeliharaan peralatan dan mesin semula Rp2.855.920.000,00 bertambah sebesar Rp42.200.000,00 atau 1,48% menjadi Rp2.898.120.000,00; b) belanja pemeliharaan gedung dan bangunan semula Rp612.300.000,00 bertambah Rp37.972.000,00 atau 6,20% menjadi Rp650.272.000,00; dan c) belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp62.500.000,00 tidak mengalami perubahan	Dapat dianggarkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Bangli. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	Dalam pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	4) belanja perjalanan dinas semula Rp37.859.780.399,00 berkurang sebesar Rp1.307.898.866,00 atau 3,45% menjadi Rp36.551.881.533,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dalam rincian objek belanja perjalanan dinas dalam negeri semula Rp37.859.780.399,00 berkurang sebesar Rp1.307.898.866,00 atau 3,45% menjadi Rp36.551.881.533,00 Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir C.3.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(4).(a).vi. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, butir C.3.a.2).c).(3).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk kegiatan yang bersifat urgen dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Bangli, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan butir C.3.a.2).c).(4).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada: a. Sekretariat Daerah sebesar Rp8.809.100.000,00 atau 9,95% dari total belanja pada Sekretariat; dan b. Sekretariat DPRD sebesar Rp18.482.438.250,00 atau 19,92% dari total belanja pada Sekretariat DPRD	Mengingat Pemerintah Kabupaten Bangli belum memenuhi beberapa belanja yang bersifat mandatori yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan pada Inspektorat dan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, belanja untuk penanganan dampak inflasi di Kabupaten Bangli, alokasi anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN dan iuran jaminan kematian ASN, maka alokasi anggaran belanja perjalanan dinas tersebut agar dirasionalisasi dan dialihkan untuk pemenuhan belanja mandatori pengawasan dan pemenuhan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan dan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja serta mengoptimalkan dan/atau meningkatkan anggaran dalam rangka pemenuhan belanja wajib pelayanan dasar SPM, belanja untuk mendukung urusan Pemerintah daerah antara lain urusan bidang lingkungan hidup pada program pengelolaan sampah, dan dukungan anggaran untuk mendukung prioritas nasional, yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti dengan merasionalisasi belanja perjalanan dinas untuk dialokasikan penggaranyaan penguatan pembinaan dan pengawasan atau anggaran alain yang lebih prioritas Tetap memperhatikan aspek urgensi dan efektifitas hasil jasa konsultasi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	5) belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp422.067.500,00 bertambah sebesar Rp216.717.500,00 atau 105,54% dari APBD induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp205.350.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan dalam rincian objek belanja: a) belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp418.917.500,00 bertambah sebesar Rp216.717.500,00 atau 107,18% dari APBD induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp202.200.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja hadiah yang bersifat perlombaan Rp418.917.500,00 bertambah sebesar Rp216.717.500,00 atau 107,18% dari APBD induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp202.200.000,00; b) belanja jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp3.150.000,00 tidak mengalami perubahan dari APBD induk Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat Rp1.991.979.045,00 bertambah sebesar Rp40.000.000,00 atau 2,05% dari APBD induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.150.000,00; 6) belanja barang dan jasa BOS Rp23.630.826.001,00 bertambah sebesar Rp1.305.212,00 atau 0,01% dari APBD induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.629.520.789,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2).c).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan Berkaitan dengan itu, penyediaan anggaran tersebut hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian, uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota, uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota, uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	7) belanja barang dan jasa BOSP semula tidak dianggarkan bertambah sebesar Rp218.798.500,00 atau 100,00% menjadi Rp218.798.500,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 8) belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebesar Rp7.843.745.782,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 9) belanja barang dan jasa BLUD semula Rp34.269.339.186,00 bertambah sebesar Rp5.022.576.438,00 atau 14,66% menjadi Rp39.291.915.624,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.	dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.5).a).(5).(e).(ii). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	Penganggarannya pada APBD Tahun Anggaran 2024 tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 serta butir E.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
	9 Belanja Bunga Belanja Bunga semula Rp4.108.376.340,00 bertambah sebesar Rp312.739.876,00 atau 7,61% menjadi Rp4.421.116.216,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan dalam belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat. 10 Belanja Hibah Belanja Hibah semula Rp114.841.798.038,00 berkurang sebesar Rp13.446.241.322,00 atau 11,71% menjadi Rp101.395.556.716,00 dengan uraian sebagai berikut: 1) belanja hibah kepada Pemerintah Pusat yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp332.000.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024; 2) belanja kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp113.737.330.800,00 berkurang sebesar Rp13.459.347.800,00 atau 11,83% menjadi Rp100.277.983.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024; dan		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	3) belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik semula Rp772.467.238,00 bertambah sebesar Rp13.106.478,00 atau 1,70% menjadi Rp785.573.716,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.5).a).(5).(e).(ii). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 11. Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp256.600.000,00 tidak mengalami perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024	Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 295 ayat (2) dan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, serta butir C.3.a.5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Bangli sudah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Penganggarannya pada APBD Tahun Anggaran 2024 tetap berpedoman pada Pasal 295 ayat (2) dan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5)Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Bangli sudah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menganggarkan belanja bantuan social yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar Lembaga pemerintah dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam menganggarkan belanja bantuan sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau Masyarakat mencantumkan dengan jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.	Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya tetap dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik semula Rp1.605.085.000,00 bertambah sebesar R34.285.001,00 atau 2,14% menjadi Rp1.639.370.001,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Bangli mencantumkan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 berdasarkan persetujuan Gubernur untuk tingkat kabupaten/kota sebagaimana maksud butir C.a.5).d).(7). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran belanja hibah dalam rangka pendanaan pemilukada sesuai amanat Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Bupati dan Wakil Bupati, yang ditegaskan kembali dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Bupati Tahun 2024.
		Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Partai Politik Rp772.467.238,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Bangli mencantumkan dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 berdasarkan persetujuan gubernur untuk tingkat kabupaten/kota. sebagaimana maksud butir C.a.5).d).(7). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		Dalam hal Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diprediksi tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Bangli agar berhati-hati dalam merealisasikan belanja hibah disesuaikan dengan pencapaian pendapatan daerah sebagaimana dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diprediksi tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Bangli agar berhati-hati dalam merealisasikan belanja hibah disesuaikan dengan pencapaian pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Bangli memenuhi alokasi anggaran untuk belanja mandatori yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti belum memenuhi alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, belum mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan pada Inspektorat dan di atas Rp10.000.000.000,00 belum memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, alokasi anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN dan iuran jaminan kematian ASN. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengurangi alokasi anggaran hibah tersebut, dikecualikan untuk hibah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dengan mengalihkan ke pemenuhan belanja-belanja mandatori, mengoptimalkan belanja untuk mendukung urusan Pemerintah Daerah antara lain urusan bidang lingkungan hidup pada program pengelolaan sampah serta belanja wajib dalam penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan peningkatan investasi, yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berhati-hati dalam merealisasikan belanja hibah disesuaikan dengan pencapaian pendapatan daerah sebagaimana dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berusaha menindaklanjuti hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
12	Belanja Modal Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp182.298.190.725,00 bertambah sebesar Rp26.127.589.600,00 atau 14,33% menjadi Rp208.425.780.325,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:	Harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Tetap diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.b.3). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Bangli sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.b.8).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada: a. Belanja Modal Tanah semula Rp50.000.000,00 berkurang sebesar Rp50.000.000,00 atau 100,00% menjadi Rp0,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 sebagaimana maksud butir C.3.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp27.076.616.945,00 bertambah sebesar Rp1.352.320.125,00 atau 4,99% menjadi Rp28.428.937.070,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:	Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.b.3). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penganggaran pengadaan barang milik daerah tetap didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Bangli sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.b.8).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	1) belanja modal alat angkutan sebesar Rp1.191.900.000,00 tidak mengalami perubahan, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp1.191.900.000,00; 2) belanja modal alat bengkel dan alat ukur semula Rp1.457.780.000,00 berkurang sebesar Rp21.780.000,00 atau 1,49% menjadi Rp1.436.000.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja modal alat bengkel bermesin semula Rp21.780.000,00 berkurang sebesar Rp21.780.000,00 atau 100,00 % menjadi Rp0,00; dan b) belanja modal alat ukur sebesar Rp1.436.000.000,00 tidak mengalami perubahan. 3) belanja modal alat pertanian semula Rp326.816.000,00 bertambah sebesar Rp24.672.000,00 atau 7,55% menjadi Rp351.488.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal alat pengolahan sebesar Rp351.488.000,00; 4) belanja modal alat kantor dan rumah tangga semula Rp1.472.184.314,00 berkurang sebesar Rp284.895.464,00 atau 19,35% menjadi Rp1.187.288.850,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja modal alat kantor semula Rp401.086.364,00 berkurang sebesar Rp9.120.364,00 atau 2,27% menjadi Rp391.966.000,00; b) belanja modal alat rumah tangga semula Rp958.492.700,00 berkurang sebesar Rp181.108.100,00 atau 18,90% menjadi Rp777.384.600,00; dan c) belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat semula Rp112.605.250,00 berkurang sebesar Rp94.667.000,00 atau 84,07% menjadi Rp17.938.250,00. 5) belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar semula Rp3.315.982.750,00 berkurang sebesar Rp3.149.667.750,00 atau 94,98% menjadi Rp166.315.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja modal alat studio semula Rp152.222.750,00 berkurang sebesar Rp152.222.750,00 atau 100,00% menjadi Rp0,00; b) belanja modal alat komunikasi semula Rp10.100.000,00 bertambah sebesar Rp6.215.000,00 atau 61,53% menjadi Rp16.315.000,00; dan c) belanja modal peralatan pemancar semula Rp3.153.660.000,00 berkurang sebesar Rp3.003.660.000,00 atau 95,24% menjadi Rp150.000.000,00. 6) belanja modal alat laboratorium semula Rp17.806.000,00 berkurang sebesar Rp17.806.000,00 atau 100,00% menjadi Rp0,00 yang antara lain diuraikan ke dalam a) belanja unit alat laboratorium semula Rp13.691.000,00 berkurang sebesar Rp13.691.000,00 atau 100,00% menjadi Rp0,00; dan b) belanja modal alat peraga praktek sekolah semula Rp4.115.000,00 berkurang sebesar Rp4.115.000,00 atau 100,00% menjadi Rp0,00 7) belanja modal komputer semula Rp1.765.689.150,00 berkurang sebesar Rp979.501.950,00 atau 55,47% menjadi Rp786.187.200,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) belanja modal komputer unit semula Rp1.517.029.600,00 berkurang sebesar Rp893.349.800,00 atau 58,89% menjadi Rp623.679.800,00; dan b) belanja modal peralatan komputer semula Rp248.659.550,00 berkurang sebesar Rp86.152.150,00 atau 34,65% menjadi Rp162.507.400,00. 8) belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian semula Rp784.840.000,00 berkurang sebesar Rp196.810.000,00 atau 25,08% menjadi Rp588.030.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal sumur sebesar Rp588.030.000,00;		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	9) belanja modal alat keselamatan kerja sebesar Rp17.300.000,00 tidak mengalami perubahan yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal alat pelindung sebesar Rp17.300.000,00; 10) belanja modal peralatan proses/produksi sebesar Rp453.500.000,00 tidak mengalami perubahan yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal unit peralatan proses/produksi lainnya sebesar Rp453.500.000,00; 11) belanja modal rambu-rambu sebesar Rp50.000.000,00 tidak mnengalami perubahan yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebesar Rp50.000.000,00 12) belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp95.000.000,00 tidak mengalami perubahan yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja belanja modal peralatan olahraga sebesar Rp95.000.000,00 13) 13) belanja modal peralatan dan mesin BOS sebesar Rp9.045.938.111,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp9.045.938.111,00; dan 14) belanja modal peralatan dan mesin BLUD semula Rp2.880.190.620,00 bertambah sebesar Rp6.047.105.289,00 atau 209,96% menjadi Rp8.927.295.909,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp8.927.295.909,00. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula Rp4.201.690.000,00 berkurang sebesar Rp1.696.000,00 atau 0,04% menjadi Rp4.199.994.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal alat kedokteran sebesar Rp4.199.994.000,00	Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula Rp4.201.690.000,00 berkurang sebesar Rp1.696.000,00 atau 0,04% menjadi Rp4.199.994.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal alat kedokteran sebesar Rp4.199.994.000,00. Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayananurna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.	Dalam pengadaannya tetap memperhatikan kualitas dan manfaat dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayananurna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin wajib tetap mengutamakan penggunaan Produksi Dalam Negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp41.853.281.025,00 atau 3,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp41.123.281.025,00; dan 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp 730.000.000,00.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp117.431.011.550,00 bertambah sebesar Rp17.629.783.685,00 atau 15,05% menjadi Rp135.060.795.235,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja: 1) belanja modal bangunan gedung semula Rp116.681.011.550,00 bertambah sebesar Rp17.079.784.815,00 atau 14,64% menjadi Rp133.760.796.365,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal bangunan gedung tempat kerja; 2) belanja modal tugu titik kontrol/pasti semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp349.998.870,00 atau 100,00% menjadi Rp349.998.870,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja Belanja Modal Tugu/Tanda Batas; dan 3) belanja modal gedung dan bangunan BLUD semula Rp750.000.000,00 bertambah sebesar Rp200.000.000,00 atau 26,67% menjadi Rp950.000.000,00. d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp37.094.922.630,00 bertambah Rp6.686.717.290,00 atau 18,03% menjadi Rp43.781.639.920,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan kedalam objek belanja: 1) belanja modal jalan dan jembatan semula tidak dianggarkan bertambah Rp150.000.000,00 atau 100,00% menjadi Rp150.000.000,00; 2) belanja modal bangunan air semula tidak dianggarkan bertambah Rp3.200.470.000,00 atau 100,00% menjadi Rp3.200.470.000,00; 3) belanja modal instalasi semula tidak dianggarkan bertambah Rp3.003.660.000,00 atau 100,00% menjadi Rp3.003.660.000,00; dan 4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebesar Rp20.000.000,00 tidak mengalami perubahan. e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula Rp145.639.600,00 berkurang Rp1.231.500,00 atau 0,85% menjadi Rp144.408.100,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek: 1) belanja modal tanaman semula Rp1.231.500,00 berkurang Rp1.231.500,00 atau 100,00% menjadi Rp0,00; dan 2) belanja modal aset tetap lainnya BOS sebesar Rp144.408.100,00 tidak mengalami perubahan. f. Belanja Modal Aset Lainnya semula Rp500.000.000,00 bertambah Rp510.000.000,00 atau 102,00% menjadi Rp1.010.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam peraturan kepala daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana maksud butir C.3.b.3). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.	Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	Penganggarannya pada APBD Tahun Anggaran 2024 tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 dan butir C.3.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Bangli tetap menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati/Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pelaksanaan pengadaan barang milik daerah agar tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam pelaksanaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi agar memperhatikan waktu tahapan pengadaan barang/jasa hingga penyelesaian pekerjaan secara cermat dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Kabupaten Bangli wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.n.5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Dalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Pengadaan barang milik daerah tetap memperhatikan aspek kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	13 Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan butir C.3.c.1). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023	Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp2.250.000.000,00 berkurang Rp89.981.443,00 atau 44,00% menjadi Rp1.260.018.557,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.c.1).b).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Telah dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.c.1).b).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
	14 Belanja Transfer Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp168.928.297.850,00 berkurang Rp3.138.426.716,00 atau 1,86% menjadi Rp165.789.871.134,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai ber ikut: a. Belanja Bagi Hasil semula Rp12.617.333.850,00 bertambah Rp700.000.000,00 atau 5,55% menjadi Rp13.317.333.850,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek: 1) belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa semula Rp5.584.131.650,00 bertambah Rp393.986.200,00 atau 7,06% menjadi Rp5.978.117.850,00; dan 2) belanja bagi hasil retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa semula Rp7.033.202.200,00 bertambah Rp306.013.800,00 atau 4,35% menjadi Rp7.339.216.000,00		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemerintah Kabupaten Bangli sudah mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% dari rencana Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai amanat Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta butir C.3.d.2).a).(9).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 b. Belanja Bantuan Keuangan semula Rp156.310.964.000,00 berkurang Rp3.838.426.716,00 atau 2,46% menjadi Rp152.472.537.284,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp156.310.964.000,00 berkurang Rp3.838.426.716,00 atau 2,46% menjadi Rp152.472.537.284,00	Selanjutnya, besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah tersebut dianggarkan secara bruto, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.d.2).a).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.3.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangli sudah mengalokasikan anggaran Belanja ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.3.d.2).b).(9)) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan belanja bantuan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.3.d.2).b).(14) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa paling sedikit 10% dari rencana Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Penganggarannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam butir C.3.b.4).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran Belanja ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (dana alokasi umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan belanja bantuan keuangan.
C	Kebijakan Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penyediaan alokasi pembiayaan daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tentang APBD Tahun Anggaran sebagaimana Tabel 18 sebagai berikut: 1 Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan penerimaan pembiayaan semula Rp80.079.285.674,00, bertambah Rp66.810.222.211,00 atau 83,43% menjadi Rp13.269.063.463,00 yang diuraikan sebagai berikut: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula Rp80.079.285.674,00, bertambah Rp66.810.222.211,00 atau 83,43% menjadi Rp13.269.063.463,00 atau 0,94% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan ke dalam objek: 1) pelampauan penerimaan PAD semula Rp10.079.285.674,00 berkurang sebesar Rp6.087.212.266,00 atau 60,39% menjadi Rp3.992.073.408,00; dan 2) penghematan belanja semula Rp70.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp60.723.009.945,00 atau 86,75% menjadi Rp9.276.990.055,00 2 Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bangli menganggarkan pengeluaran pembiayaan semula Rp13.962.764.660,00 berkurang Rp2.000.000.000,00 atau 14,32% menjadi Rp11.962.764.660,00. Pengeluaran pembiayaan tersebut terdiri dari: a) penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) semula Rp2.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp0,00 atau 3,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan ke dalam rincian objek Penyertaan Modal Daerah pada BUMD; dan b) b) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp11.962.764.660,00 tidak mengalami perubahan atau 0,85% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan ke dalam rincian objek Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB). Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan perubahan peraturan daerah mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir C.4.b.2).b).(4).(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bangli harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir C.4.a.2).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	Pemerintah Kabupaten Bangli tetap melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir C.4.a.2).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
IV		Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangli terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah. Analisis penyertaan modal dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir C.4.b.2).b).(4).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Pemerintah Kabupaten Bangli telah menyusun perencanaan investasi dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah. Analisis penyertaan modal dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, sebagaimana maksud butir C.4.b.2).b).(4).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
		Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bangli tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan, sebagaimana maksud butir C.4.b.2).b).(4).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	
		Selanjutnya, dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada BUMD, Pemerintah Kabupaten Bangli dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.	Pemerintah Kabupaten Bangli terus berusaha menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
	Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS A Kesesuaian Tahapan dalam Penyusunan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah dengan Perubahan RKPD. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bangli, dan telah disampaikan kepada Gubernur Bali, sesuai dengan Pasal 245 ayat (1), Pasal 314 ayat (1) dan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati B Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Perubahan RKPD.	Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.	Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berusaha memenuhi tahapan yang ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	B. ☐ Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 C. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, dan penambahan Sub kegiatan baru dalam RAPBD yang tidak tercantum dalam KUA dan PPAS perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; D. ☐ Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah E. Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Bangli menyediakan alokasi anggaran untuk pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang meliputi sasaran strategis utama yaitu: 1) penanggulangan kemiskinan; 2) peningkatan investasi; 3) pengendalian stunting melalui digitalisasi administrasi; 4) peningkatan penggunaan PDN; dan 5) pengendalian inflasi. pengendalian inflasi antara lain: 1) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis; 2) pengendalian laju alih fungsi lahan; 3) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran; 4) penguatan tata kelola logistik daerah; dan 5) pengawasan harga dan operasi pasar. sebagaimana dimaksud pada butir E.2.ad.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. F. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar Pemerintah Kabupaten Bangli mengambil langkah-langkah sebagai berikut: 1) melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: a) rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial; b) pemeliharaan Anak-Anak Terlantar; c) pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;	Harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam butir C.2.a.1). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; sebagaimana dimaksud pada butir E.2.ak.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	Telah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi. Telah ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kabupaten Bangli tetap berusaha menindaklanjuti hasil evaluasi pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengambil langkah-langkah sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	d) pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; dan e) pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. 2) menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: a) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota; dan b) advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 3) menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat; a) penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; b) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan c) pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. 4) memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; 5) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali. 6) sebagaimana dimaksud pada butir E.2.ak.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 G. Sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan stunting pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota H. Pemerintah Kabupaten Bangli dalam rangka pengendalian Inflasi mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi:	Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengalokasikan dukungan anggaran percepatan penurunan stunting dalam Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 menggunakan hasil pemetaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ hal Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021;	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan dukungan anggaran percepatan penurunan stunting dalam APBD Tahun Anggaran 2024 menggunakan hasil pemetaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ hal Hasil Pemetaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	1) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis; 2) pengendalian laju alih fungsi lahan; 3) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran; 4) penguatan tata kelola logistik daerah; dan 5) pengawasan harga dan operasi pasar. Selanjutnya dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat. I. Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran program dan kegiatan pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam/non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai yang diformulasikan ke dalam program “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Prabencana” yang selanjutnya diuraikan ke dalam kegiatan, antara lain: a perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana; b pengurangan risiko dan pencegahan bencana; c pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; d kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana; dan e penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.	Pemerintah Kabupaten Bangli menyediakan anggaran untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan terkait, sebagaimana dimaksud dalam butir C.1.m.2).c) dan butir E.2.ab.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; sebagaimana maksud butir C.3.c.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.	Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bangli telah mengalokasikan anggaran sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	J. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan yang diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (value for money)	Pemerintah Kabupaten Bangli agar melakukan langkah langkah strategis mendorong percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, serta melakukan pengadaan barang/jasa dan belanja modal yang bersifat fisik pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	Pemerintah Kabupaten Bangli tetap melakukan langkah-langkah strategis mendorong percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan wajib mengalokasikan paling sedikit 40% produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
	K. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kabupaten Bangli agar mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Bangli menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak berpedoman pada butir C.3.c.7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, antara lain:		Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.
	1 pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;		
	2 Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi: a kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau d pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.		
	3 Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.		

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	L. Pemerintah Kabupaten Bangli harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik untuk pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah; M. Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan Anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024 secara memadai untuk optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, peningkatan akses pelayanan Kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional serta penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam butir E.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; N. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja penerima upah di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.ap.21) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; O. Pemerintah Kabupaten Bangli dapat menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan mendukung pelaksanaan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 90% (sembilan puluh persen) pada akhir Tahun 2024 sesuai amanat pada butir E.2.ab.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; P. Pemerintah Kabupaten Bangli harus memenuhi 6 (enam) dimensi pengukuran IPKD, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020; Q. Dalam rangka pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) menjadi destinasi yang berkelanjutan dan berkualitas, maka diperlukan dukungan alokasi anggaran guna percepatan pengembangan 5 (lima) DPSP. Dukungan alokasi anggaran tersebut untuk Tahun Anggaran 2024 dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok sesuai tujuannya yaitu kelembagaan, infrastruktur dan penataan kawasan, perekonomian lokal/masyarakat, dan peningkatan investasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam butir E.2.ao Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; R. Pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah antara lain:		Pemerintah Kabupaten Bangli telah menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	1 penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan 2 pengurangan sampah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. sebagaimana dimaksud dalam butir E.3.r Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 S. Dalam rangka mengendalikan jumlah kasus positif rabies di Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Bangli agar mengupayakan langkah pencegahan dan pengendalian rabies, termasuk pengendalian rabies di sektor hulu dengan vaksinasi hewan penular rabies dan pengendalian populasi hewan penular rabies. T. Pemerintah Kabupaten Bangli juga diminta untuk mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan kebijakan provinsi antara lain: 1 Penggunaan Busana Adat Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018; 2 Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9393 Tahun 2019 Tanggal 15 Oktober 2019; 3 Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018; 4 Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018; 5 Integrasi Sistem dan Data Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten/Kota secara Elektronik di Provinsi Bali Sejahtera dengan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2019; 6 Penyelenggaraan Bulan Bung Karno sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2019; 7 Pelaksanaan kebijakan Bali Energi Bersih sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019;		Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.

No	Rancangan APBD	Temuan Evaluasi	Penjelasan / Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)
	8 Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019; 9 Kebijakan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019; 10 Sistem Pertanian Organik Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019; 11 Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Bali Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 ; 12 Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 ; 13 Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020; dan; 14 Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 U. Pemerintah Kabupaten Bangli melaporkan rencana Defisit APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2024; V. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.202.407.743,76 terdiri dari: (1) pendapatan diterima dimuka sebesar Rp4.049.838.528,27; (2) utang Belanja sebesar Rp40.907.150.548,42; dan (3) utang Jangka pendek lainnya sebesar Rp1.245.418.667,07. Pemerintah Kabupaten Bangli agar menganggarkan belanja untuk pembayaran kewajiban tersebut sebagai prioritas yang berpedoman pada butir C.4.b.2).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; W. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bangli; dan X. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, wajib mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan		Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi. Pemerintah Kabupaten Bangli akan menindaklanjuti sesuai hasil evaluasi pemerintah provinsi.

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran informasi.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.



DAFTAR ISI

I. LAMPIRAN I	RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
II. LAMPIRAN II	RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
III. LAMPIRAN III	RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
IV. LAMPIRAN IV	REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN
V. LAMPIRAN V	REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
VI. LAMPIRAN VI	REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
VII. LAMPIRAN VII	SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN RANCANGAN APBD
VIII. LAMPIRAN VIII	SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
IX. LAMPIRAN IX	SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA

X. LAMPIRAN X DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

XI. LAMPIRAN XI DAFTAR PIUTANG DAERAH



KABUPATEN BANGLI

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

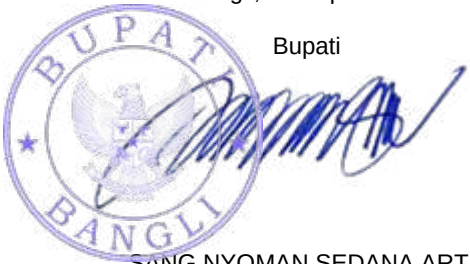
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	267.728.458.013,00	268.536.208.013,00	807.750.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	55.841.316.500,00	59.781.178.500,00	3.939.862.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	68.947.160.000,00	192.428.176.085,00	123.481.016.085,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.074.596.500,00	6.074.596.500,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	136.865.385.013,00	10.252.256.928,00	-126.613.128.085,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.047.773.593.999,00	1.164.612.703.174,00	116.839.109.175,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	838.766.167.000,00	850.737.796.000,00	11.971.629.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	209.007.426.999,00	313.874.907.174,00	104.867.480.175,00
	Jumlah Pendapatan	1.315.502.052.012,00	1.433.148.911.187,00	117.646.859.175,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.028.142.084.451,00	1.059.379.261.295,69	31.237.176.844,69
5.1.01	Belanja Pegawai	609.931.040.339,00	597.677.234.424,11	-12.253.805.914,89
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.004.269.734,00	352.932.068.939,58	53.927.799.205,58
5.1.03	Belanja Bunga	4.108.376.340,00	4.421.116.216,00	312.739.876,00
5.1.05	Belanja Hibah	114.841.798.038,00	104.092.241.716,00	-10.749.556.322,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	256.600.000,00	256.600.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	182.298.190.725,00	208.016.939.003,00	25.718.748.278,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.076.616.945,00	22.891.603.548,00	-4.185.013.397,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.431.011.550,00	138.755.114.435,00	21.324.102.885,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.094.922.630,00	44.867.639.920,00	7.772.717.290,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	145.639.600,00	502.581.100,00	356.941.500,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	500.000.000,00	1.000.000.000,00	500.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.250.000.000,00	1.260.018.557,00	-989.981.443,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.250.000.000,00	1.260.018.557,00	-989.981.443,00
5.4	BELANJA TRANSFER	168.928.297.850,00	165.798.991.134,00	-3.129.306.716,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.617.333.850,00	13.317.333.850,00	700.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	156.310.964.000,00	152.481.657.284,00	-3.829.306.716,00
	Jumlah Belanja	1.381.618.573.026,00	1.434.455.209.989,69	52.836.636.963,69
	Total Surplus/(Defisit)	-66.116.521.014,00	-1.306.298.802,69	64.810.222.211,31
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.079.285.674,00	13.269.063.462,69	-66.810.222.211,31
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.079.285.674,00	13.269.063.462,69	-66.810.222.211,31
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.962.764.660,00	11.962.764.660,00	-2.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	11.962.764.660,00	11.962.764.660,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	13.962.764.660,00	11.962.764.660,00	-2.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	66.116.521.014,00	1.306.298.802,69	-64.810.222.211,31
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Bangli, 20 September 2024

Bupati



SANG NYOMAN SEDANA ARTA



KABUPATEN BANGLI

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.128.134.013.927,00	1.239.354.073.102,00	38.378.947.609,00	31.799.123.834,71	574.222.500,00	778.874.000,00	2.250.000.000,00	1.260.018.557,00	168.928.297.850,00	165.798.991.134,00	210.131.467.959,00	199.637.007.525,71	-10.494.460.433,29		
5	03		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	0,00	6.835.274.000,00	6.628.523.000,00	159.085.000,00	148.525.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994.359.000,00	6.777.048.500,00	-217.310.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	431.787.000,00	341.561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.787.000,00	341.561.500,00	-90.225.500,00		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	124.188.643.900,00	144.406.993.400,00	1.492.868.650,00	1.236.396.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.681.512.550,00	145.643.389.850,00	19.961.877.300,00		
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	52.472.557.500,00	52.230.494.500,00	605.610.250,00	14.415.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.078.167.750,00	52.244.909.750,00	-833.258.000,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	52.472.557.500,00	52.230.494.500,00	605.610.250,00	14.415.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.078.167.750,00	52.244.909.750,00	-833.258.000,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.493.180.000,00	888.680.000,00	159.803.068.878,00	132.326.994.744,00	40.959.966.550,00	42.186.617.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.763.035.428,00	174.513.612.194,00	-26.249.423.234,00		
2	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	0,00	71.883.366.400,00	92.332.306.900,00	887.258.400,00	1.221.981.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.770.624.800,00	93.554.288.100,00	20.783.663.300,00		
2	01	4.01.2.23.2.24.01.0003	Asisten Administrasi Umum	0,00	0,00	8.162.000,00	8.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162.000,00	8.162.000,00	0,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	120.769.316.085,00	122.819.316.085,00	571.857.408.001,00	610.138.396.222,26	127.914.053.525,00	148.752.677.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.771.461.526,00	758.891.073.455,26	59.119.611.929,26		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	117.111.016.085,00	119.111.016.085,00	235.226.130.255,00	261.103.704.746,58	42.821.010.620,00	58.239.872.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.047.140.875,00	319.343.577.279,58	41.296.436.404,58		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Tembuku I	1.474.398.600,00	1.474.398.600,00	2.015.389.838,00	2.160.565.341,79	201.708.762,00	361.567.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.098.600,00	2.522.132.947,79	305.034.347,79		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.493.180.000,00	888.680.000,00	159.803.068.878,00	132.326.994.744,00	40.959.966.550,00	42.186.617.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.763.035.428,00	174.513.612.194,00	-26.249.423.234,00		
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	213.100.000,00	0,00	8.647.510.908,00	8.923.504.408,00	139.122.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786.633.658,00	8.923.504.408,00	136.870.750,00		
2	16	2.16.2.21.2.20.03.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	213.100.000,00	0,00	8.435.522.408,00	8.807.698.408,00	111.222.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.546.745.158,00	8.807.698.408,00	260.953.250,00		
2	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	56.000.000.000,00	61.000.000.000,00	99.072.579.000,00	75.092.868.791,72	5.471.809.000,00	5.842.382.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.544.388.000,00	80.935.251.661,72	-23.609.136.338,28		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	72.126.718.000,00	43.699.649.200,00	75.672.000,00	103.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.202.390.000,00	43.802.896.200,00	-28.399.493.800,00		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.128.134.013.927,00	1.239.354.073.102,00	38.378.947.609,00	31.799.123.834,71	574.222.500,00	778.874.000,00	2.250.000.000,00	1.260.018.557,00	168.928.297.850,00	165.798.991.134,00	210.131.467.959,00	199.637.007.525,71	-10.494.460.433,29		
5	03		KEPEGAWAIAN	0,00	0,00	6.835.274.000,00	6.628.523.000,00	159.085.000,00	148.525.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994.359.000,00	6.777.048.500,00	-217.310.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	6.403.487.000,00	6.286.961.500,00	159.085.000,00	148.525.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562.572.000,00	6.435.487.000,00	-127.085.000,00		
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	65.105.542.000,00	70.086.842.000,00	67.358.494.525,00	72.191.397.851,72	10.841.137.000,00	14.935.490.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.199.631.525,00	87.126.888.721,72	8.927.257.196,72		
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	56.000.000.000,00	61.000.000.000,00	99.072.579.000,00	75.092.868.791,72	5.471.809.000,00	5.842.382.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.544.388.000,00	80.935.251.661,72	-23.609.136.338,28		
3	26	3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	56.000.000.000,00	61.000.000.000,00	26.945.861.000,00	31.393.219.591,72	5.396.137.000,00	5.739.135.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.341.998.000,00	37.132.355.461,72	4.790.357.461,72		
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	10.253.588.000,00	12.374.421.027,00	329.759.000,00	103.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583.347.000,00	12.477.944.027,00	1.894.597.027,00		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	0,00	10.253.588.000,00	12.374.421.027,00	329.759.000,00	103.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583.347.000,00	12.477.944.027,00	1.894.597.027,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0,00	0,00	10.253.588.000,00	12.374.421.027,00	329.759.000,00	103.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583.347.000,00	12.477.944.027,00	1.894.597.027,00		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	124.188.643.900,00	144.406.993.400,00	1.492.868.650,00	1.236.396.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.681.512.550,00	145.643.389.850,00	19.961.877.300,00		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	71.883.366.400,00	92.332.306.900,00	887.258.400,00	1.221.981.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.770.624.800,00	93.554.288.100,00	20.783.663.300,00		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0002	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	0,00	0,00	1.068.094.600,00	650.516.000,00	32.686.400,00	74.186.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.781.000,00	724.702.400,00	-376.078.600,00		
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	33.745.715.038,00	33.915.928.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745.715.038,00	33.915.928.916,00	170.213.878,00		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	33.745.715.038,00	33.915.928.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745.715.038,00	33.915.928.916,00	170.213.878,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	33.745.715.038,00	33.915.928.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745.715.038,00	33.915.928.916,00	170.213.878,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	120.769.316.085,00	122.819.316.085,00	571.857.408.001,00	610.138.396.222,26	127.914.053.525,00	148.752.677.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.771.461.526,00	758.891.073.455,26	59.119.611.929,26		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	117.111.016.085,00	119.111.016.085,00	235.226.130.255,00	261.103.704.746,58	42.821.010.620,00	58.239.872.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.047.140.875,00	319.343.577.279,58	41.296.436.404,58		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Kintamani I	1.598.637.500,00	1.598.637.500,00	2.152.387.500,00	2.248.892.691,70	212.200.000,00	335.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.587.500,00	2.584.092.691,70	219.505.191,70		
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.563.800.000,00	3.613.800.000,00	30.803.555.921,00	36.614.134.700,00	57.598.111.430,00	65.391.648.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.401.667.351,00	102.005.783.055,00	13.604.115.704,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.563.800.000,00	3.613.800.000,00	28.119.538.921,00	30.124.530.700,00	57.598.111.430,00	65.391.648.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.717.650.351,00	95.516.179.055,00	9.798.528.704,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	0,00	22.556.218.500,00	22.226.005.300,00	186.183.500,00	23.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.742.402.000,00	22.249.365.300,00	-493.036.700,00
7	01		KECAMATAN	0,00	0,00	22.556.218.500,00	22.226.005.300,00	186.183.500,00	23.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.742.402.000,00	22.249.365.300,00	-493.036.700,00
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Tembuku	0,00	0,00	4.267.188.000,00	4.133.646.000,00	16.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283.703.000,00	4.133.646.000,00	-150.057.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	65.105.542.000,00	70.086.842.000,00	67.358.494.525,00	72.191.397.851,72	10.841.137.000,00	14.935.490.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.199.631.525,00	87.126.888.721,72	8.927.257.196,72
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	8.555.342.000,00	8.536.642.000,00	9.995.510.525,00	10.723.063.625,00	5.345.000.000,00	9.096.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.340.510.525,00	19.819.418.625,00	4.478.908.100,00
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.555.342.000,00	8.536.642.000,00	8.565.607.125,00	8.420.605.425,00	5.345.000.000,00	5.345.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910.607.125,00	13.765.605.425,00	-145.001.700,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.493.180.000,00	888.680.000,00	159.803.068.878,00	132.326.994.744,00	40.959.966.550,00	42.186.617.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.763.035.428,00	174.513.612.194,00	-26.249.423.234,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	12.351.509.450,00	12.793.855.516,00	25.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.376.855.450,00	12.793.855.516,00	417.000.066,00
2	13	2.13.2.14.0.00.09.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	8.738.233.450,00	9.039.429.516,00	25.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763.579.450,00	9.039.429.516,00	275.850.066,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	213.100.000,00	0,00	8.647.510.908,00	8.923.504.408,00	139.122.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786.633.658,00	8.923.504.408,00	136.870.750,00
2	16	2.16.2.21.2.20.03.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	0,00	169.988.500,00	96.142.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.888.500,00	96.142.000,00	-101.746.500,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	65.105.542.000,00	70.086.842.000,00	67.358.494.525,00	72.191.397.851,72	10.841.137.000,00	14.935.490.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.199.631.525,00	87.126.888.721,72	8.927.257.196,72
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	550.200.000,00	550.200.000,00	30.726.368.000,00	30.374.929.735,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.826.368.000,00	30.474.929.735,00	-351.438.265,00
3	27	3.27.3.25.2.09.01.0000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	1.338.298.000,00	1.384.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.298.000,00	1.384.585.000,00	46.287.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.493.180.000,00	888.680.000,00	159.803.068.878,00	132.326.994.744,00	40.959.966.550,00	42.186.617.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.763.035.428,00	174.513.612.194,00	-26.249.423.234,00
2	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	0,00	6.248.105.550,00	7.102.364.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284.705.550,00	7.102.364.000,00	817.658.450,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	551.460.000,00	571.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.460.000,00	571.495.000,00	20.035.000,00		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.128.134.013.927,00	1.239.354.073.102,00	38.378.947.609,00	31.799.123.834,71	574.222.500,00	778.874.000,00	2.250.000.000,00	1.260.018.557,00	168.928.297.850,00	165.798.991.134,00	210.131.467.959,00	199.637.007.525,71	-10.494.460.433,29		
5	01		PERENCANAAN	0,00	0,00	6.202.687.900,00	6.053.783.200,00	280.195.000,00	137.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482.882.900,00	6.191.154.200,00	-291.728.700,00		
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	6.202.687.900,00	6.053.783.200,00	280.195.000,00	137.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482.882.900,00	6.191.154.200,00	-291.728.700,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.493.180.000,00	888.680.000,00	159.803.068.878,00	132.326.994.744,00	40.959.966.550,00	42.186.617.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.763.035.428,00	174.513.612.194,00	-26.249.423.234,00		
2	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	550.200.000,00	550.200.000,00	30.726.368.000,00	30.374.929.735,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.826.368.000,00	30.474.929.735,00	-351.438.265,00		
2	27	3.27.3.25.2.09.01.0000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00	351.750.000,00	318.917.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.750.000,00	318.917.600,00	-32.832.400,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	120.769.316.085,00	122.819.316.085,00	571.857.408.001,00	610.138.396.222,26	127.914.053.525,00	148.752.677.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.771.461.526,00	758.891.073.455,26	59.119.611.929,26		
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	20.915.322.500,00	20.690.958.800,00	59.847.800,00	22.984.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.975.170.300,00	20.713.943.600,00	-261.226.700,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	12.953.066.300,00	12.909.210.200,00	19.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972.629.300,00	12.909.210.200,00	-63.419.100,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.493.180.000,00	888.680.000,00	159.803.068.878,00	132.326.994.744,00	40.959.966.550,00	42.186.617.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.763.035.428,00	174.513.612.194,00	-26.249.423.234,00		
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	159.600.000,00	269.400.000,00	33.038.397.550,00	34.023.589.550,00	2.537.988.000,00	3.080.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.576.385.550,00	37.104.577.550,00	1.528.192.000,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	159.600.000,00	269.400.000,00	33.038.397.550,00	34.023.589.550,00	2.537.988.000,00	3.080.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.576.385.550,00	37.104.577.550,00	1.528.192.000,00		
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	1.120.480.000,00	619.280.000,00	8.338.629.000,00	8.292.135.400,00	185.140.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.523.769.000,00	8.344.135.400,00	-179.633.600,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	1.120.480.000,00	619.280.000,00	8.338.629.000,00	8.292.135.400,00	185.140.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.523.769.000,00	8.344.135.400,00	-179.633.600,00		
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0,00	0,00	7.263.270.000,00	7.378.886.800,00	8.290.542.450,00	8.290.362.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.553.812.450,00	15.669.249.250,00	115.436.800,00		
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	7.263.270.000,00	7.378.886.800,00	8.290.542.450,00	8.290.362.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.553.812.450,00	15.669.249.250,00	115.436.800,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0,00	0,00	6.644.439.320,00	6.716.026.520,00	0,00	96.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644.439.320,00	6.812.601.520,00	168.162.200,00		
2	17	2.17.2.07.0.00.06.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	82.250.000,00	63.475.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250.000,00	63.475.200,00	-18.774.800,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	120.769.316.085,00	122.819.316.085,00	571.857.408.001,00	610.138.396.222,26	127.914.053.525,00	148.752.677.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.771.461.526,00	758.891.073.455,26	59.119.611.929,26		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	117.111.016.085,00	119.111.016.085,00	235.226.130.255,00	261.103.704.746,58	42.821.010.620,00	58.239.872.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.047.140.875,00	319.343.577.279,58	41.296.436.404,58		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Kintamani VI	1.310.606.100,00	1.310.606.100,00	1.836.850.610,00	1.885.950.103,78	215.755.490,00	381.755.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.606.100,00	2.267.705.593,78	215.099.493,78		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Tembuku II	1.554.403.800,00	1.554.403.800,00	2.119.303.800,00	2.265.644.209,93	189.100.000,00	50.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308.403.800,00	2.316.344.209,93	7.940.409,93		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	124.188.643.900,00	144.406.993.400,00	1.492.868.650,00	1.236.396.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.681.512.550,00	145.643.389.850,00	19.961.877.300,00		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	71.883.366.400,00	92.332.306.900,00	887.258.400,00	1.221.981.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.770.624.800,00	93.554.288.100,00	20.783.663.300,00		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0003	Asisten Administrasi Umum	0,00	0,00	9.538.933.900,00	10.523.954.100,00	792.232.000,00	1.139.325.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.331.165.900,00	11.663.279.900,00	1.332.114.000,00		
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	0,00	22.556.218.500,00	22.226.005.300,00	186.183.500,00	23.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.742.402.000,00	22.249.365.300,00	-493.036.700,00		
7	01		KECAMATAN	0,00	0,00	22.556.218.500,00	22.226.005.300,00	186.183.500,00	23.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.742.402.000,00	22.249.365.300,00	-493.036.700,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Kintamani	0,00	0,00	4.186.869.000,00	3.976.747.000,00	5.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191.961.000,00	3.976.747.000,00	-215.214.000,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.493.180.000,00	888.680.000,00	159.803.068.878,00	132.326.994.744,00	40.959.966.550,00	42.186.617.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.763.035.428,00	174.513.612.194,00	-26.249.423.234,00		
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	0,00	6.644.439.320,00	6.716.026.520,00	0,00	96.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644.439.320,00	6.812.601.520,00	168.162.200,00		
2	17	2.17.2.07.0.00.06.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	6.562.189.320,00	6.652.551.320,00	0,00	96.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562.189.320,00	6.749.126.320,00	186.937.000,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	120.769.316.085,00	122.819.316.085,00	571.857.408.001,00	610.138.396.222,26	127.914.053.525,00	148.752.677.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.771.461.526,00	758.891.073.455,26	59.119.611.929,26		
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.563.800.000,00	3.613.800.000,00	30.803.555.921,00	36.614.134.700,00	57.598.111.430,00	65.391.648.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.401.667.351,00	102.005.783.055,00	13.604.115.704,00		
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	2.684.017.000,00	6.489.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.017.000,00	6.489.604.000,00	3.805.587.000,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.493.180.000,00	888.680.000,00	159.803.068.878,00	132.326.994.744,00	40.959.966.550,00	42.186.617.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.763.035.428,00	174.513.612.194,00	-26.249.423.234,00		
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	213.100.000,00	0,00	8.647.510.908,00	8.923.504.408,00	139.122.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786.633.658,00	8.923.504.408,00	136.870.750,00		
2	16	2.16.2.21.2.20.03.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	0,00	42.000.000,00	19.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	19.664.000,00	-22.336.000,00		
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	6.422.454.650,00	6.269.969.250,00	82.710.350,00	840.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505.165.000,00	7.109.969.250,00	604.804.250,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	6.422.454.650,00	6.269.969.250,00	82.710.350,00	840.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505.165.000,00	7.109.969.250,00	604.804.250,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	120.769.316.085,00	122.819.316.085,00	571.857.408.001,00	610.138.396.222,26	127.914.053.525,00	148.752.677.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.771.461.526,00	758.891.073.455,26	59.119.611.929,26		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	117.111.016.085,00	119.111.016.085,00	235.226.130.255,00	261.103.704.746,58	42.821.010.620,00	58.239.872.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.047.140.875,00	319.343.577.279,58	41.296.436.404,58		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	Puskesmas Bangli	1.375.751.500,00	1.375.751.500,00	2.036.301.500,00	2.066.038.809,54	85.950.000,00	135.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.251.500,00	2.201.988.809,54	79.737.309,54		
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	0,00	22.556.218.500,00	22.226.005.300,00	186.183.500,00	23.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.742.402.000,00	22.249.365.300,00	-493.036.700,00		
7	01		KECAMATAN	0,00	0,00	22.556.218.500,00	22.226.005.300,00	186.183.500,00	23.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.742.402.000,00	22.249.365.300,00	-493.036.700,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Bangli	0,00	0,00	10.718.709.500,00	10.561.364.300,00	151.576.500,00	23.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870.286.000,00	10.584.724.300,00	-285.561.700,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.493.180.000,00	888.680.000,00	159.803.068.878,00	132.326.994.744,00	40.959.966.550,00	42.186.617.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.763.035.428,00	174.513.612.194,00	-26.249.423.234,00		
2	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	94.500.000,00	94.500.000,00	283.157.908.775,00	288.400.988.975,68	57.021.928.675,00	54.821.616.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.179.837.450,00	343.222.605.520,68	3.042.768.070,68		
2	01	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	3.942.155.000,00	3.202.260.000,00	29.623.445.000,00	29.723.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.565.600.000,00	32.925.705.000,00	-639.895.000,00		
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	65.105.542.000,00	70.086.842.000,00	67.358.494.525,00	72.191.397.851,72	10.841.137.000,00	14.935.490.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.199.631.525,00	87.126.888.721,72	8.927.257.196,72		
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	550.200.000,00	550.200.000,00	30.726.368.000,00	30.374.929.735,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.826.368.000,00	30.474.929.735,00	-351.438.265,00		
3	27	3.27.3.25.2.09.01.0000	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	550.200.000,00	550.200.000,00	29.036.320.000,00	28.671.427.135,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.136.320.000,00	28.771.427.135,00	-364.892.865,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	120.769.316.085,00	122.819.316.085,00	571.857.408.001,00	610.138.396.222,26	127.914.053.525,00	148.752.677.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.771.461.526,00	758.891.073.455,26	59.119.611.929,26		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	117.111.016.085,00	119.111.016.085,00	235.226.130.255,00	261.103.704.746,58	42.821.010.620,00	58.239.872.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.047.140.875,00	319.343.577.279,58	41.296.436.404,58		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Kintamani IV	898.593.200,00	898.593.200,00	1.620.690.152,00	1.647.695.330,16	21.903.048,00	92.922.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.593.200,00	1.740.617.842,16	98.024.642,16		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.128.134.013.927,00	1.239.354.073.102,00	38.378.947.609,00	31.799.123.834,71	574.222.500,00	778.874.000,00	2.250.000.000,00	1.260.018.557,00	168.928.297.850,00	165.798.991.134,00	210.131.467.959,00	199.637.007.525,71	-10.494.460.433,29		
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	0,00	1.261.339.100,00	1.452.971.299,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.839.100,00	1.465.471.299,00	191.632.199,00		
5	05	5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	0,00	1.261.339.100,00	1.452.971.299,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.839.100,00	1.465.471.299,00	191.632.199,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	120.769.316.085,00	122.819.316.085,00	571.857.408.001,00	610.138.396.222,26	127.914.053.525,00	148.752.677.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.771.461.526,00	758.891.073.455,26	59.119.611.929,26		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	117.111.016.085,00	119.111.016.085,00	235.226.130.255,00	261.103.704.746,58	42.821.010.620,00	58.239.872.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.047.140.875,00	319.343.577.279,58	41.296.436.404,58		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	75.000.000,00	75.000.000,00	85.840.454.800,00	104.882.897.216,00	3.859.190.000,00	4.139.036.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.699.644.800,00	109.021.933.216,00	19.322.288.416,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Susut I	1.612.670.143,00	1.612.670.143,00	2.256.670.143,00	2.243.726.302,55	108.500.000,00	210.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.170.143,00	2.454.226.302,55	89.056.159,55		
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0,00	0,00	22.556.218.500,00	22.226.005.300,00	186.183.500,00	23.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.742.402.000,00	22.249.365.300,00	-493.036.700,00		
7	01		KECAMATAN	0,00	0,00	22.556.218.500,00	22.226.005.300,00	186.183.500,00	23.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.742.402.000,00	22.249.365.300,00	-493.036.700,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Susut	0,00	0,00	3.383.452.000,00	3.554.248.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396.452.000,00	3.554.248.000,00	157.796.000,00		
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	65.105.542.000,00	70.086.842.000,00	67.358.494.525,00	72.191.397.851,72	10.841.137.000,00	14.935.490.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.199.631.525,00	87.126.888.721,72	8.927.257.196,72		
3	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	0,00	71.883.366.400,00	92.332.306.900,00	887.258.400,00	1.221.981.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.770.624.800,00	93.554.288.100,00	20.783.663.300,00		
3	01	4.01.2.23.2.24.01.0001	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	0,00	0,00	42.505.000,00	19.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.505.000,00	19.102.500,00	-23.402.500,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	120.769.316.085,00	122.819.316.085,00	571.857.408.001,00	610.138.396.222,26	127.914.053.525,00	148.752.677.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.771.461.526,00	758.891.073.455,26	59.119.611.929,26		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	117.111.016.085,00	119.111.016.085,00	235.226.130.255,00	261.103.704.746,58	42.821.010.620,00	58.239.872.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.047.140.875,00	319.343.577.279,58	41.296.436.404,58		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Kintamani II	1.047.840.000,00	1.047.840.000,00	1.668.340.000,00	1.885.459.361,59	140.000.000,00	269.523.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.340.000,00	2.154.982.964,59	346.642.964,59		
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	0,00	124.188.643.900,00	144.406.993.400,00	1.492.868.650,00	1.236.396.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.681.512.550,00	145.643.389.850,00	19.961.877.300,00		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	0,00	0,00	71.883.366.400,00	92.332.306.900,00	887.258.400,00	1.221.981.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.770.624.800,00	93.554.288.100,00	20.783.663.300,00		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0001	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	0,00	0,00	21.355.908.600,00	46.099.793.800,00	62.340.000,00	8.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.418.248.600,00	46.108.262.800,00	24.690.014.200,00		
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	39.753.149.300,00	34.902.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.753.149.300,00	34.902.235.000,00	-4.850.914.300,00		
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.493.180.000,00	888.680.000,00	159.803.068.878,00	132.326.994.744,00	40.959.966.550,00	42.186.617.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.763.035.428,00	174.513.612.194,00	-26.249.423.234,00		
2	01	4.01.2.23.2.24.01.0003	Asisten Administrasi Umum	0,00	0,00	116.613.000,00	128.543.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.613.000,00	128.543.500,00	11.930.500,00		
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	12.351.509.450,00	12.793.855.516,00	25.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.376.855.450,00	12.793.855.516,00	417.000.066,00		
2	13	2.13.2.14.0.00.09.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	3.613.276.000,00	3.754.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613.276.000,00	3.754.426.000,00	141.150.000,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	120.769.316.085,00	122.819.316.085,00	571.857.408.001,00	610.138.396.222,26	127.914.053.525,00	148.752.677.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.771.461.526,00	758.891.073.455,26	59.119.611.929,26		
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	0,00	20.915.322.500,00	20.690.958.800,00	59.847.800,00	22.984.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.975.170.300,00	20.713.943.600,00	-261.226.700,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.09.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	7.962.256.200,00	7.781.748.600,00	40.284.800,00	22.984.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.002.541.000,00	7.804.733.400,00	-197.807.600,00		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	117.111.016.085,00	119.111.016.085,00	235.226.130.255,00	261.103.704.746,58	42.821.010.620,00	58.239.872.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.047.140.875,00	319.343.577.279,58	41.296.436.404,58		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Bangli Utara	1.217.673.450,00	1.217.673.450,00	1.728.253.450,00	1.961.237.561,92	258.600.000,00	298.165.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.853.450,00	2.259.402.783,92	272.549.333,92		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah	100.690.000.000,00	102.690.000.000,00	126.168.238.990,00	131.866.693.964,18	36.821.630.000,00	51.068.228.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.989.868.990,00	182.934.922.744,18	19.945.053.754,18		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.128.134.013.927,00	1.239.354.073.102,00	38.378.947.609,00	31.799.123.834,71	574.222.500,00	778.874.000,00	2.250.000.000,00	1.260.018.557,00	168.928.297.850,00	165.798.991.134,00	210.131.467.959,00	199.637.007.525,71	-10.494.460.433,29		
5	02		KEUANGAN	1.128.134.013.927,00	1.239.354.073.102,00	24.079.646.609,00	17.663.846.335,71	122.442.500,00	480.477.500,00	2.250.000.000,00	1.260.018.557,00	168.928.297.850,00	165.798.991.134,00	195.380.386.959,00	185.203.333.526,71	-10.177.053.432,29		
5	02	5.02.0.00.0.00.04.0000	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.128.134.013.927,00	1.239.354.073.102,00	24.079.646.609,00	17.663.846.335,71	122.442.500,00	480.477.500,00	2.250.000.000,00	1.260.018.557,00	168.928.297.850,00	165.798.991.134,00	195.380.386.959,00	185.203.333.526,71	-10.177.053.432,29		

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Belanja										Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
						Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer						
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	120.769.316.085,00	122.819.316.085,00	571.857.408.001,00	610.138.396.222,26	127.914.053.525,00	148.752.677.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.771.461.526,00	758.891.073.455,26	59.119.611.929,26		
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0,00	0,00	6.248.105.550,00	7.102.364.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284.705.550,00	7.102.364.000,00	817.658.450,00		
1	06	1.06.2.08.0.00.02.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	5.696.645.550,00	6.530.869.000,00	36.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733.245.550,00	6.530.869.000,00	797.623.450,00		
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	65.105.542.000,00	70.086.842.000,00	67.358.494.525,00	72.191.397.851,72	10.841.137.000,00	14.935.490.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.199.631.525,00	87.126.888.721,72	8.927.257.196,72		
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	8.555.342.000,00	8.536.642.000,00	9.995.510.525,00	10.723.063.625,00	5.345.000.000,00	9.096.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.340.510.525,00	19.819.418.625,00	4.478.908.100,00		
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	1.429.903.400,00	2.302.458.200,00	0,00	3.751.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.903.400,00	6.053.813.200,00	4.623.909.800,00		
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	120.769.316.085,00	122.819.316.085,00	571.857.408.001,00	610.138.396.222,26	127.914.053.525,00	148.752.677.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.771.461.526,00	758.891.073.455,26	59.119.611.929,26		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	117.111.016.085,00	119.111.016.085,00	235.226.130.255,00	261.103.704.746,58	42.821.010.620,00	58.239.872.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.047.140.875,00	319.343.577.279,58	41.296.436.404,58		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Kintamani V	1.764.455.500,00	1.764.455.500,00	2.124.469.500,00	2.135.740.269,62	389.267.000,00	389.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513.736.500,00	2.525.007.269,62	11.270.769,62		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	94.500.000,00	94.500.000,00	283.157.908.775,00	288.400.988.975,68	57.021.928.675,00	54.821.616.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.179.837.450,00	343.222.605.520,68	3.042.768.070,68		
1	01	1.01.2.19.0.00.03.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	94.500.000,00	94.500.000,00	279.215.753.775,00	285.198.728.975,68	27.398.483.675,00	25.098.171.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.614.237.450,00	310.296.900.520,68	3.682.663.070,68		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	117.111.016.085,00	119.111.016.085,00	235.226.130.255,00	261.103.704.746,58	42.821.010.620,00	58.239.872.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.047.140.875,00	319.343.577.279,58	41.296.436.404,58		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Susut II	1.403.606.292,00	1.403.606.292,00	1.954.879.972,00	2.093.491.315,17	188.226.320,00	312.726.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.106.292,00	2.406.217.635,17	263.111.343,17		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Kintamani III	1.087.380.000,00	1.087.380.000,00	1.703.900.000,00	1.759.672.268,65	128.980.000,00	194.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.880.000,00	1.954.002.268,65	121.122.268,65		
			TOTAL	1.315.502.052.012,00	1.433.148.911.187,00	1.028.142.084.451,00	1.059.379.261.295,69	182.298.190.725,00	208.016.939.003,00	2.250.000.000,00	1.260.018.557,00	168.928.297.850,00	165.798.991.134,00	1.381.618.573.026,00	1.434.455.209.989,69	52.836.636.963,69		

Kab. Bangli, 20 September 2024

Bupati





KABUPATEN BANGLI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PENDAPATAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.315.502.052.012,0 0	1.433.148.911.187,0 0	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	267.728.458.013,00	268.536.208.013,00	
4.1.01	Pajak Daerah	55.841.316.500,00	59.781.178.500,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	68.947.160.000,00	192.428.176.085,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.074.596.500,00	6.074.596.500,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	136.865.385.013,00	10.252.256.928,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.047.773.593.999,0 0	1.164.612.703.174,0 0	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	838.766.167.000,00	850.737.796.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	209.007.426.999,00	313.874.907.174,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	40.800.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	231.083.987.450,00	227.434.463.108,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksannnya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.730.000,00	47.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.528.200,00	8.528.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.109.600,00	8.109.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	48.450.000,00	40.290.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.143.400,00	227.120.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.434.000,00	44.434.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.527.500,00	3.527.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.657.500,00	47.657.500,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.900.000,00	102.900.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.800.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	27.780.000,00	27.780.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.106.000,00	137.226.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.900.000,00	966.330.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	42.600.000,00	42.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.521.900,00	188.451.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.490.000,00	8.490.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.490.000,00	45.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Prosentase Kualitas Pengelolaan Pendidikan			
Kegiatan	: 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	998.592.400,00	998.592.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	669.354.600,00	669.354.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.752.500,00	43.675.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	250.335.300,00	250.335.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.766.000,00	94.766.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	527.320.850,00	527.320.850,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	88.696.000,00	88.696.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			

Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.925.800,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.772.500.000,00	8.898.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.733.000,00	11.610.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.167.049.000,00	49.560.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.554.205.800,00	21.635.110.982,68	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	149.100.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.275.366.300,00	2.159.237.730,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55.338.900,00	97.406.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.496.481.000,00	2.496.481.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	827.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	243.973.350,00	243.973.350,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.978.037.000,00	7.998.037.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	321.023.050,00	321.023.050,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.775.000,00	29.697.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	322.773.350,00	322.773.350,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	37.972.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.693.177.750,00	3.083.177.750,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.026.750,00	90.026.750,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	376.524.025,00	376.524.025,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.334.449.075,00	2.334.449.075,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	100.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	227.700.000,00	227.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	161.304.000,00	161.304.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.764.250.000,00	4.856.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.727.514.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.187.514.989,00	13.465.249.485,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	227.840.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.770.571.811,00	1.124.152.515,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	89.069.200,00	185.478.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.800,00	332.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.261.400,00	5.626.400,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.600.000,00	6.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.138.400,00	400.400,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	2.370.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	168.758.000,00	168.758.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.000.000,00	95.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.355.036,00	433.795.700,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.049.700.000,00	1.990.800.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.044.964,00	106.604.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.614.500.000,00	3.402.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	13.260.000,00	13.260.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.060.000,00	53.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	200.000.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Sub Kegiatan	: 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	33.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	76.500.000,00	63.900.000,00	
Program	: 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Porsentase Pengembangan Kurikulum			
Kegiatan	: 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Muatan Lokas Pendidikan Dasar			
Sub Kegiatan	: 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.591.000,00	1.285.000,00	
Program	: 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Prosentase Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
Kegiatan	: 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Terlaksannya Pendidikan dan Tenaga Pendidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang adil dan Merata			
Sub Kegiatan	: 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	7.260.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.936.000,00	20.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	7.260.000,00	7.260.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.544.000,00	42.084.000,00	
Program	: 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Berbasis Keagamaan Pada Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Dalam Bentuk Pesraman			
Kegiatan	: 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Telaksanya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.01	Belanja Pegawai	21.420.000,00	13.260.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.612.500,00	12.500.000,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.120.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.533.100,00	47.613.100,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	48.234.850.600,00	47.752.395.016,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	26.520.000,00	26.520.000,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.510.000,00	68.500.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksannya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	26.520.000,00	26.520.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.550.000,00	108.600.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.550.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.300.000,00	59.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	6.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.632.800,00	23.632.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.888.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	525.625.100,00	448.975.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.620.000,00	87.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	5.520.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.402.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	118.200.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.500.000,00	287.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	78.360.000,00	53.880.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.500.000,00	311.880.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	594.074.000,00	453.303.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	20.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas			

Indikator Keluaran	: Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.700.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	455.400.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.655.870.000,00	0,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	3.200.470.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	183.316.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	51.842.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.842.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.732.117.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.715.813.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.400.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.950.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	232.048.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.548.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	119.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.020.000,00	57.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.052.000,00	213.052.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.575.000,00	4.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.575.000,00	4.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	350.000.000,00	450.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.880.000,00	35.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.590.000,00	319.590.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	299.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.033.000,00	177.033.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.720.000,00	9.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.790.000,00	298.790.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.420.000,00	52.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	772.533.000,00	958.923.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	39.840.000,00	39.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.293.397.200,00	45.515.642.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.985.000,00	63.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	377.400.000,00	452.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.141.000,00	149.684.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.830.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	13.056.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	28.500.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.452.000,00	26.052.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.575.000,00	16.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			
Indikator Keluaran	: Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.075.000,00	159.075.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Tersedianya sistem informasi Kesehatan secara terintergrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.240.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terbitnya izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.620.000,00	56.620.000,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya perizinan praktek tenaga kesehatan			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.520.000,00	61.560.000,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.760.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	999.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	810.900.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	301.558.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.258.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.012.904.000,00	940.004.000,00	
Program	: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
Indikator Hasil	: Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman			
Kegiatan	: 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
Indikator Keluaran	: Terbitnya izin Apotek, Toko Obat, Alat Kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.001.000,00	61.001.000,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Terbitnya sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.650.000,00	132.650.000,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			

Indikator Keluaran	: Terbitnya sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeriksaan post market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			
Sub Kegiatan	: 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.680.000,00	178.680.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	19.800.000,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	49.500.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Bangli			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	946.739.924,00	851.981.947,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.061.576,00	467.556.862,54	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.950.000,00	129.950.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	6.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.736.000,00	8.736.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.158.000,00	3.158.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.950.000,00	38.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.608.000,00	221.608.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	5.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.428.000,00	9.428.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.542.000,00	153.542.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	103.444.444,00	103.444.444,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.055.556,00	61.055.556,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.220.000,00	106.220.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Tersedianya sistem informasi Kesehatan secara terintergrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.008.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.008.000,00	0,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Bangli Utara			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	729.764.070,00	771.350.882,44	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.309.380,00	420.706.679,48	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	258.600.000,00	298.165.222,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.562.500,00	55.562.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.700.000,00	21.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.950.000,00	58.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.900.000,00	22.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.525.000,00	6.525.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.622.500,00	214.622.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.925.000,00	23.925.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.625.000,00	133.625.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	93.100.000,00	93.100.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.420.000,00	91.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.950.000,00	12.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Susut I			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.033.946.621,00	911.810.768,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	470.223.522,00	579.415.534,55	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.500.000,00	150.500.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	60.000.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	24.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.125.000,00	14.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.225.000,00	38.225.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.400.000,00	207.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	15.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	24.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.100.000,00	121.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	99.160.000,00	99.160.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.340.000,00	67.340.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			
Indikator Keluaran	: Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.650.000,00	90.650.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Tersedianya sistem informasi Kesehatan secara terintergrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	15.100.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Susut II			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.01	Belanja Pegawai	978.810.327,00	903.993.603,17	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.569.645,00	449.997.712,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	188.226.320,00	312.726.320,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00	36.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.210.000,00	23.210.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.700.000,00	235.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.890.000,00	9.890.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.646.000,00	131.646.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	100.000.000,00	100.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.500.000,00	61.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	9.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.000.000,00	79.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Tersedianya sistem informasi Kesehatan secara terintergrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.354.000,00	9.354.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Tembuku I			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.013.890.838,00	856.784.061,79	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.799.000,00	561.081.280,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	201.708.762,00	361.567.606,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.960.000,00	32.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.550.000,00	17.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.853.000,00	202.853.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.954.000,00	35.954.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.700.000,00	104.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	89.660.377,00	89.660.377,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.339.623,00	72.339.623,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			

Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.463.000,00	84.463.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.620.000,00	46.620.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Tersedianya sistem informasi Kesehatan secara terintergrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Tembuku II			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.064.162.280,00	838.880.499,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.141.520,00	672.763.710,93	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	189.100.000,00	50.700.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			

Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	14.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.620.000,00	10.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.400.000,00	46.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	218.125.000,00	218.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000,00	36.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.255.000,00	45.255.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.075.000,00	100.075.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	84.775.000,00	84.775.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.225.000,00	82.225.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			

Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	25.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.400.000,00	62.400.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Tersedianya sistem informasi Kesehatan secara terintergrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.025.000,00	3.025.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Kintamani I			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.062.801.788,00	890.627.898,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.635.712,00	592.314.793,70	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.200.000,00	335.200.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.500.000,00	44.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.200.000,00	212.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	12.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.200.000,00	22.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.700.000,00	107.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	93.161.750,00	93.161.750,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.129.250,00	78.129.250,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.400.000,00	130.400.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Tersedianya sistem informasi Kesehatan secara terintergrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.159.000,00	20.159.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Kintamani II			

Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	628.704.000,00	823.396.509,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	279.136.000,00	301.562.852,59	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.01	Belanja Modal Tanah	50.000.000,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.000.000,00	269.523.603,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.990.000,00	72.990.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.160.000,00	29.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	15.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.300.000,00	38.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.850.000,00	233.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.250.000,00	47.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	9.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.450.000,00	125.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	104.171.000,00	104.171.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.309.000,00	59.309.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Tersedianya sistem informasi Kesehatan secara terintergrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	18.020.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.020.000,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			

Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Kintamani III			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	781.725.100,00	716.135.518,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.674.900,00	298.036.750,65	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.980.000,00	194.330.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			

Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	8.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	42.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.700.000,00	209.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.450.000,00	7.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.050.000,00	147.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	99.578.947,00	99.578.947,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.921.053,00	62.921.053,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	8.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.200.000,00	114.200.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Tersedianya sistem informasi Kesehatan secara terintergrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	12.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Kintamani IV			

Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	634.342.902,00	567.174.682,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	242.347.250,00	336.520.648,16	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.903.048,00	92.922.512,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	17.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.460.000,00	7.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.750.000,00	11.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	8.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.425.000,00	239.425.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	19.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.395.000,00	20.395.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.212.500,00	114.212.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	98.057.000,00	98.057.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.943.000,00	65.943.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	5.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.050.000,00	94.050.000,00	

Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Tersedianya sistem informasi Kesehatan secara terintergrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan			
Sub Kegiatan	: 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.287.500,00	6.287.500,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Kintamani V			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.058.673.300,00	857.580.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.515.200,00	528.879.269,62	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	389.267.000,00	389.267.000,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.620.000,00	96.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			
Indikator Keluaran	: Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.960.000,00	28.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.100.000,00	36.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	300.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.920.000,00	212.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.420.000,00	33.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.680.000,00	113.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	94.486.700,00	94.486.700,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.994.300,00	60.994.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
Indikator Keluaran	: Tersedianya sistem informasi Kesehatan secara terintergrasi			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	22.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	0,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Kintamani VI			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.01	Belanja Pegawai	886.323.660,00	721.819.420,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.526.950,00	422.130.683,78	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.755.490,00	381.755.490,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi			
Kegiatan	: 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.461.000,00	52.461.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.700.000,00	23.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.528.000,00	207.528.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	21.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.011.000,00	16.011.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.590.000,00	81.590.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	81.720.000,00	81.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.280.000,00	92.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.850.000,00	17.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.550.000,00	75.550.000,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan			
Kegiatan	: 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.210.000,00	42.210.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah			
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah			
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	46.733.453.000,00	47.135.954.899,00	
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya Pelayanan BLUD			
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	28.140.520.219,00	32.126.148.800,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.883.398.531,00	47.637.474.049,18	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	850.000.000,00	3.920.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	690.000.000,00	1.027.319.200,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.000.000,00	0,00	
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat			
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP			
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.03	Belanja Bunga	4.108.376.340,00	4.421.116.216,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.625.000.000,00	27.484.279.580,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	588.030.000,00	588.030.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.848.606.000,00	13.848.606.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	409.500.000,00	546.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.199.994.000,00	4.199.994.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.892.990.900,00	0,00	
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.337.968.500,00	12.187.968.500,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.880.000,00	7.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.832.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	84.080.000,00	81.360.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	365.014.800,00	294.795.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.076.000,00	38.076.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	3.720.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.680.000,00	17.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.399.000,00	49.399.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.062.400,00	14.242.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.541.200,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	17.190.000,00	17.190.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.418.021,00	436.859.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	14.730.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.120.000,00	83.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.640.000,00	31.640.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
Indikator Hasil	: Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik			
Kegiatan	: 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Dokumen Teknis Kegiatan			
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	17.450.000,00	17.450.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.550.000,00	267.853.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	150.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	198.696.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			

Indikator Hasil	: Persentase Penduduk berakses air minum			
Kegiatan	: 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum			
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	490.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	24.560.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.295.000.000,00	8.763.731.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	22.061.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
Indikator Hasil	: Persentase Kinerja Pengelolaan Persampahan			
Kegiatan	: 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tercapainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai			
Sub Kegiatan	: 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			
Indikator Keluaran	: Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			

Indikator Hasil	: Persentase Rumah tinggal bersanitasi layak			
Kegiatan	: 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tercapainya kebijakan strategis pengelolaan air limbah			
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	
Program	: 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
Indikator Hasil	: Persentase Jaringan Drainase Dalam Kondisi Baik			
Kegiatan	: 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota			
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan			
Indikator Keluaran	: Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
Indikator Hasil	: Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan			

Kegiatan	: 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
Indikator Keluaran	: Tertatanya Bangunan Gedung Di Wilayah Kabupaten Bangli			
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	332.000.000,00	412.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.356.500,00	308.734.900,00	
Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
Indikator Hasil	: Dokumen Penyusunan Perencanaan Penataan Kota			

Kegiatan	: 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	14.050.000,00	12.690.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	890.723.700,00	1.241.451.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.929.815.600,00	23.744.720.835,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
Indikator Hasil	: Prosentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik			
Kegiatan	: 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direkonstruksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	14.730.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.000.000,00	416.160.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.099.922.630,00	37.536.169.920,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Jembatan yang Dibangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan			
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	22.630.000,00	22.630.000,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.023.270.000,00	4.763.640.000,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
Indikator Hasil	: Persentase Tenaga Terampil Konstruksi			
Kegiatan	: 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Tenaga yang Terampil			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Tenaga yang Terampil			
Sub Kegiatan	: 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
Indikator Hasil	: Prosentase Ruang Publik Umum yang Nyaman dan Aman			
Kegiatan	: 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	11.130.000,00	9.090.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.300.000,00	120.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.02.0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.200.000,00	61.200.000,00	
Kegiatan	: 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK			
Indikator Keluaran	: Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.900.000,00	59.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.2.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal			
Indikator Keluaran	: Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya perumahan layak huni yang di bangun			
Kegiatan	: 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Korban Bencana yang Terlayani			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	175.000.000,00	
Kegiatan	: 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
Sub Kegiatan	: 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			

Indikator Hasil	: Meningkatnya kawasan permukiman yang tertangani			
Kegiatan	: 1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyusunan dan/ atau Review Serta Terlegalisasinya Rencana dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Pernukiman Kumuh			
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Rumah Layak Huni			
Sub Kegiatan	: 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.690.000,00	12.690.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.760.620.000,00	4.051.070.000,00	
Program	: 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
Indikator Hasil	: Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota			
Kegiatan	: 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			
Sub Kegiatan	: 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
Indikator Hasil	: Tertatanya perumahan yang disediakan prasarana,sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian			
Kegiatan	: 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			
Sub Kegiatan	: 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	735.707.000,00	2.250.844.000,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja			
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	71.280.000,00	63.120.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.645.000,00	3.645.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.460.000,00	2.460.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	11.146.818.000,00	10.265.018.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	1.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.668.500,00	3.668.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	480.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.286.300,00	51.241.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	2.880.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.563.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	4.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.851.500,00	12.721.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.693.500,00	168.428.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.940.000,00	12.940.000,00	
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Prosentase Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			
Kegiatan	: 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.457.200,00	11.457.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	251.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.153.540.000,00	1.812.922.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.588.000,00	17.088.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.378.300,00	156.220.300,00	
Kegiatan	: 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Karir PPNS			
Sub Kegiatan	: 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	920.000,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.09.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran			
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.09.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran			
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.527.341.000,00	6.407.341.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.580.000,00	1.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.621.600,00	1.621.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.460.200,00	63.460.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	29.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	37.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	62.760.000,00	54.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.900.000,00	22.450.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.703.400,00	279.045.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.600.000,00	14.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana			
Kegiatan	: 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga/Desa Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penanggulangan Bencana Yang Tertangani			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.390.000,00	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.300.000,00	503.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.300.000,00	0,00	
Kegiatan	: 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata			
Sub Kegiatan	: 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	30.240.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	30.240.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.450.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	0,00	
Program	: 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
Indikator Hasil	: Tingkat Penyelesaian Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
Kegiatan	: 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.900.000,00	265.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.984.800,00	22.984.800,00	
Kegiatan	: 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemerdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			
Sub Kegiatan	: 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.02.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.02.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.507.321.000,00	4.557.321.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Kegiatan	: 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: tersedianya administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.264.000,00	3.264.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.177.500,00	7.177.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	54.480.000,00	52.440.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.019.000,00	206.835.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.386.900,00	17.426.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.420.000,00	6.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.584.000,00	1.384.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.600.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: tersedianya jasa peninjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.060.000,00	7.060.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.300.000,00	36.300.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.213.650,00	196.284.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.870.000,00	22.870.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Presentase Masyarakat Miskin yang diberdayakan			
Kegiatan	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Presentase masyarakat miskin dan psks yang diberdayakan			
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.020.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.337.500,00	87.430.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.020.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.512.500,00	138.054.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.550.000,00	73.550.000,00	
Program	: 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
Indikator Hasil	: Presentase Warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke desa/kelurahan asal			
Kegiatan	: 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			
Indikator Keluaran	: Presentase warga negara migran korban kekerasan yang dipulangkan			
Sub Kegiatan	: 1.06.03.2.01.0001 Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan dan Rehabilitas Sosial Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan Pengemis di luar panti sosial			
Kegiatan	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
Indikator Keluaran	: Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan Pengemis di luar panti sosial			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	5.050.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	6.410.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	721.273.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.063.000,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	100.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar gelandangan serta pengemis di luar panti sosial yang terlayani dan direhabilitasi sosial			
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.074.200,00	8.074.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.218.700,00	21.681.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
Indikator Hasil	: Pesentase Masyarakat yang mendapat perlindungan dan Jaminan Sosial presentase pengelolaan data fakir miskin			
Kegiatan	: 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Masyarakat yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial presentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang ditangani			
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	56.771.200,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.652.200,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.2.02.0003 Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	150.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
Indikator Hasil	: Persentase Korban Bencana yang tertangani presentase meningkatnya penanganan kepada korban bencana alam dan bencana sosial			
Kegiatan	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Korban Bencana yang ditangani presentase penanganan bagi korban bencana alam dan bencana sosial			
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: presentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana			
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.380.000,00	2.020.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.951.400,00	22.142.400,00	
Program	: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
Indikator Hasil	: meningkatnya presentase pengelolaan taman makam pahlawan			
Kegiatan	: 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: presentase pengelolaan taman makam pahlawan			
Sub Kegiatan	: 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
Organisasi	: 2.17.2.07.0.00.06.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja			
Unit Organisasi	: 2.17.2.07.0.00.06.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja			
Program	: 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: prosentase informasi ketenagakerjaan			
Kegiatan	: 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
Indikator Keluaran	: Prosentase informasi ketenagakerjaan			
Sub Kegiatan	: 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: prosentase jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi			
Kegiatan	: 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
Indikator Keluaran	: prosentase peningkatan kompetensi calon tenaga kerja			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi			
Indikator Keluaran	: Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
Indikator Keluaran	: prosentase terbinanya lembaga latihan kerja			
Sub Kegiatan	: 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.970.000,00	39.890.200,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
Indikator Hasil	: prosentase jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan			
Kegiatan	: 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase pelayanan antar kerja			

Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
Indikator Keluaran	: prosentase meningkatnya pengelolaan informasi pasar kerja			
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase pekerja migran yang dilatih			
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			
Indikator Keluaran	: Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
Indikator Hasil	: prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek			
Kegiatan	: 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: prosentase perusahaan yang didata dan diberi sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan			
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.230.000,00	18.535.000,00	
Kegiatan	: 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: prosentase penyelesaian perselisihan perusahaan			
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perselisihan yang Dicegah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah LKS Tripartit yang Dibina			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.02.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.02.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: meningkatnya presentase tenaga kerja perempuan di eksekutif,legislatif dan swasta			
Kegiatan	: 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: presentase tenaga kerja perempuan di eksekutif,legislatif dan swasta			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.710.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	3.030.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.760.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	86.580.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: presentase partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: meningkatnya kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan			
Sub Kegiatan	: 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.710.000,00	3.030.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.430.000,00	5.380.000,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
Indikator Hasil	: meningkatnya presentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu			
Kegiatan	: 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.410.000,00	1.410.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.473.000,00	42.473.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: presentase perempuan korban tindak kekerasan yang mendapat layanan pengaduan masyarakat			
Sub Kegiatan	: 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.230.000,00	4.230.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.314.000,00	99.314.000,00	
Program	: 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
Indikator Hasil	: presentase meningkatnya peran keluarga dalam peningkatan kualitas anak			
Kegiatan	: 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: meningkatnya peran keluarga dalam pemenuhan kualitas anak			
Sub Kegiatan	: 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			

Indikator Hasil	: presentase tersedianya data informasi gender dan anak			
Kegiatan	: 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: presentase tersedianya dokumen informasi gender dan anak di kabupaten bangli			
Sub Kegiatan	: 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
Indikator Hasil	: presentase terwujudnya kabupaten layak anak			
Kegiatan	: 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: presentase terwujudnya kabupaten layak anak			
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.700.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	2.020.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.050.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	43.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	2.020.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.980.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.215.000,00	
Kegiatan	: 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: presentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang di beri peningkatan kualitas			

Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
Indikator Hasil	: Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu cakupan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak dilingkup daerah/kota			
Kegiatan	: 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: presentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah/kota			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.410.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	1.410.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	59.027.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.027.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: presentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah/kota			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK			
Indikator Keluaran	: Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.230.000,00	4.230.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.166.000,00	136.166.000,00	
Kegiatan	: 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: -			
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.820.000,00	2.820.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.020.000,00	69.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah KIE Perlindungan khusus anak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.2.03.0008 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
Organisasi	: 3.27.3.25.2.09.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan			
Unit Organisasi	: 3.27.3.25.2.09.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan			

Program	: 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
Indikator Hasil	: Prosentase infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang diadakan			
Kegiatan	: 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Pesentase infrastruktur dan seluruh kemandirian pangan yang diadakan			
Sub Kegiatan	: 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase tingkat diversifikasi pangan masyarakat			
Kegiatan	: 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
Indikator Keluaran	: Persentase harga pangan pokok terpantau			
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			
Indikator Keluaran	: Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.230.000,00	4.230.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.178.000,00	34.168.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.820.000,00	2.820.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.554.000,00	26.675.000,00	

Kegiatan	: 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
Indikator Keluaran	: Persentase laporan pola konsumsi dan suplai pangan tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			
Indikator Keluaran	: Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.820.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	2.820.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.914.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	23.024.000,00	
Program	: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
Indikator Hasil	: Persentase kasus kerawanan pangan menurun			
Kegiatan	: 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Persentase laporan ketahanan pangan tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			
Indikator Keluaran	: Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	2.820.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.820.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	21.500.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.930.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase karawanan pangan kabupaten terpantau			
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	24.979.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			
Indikator Hasil	: persentase skor pola pangan harapan			
Kegiatan	: 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: informasi pemantauan mutu dan keamanan pangan tersedia			
Sub Kegiatan	: 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.820.000,00	2.820.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.664.000,00	23.060.700,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup			
Unit Organisasi	: 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup			
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	1.620.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			

Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	26.624.418.000,00	26.349.358.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	738.000,00	738.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.960.000,00	5.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.398.800,00	20.398.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	66.600.000,00	58.440.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.898.400,00	200.298.400,00	

Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.165.000,00	18.165.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.940.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	19.920.000,00	19.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.727.500,00	29.727.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.050.000,00	21.300.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.439.000,00	217.813.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.920.000,00	16.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup			
Kegiatan	: 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen RPPLH yang Tersusun			
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000,00	0,00	

Kegiatan	: 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen KLHS yang Tersusun			
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	98.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
Kegiatan	: 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengendalian Tingkat Pencemaran Lingkungan			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.010.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.952.800,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	46.452.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.400.000.000,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	1.400.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.010.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.918.800,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.918.800,00	
Kegiatan	: 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen IKLH yang Tersusun			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
Sub Kegiatan	: 2.11.03.2.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota			
Indikator Keluaran	: jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.502.000,00	126.362.400,00	
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Indikator Hasil	: Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			
Kegiatan	: 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan RTH			
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0003 Pengelolaan Kebun Raya			
Indikator Keluaran	: Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			
Indikator Keluaran	: Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.085.436.400,00	1.294.236.400,00	
Program	: 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
Indikator Hasil	: Persentase Perijinan dan Pengawasan dalam Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)			
Kegiatan	: 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3			
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha penghasil limbah B3 yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan			
Sub Kegiatan	: 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.086.000,00	17.086.000,00	
Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
Indikator Hasil	: Jumlah Usaha/Kegiatan yang Memiliki Ijin Lingkungan dan PPLH			
Kegiatan	: 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Usaha/Kegiatan Yang Sudah Memiliki Ijin Lingkungan			
Sub Kegiatan	: 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.840.000,00	4.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.300.000,00	66.300.000,00	
Program	: 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
Indikator Hasil	: Persentase Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal			
Kegiatan	: 2.11.07.2.02 Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			
Indikator Keluaran	: Terbinanya Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bangli			
Sub Kegiatan	: 2.11.07.2.02.0001 Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			
Kegiatan	: 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Mengikuti Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup			
Sub Kegiatan	: 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
Indikator Hasil	: Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			
Kegiatan	: 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.140.400,00	58.379.400,00	
Program	: 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
Indikator Hasil	: Persentase Pananganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
Kegiatan	: 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Terkelolanya Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH			
Sub Kegiatan	: 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	22.000.000,00	
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase jumlah sampah yang tertangani			
Kegiatan	: 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Sampah			
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.305.800,00	72.305.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.053.988.000,00	1.680.988.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			
Indikator Keluaran	: jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	15.120.000,00	15.120.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.931.810.650,00	5.130.489.150,00	
5.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Unit Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			

Program	: 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	4.880.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.807.974.000,00	4.937.974.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Diadministrasikan			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.599.000,00	6.599.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.491.900,00	5.491.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.460.000,00	8.460.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.371.750,00	53.221.750,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	867.200,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.065.000,00	6.065.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.120.000,00	8.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.720.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.410.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.433.150,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	48.040.000,00	39.880.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.881.000,00	188.181.000,00	
Kegiatan	: 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.144.000,00	88.371.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.760.000,00	16.760.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
Indikator Hasil	: Prosentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk			
Kegiatan	: 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk			

Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk yang didaftar			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.695.000,00	6.697.500,00	
Kegiatan	: 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penataan Pendaftaran Penduduk			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.460.000,00	8.460.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.050.000,00	377.400.000,00	
Kegiatan	: 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.760.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.572.000,00	50.461.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	800.000.000,00	

Kegiatan	: 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.04.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.232.000,00	5.966.000,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
Indikator Hasil	: Prosentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil			
Kegiatan	: 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencatatan Sipil yang dilayani			
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.460.000,00	8.460.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.150.000,00	81.150.000,00	
Kegiatan	: 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.139.000,00	7.609.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.208.000,00	150.499.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
Indikator Hasil	: Persentase Meningkatnya Data Kependudukan Yang Akurat			
Kegiatan	: 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	12.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.032.000,00	702.000,00	
Kegiatan	: 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.240.000,00	16.245.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	7.260.000,00	7.260.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.940.000,00	127.850.000,00	
Kegiatan	: 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Sub Kegiatan	: 2.12.04.2.04.0001 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	4.845.000,00	
Program	: 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
Indikator Hasil	: Prosentase Meningkatnya kualitas Penyusunan Profil Kependudukan			
Kegiatan	: 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Profil Kependudukan Yang Disusun			
Sub Kegiatan	: 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Organisasi	: 2.13.2.14.0.00.09.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Unit Organisasi	: 2.13.2.14.0.00.09.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.001.826.000,00	4.690.251.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.012.000,00	4.012.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	29.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	62.760.000,00	54.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.593.350,00	167.593.350,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.333.500,00	21.336.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.940.000,00	8.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.838.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.346.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	6.000.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.850.600,00	241.208.950,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	21.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA			
Indikator Hasil	: Prosentase desa yang melakukan penataan desa			
Kegiatan	: 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa			

Indikator Keluaran	: Tertatanya desa yang baik			
Sub Kegiatan	: 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	218.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.02.2.01.0006 Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.680.000,00	2.680.000,00	
Program	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
Indikator Hasil	: Prosentase desa dalam meningkatkan kerjasama desa			
Kegiatan	: 2.13.03.2.01 Fasilitas Kerja Sama antar Desa			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan fasilitas kerjasama antar desa			
Sub Kegiatan	: 2.13.03.2.01.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Prosentase administrasi pemerintahan desa yang baik			
Kegiatan	: 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Tertatanya administrasi pemerintahan desa yang baik			
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0003 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.460.000,00	8.460.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.635.000,00	95.570.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0004 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.858.000,00	952.458.716,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.138.500,00	16.886.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.718.500,00	40.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.255.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0013 Fasilitas Pengelolaan Aset Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.460.000,00	8.460.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.157.000,00	16.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.840.000,00	8.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0015 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0016 Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.2.01.0018 Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	2.332.500,00	

Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
Indikator Hasil	: Prosentase lembaga kemasyarakatan dalam menunjang pemberdayaan masyarakat			
Kegiatan	: 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya lembaga Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	245.266.000,00	434.765.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.982.000,00	34.988.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.910.000,00	25.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.020.900.000,00	1.949.059.500,00	
5.1.05	Belanja Hibah	125.000.000,00	125.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
Program	: 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
Indikator Hasil	: Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani (unmeet need)			
Kegiatan	: 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
Indikator Keluaran	: Tercapainya Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0007 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0017 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tercapainya Jumlah Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0002 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0010 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	392.850.000,00	523.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	114.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.100.000,00	111.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
Indikator Hasil	: Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) bagi pasangan usia subur			
Kegiatan	: 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
Indikator Keluaran	: Tercapainya Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	140.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.800.000,00	148.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.400.000,00	91.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			

Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
Indikator Keluaran	: Tercapainya Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.000.000,00	216.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Kegiatan	: 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tercapainya Jumlah Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.100.000,00	53.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.786.000,00	225.786.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0007 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.650.000,00	35.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria			
Indikator Keluaran	: Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.03.0016 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			

Indikator Keluaran	: Tercapainya Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0001 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.500.000,00	238.500.000,00	
Program	: 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaa Pembinaan terhadap seluruh Poktan			
Kegiatan	: 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Tercapainya Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
Indikator Keluaran	: Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0020 Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.253.700.000,00	1.253.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Indikator Keluaran	: Tercapainya Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga			
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0003 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan			
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan			
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			

Indikator Hasil	: Persentase Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.603.329.000,00	4.603.329.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.506.500,00	1.506.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.291.200,00	8.291.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.291.100,00	197.591.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.800.000,00	105.130.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.220.000,00	5.220.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.240.000,00	152.520.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.860.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.300.000,00	50.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	64.920.000,00	56.760.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.150.000,00	74.100.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	3.220.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	199.615.300,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.814.600,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	22.840.000,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.840.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
Kegiatan	: 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	23.040.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	23.640.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.588.678.100,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.481.569.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	108.817.200,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.816.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	17.400.000,00	16.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.546.500,00	227.296.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.280.000,00	31.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	21.000.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terselenggaranya Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang aman dan tertib			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	760.671.600,00	680.360.600,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Lomba WTN			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalin			
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalin yang terawasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.942.000,00	30.042.500,00	
Kegiatan	: 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	12.120.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.090.000,00	52.145.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pengelolaan Pelayaran			
Kegiatan	: 2.15.03.2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha			
Indikator Keluaran	: terciptanya Keamanan Penyeberangan Danau Batur			
Sub Kegiatan	: 2.15.03.2.05.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.491.500,00	32.852.400,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.212.433.658,00	4.117.661.758,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	1.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.294.800,00	1.307.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.222.750,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.150.200,00	34.150.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.420.000,00	1.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	99.930.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	5.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.524.000,00	91.524.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	61.920.000,00	53.760.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	12.000.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.694.500,00	45.879.150,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	9.990.000,00	
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
Indikator Hasil	: Prosentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media Massa			
Kegiatan	: 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase Informasi dan Komunikasi Publik yang Tersampaikan			
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	739.867.700,00	1.014.392.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.571.300,00	36.481.850,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	864.071.000,00	966.725.500,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
Indikator Hasil	: Prosentase layanan SPBE yang di bangun			
Kegiatan	: 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Domaimn dan Sub Domain yang dikelola			
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.263.700.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.263.700.000,00	
Kegiatan	: 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen E-Gov yang terselesaikan			
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	610.100.000,00	610.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.295.250,00	1.295.250,00	

Sub Kegiatan	: 2.16.03.2.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	15.280.000,00	22.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.550.000,00	190.800.000,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
Organisasi	: 2.17.2.07.0.00.06.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja			
Unit Organisasi	: 2.17.2.07.0.00.06.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja			
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: tersediannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: tersediannya administrasi keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.071.774.000,00	5.091.774.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: tersediannya administrasi kepegawaian perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: tersedianya administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.152.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.152.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.664.200,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.664.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	38.760.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	34.680.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.176.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	154.776.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.982.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	58.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: tersediannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.535.000,00	123.385.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.100.000,00	91.250.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: terpeliharanya barang milik daerah urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.640.900,00	67.046.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.970.000,00	8.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
Indikator Hasil	: prosentase koperasi yang difasilitasi IUSP dan Ijin operasional			
Kegiatan	: 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: prosentase koperasi yang difasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam			
Sub Kegiatan	: 2.17.02.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Kegiatan	: 2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: prosentase koperasi yang difasilitasi penerbitan ijin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam			
Sub Kegiatan	: 2.17.02.2.02.0001 Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
Indikator Hasil	: prosentase koperasi aktif			
Kegiatan	: 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: prosentase koperasi yang diperiksa dan diawasi			
Sub Kegiatan	: 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.822.200,00	66.010.700,00	
Program	: 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
Indikator Hasil	: prosentase koperasi yang sehat dan berkualitas			
Kegiatan	: 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: prosentase koperasi yang dinilai			
Sub Kegiatan	: 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
Indikator Hasil	: prosentase peningkatan profesionalisme pengelola koperasi			
Kegiatan	: 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: prosentase profesionalisme pengelola koperasi yang dilatih			

Sub Kegiatan	: 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.938.000,00	261.938.000,00	
Program	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
Indikator Hasil	: prosentase struktur permodalan dan usaha koperasi			
Kegiatan	: 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: prosentase koperasi yang difasilitasi			
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.820.000,00	2.820.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.607.700,00	36.878.000,00	
Program	: 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
Indikator Hasil	: prosentase wirausaha baru			
Kegiatan	: 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
Indikator Keluaran	: prosentase wirausaha baru			
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0003 Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0012 Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.230.000,00	4.230.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.320.000,00	98.519.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			

Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	575.997.320,00	575.997.320,00	
Program	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
Indikator Hasil	: prosentase pelaku usaha kecil yang berdaya saing			
Kegiatan	: 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
Indikator Keluaran	: prosentase pelaku usaha kecil yang berdaya saing			
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: 0			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	321.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	37.975.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.08.2.01.0005 Fasilitas Inkubator Usaha Mikro			
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.721.304.000,00	5.761.304.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	746.000,00	746.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.947.700,00	1.947.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.556.300,00	151.456.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.532.400,00	5.732.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	682.500,00	682.500,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.190.000,00	19.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.520.000,00	2.520.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.300.000,00	35.250.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.271.352.450,00	8.271.352.450,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.750.000,00	151.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	66.480.000,00	58.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.650.000,00	74.250.000,00	
Kegiatan	: 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.459.400,00	66.131.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.560.000,00	8.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			

Indikator Hasil	: Jumlah Nilai Investasi			
Kegiatan	: 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.180.000,00	5.210.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.780.000,00	3.780.000,00	
Kegiatan	: 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang disusun.			
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.255.700,00	57.845.700,00	
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Jumlah Investor (PMA/PMDN)			
Kegiatan	: 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan			
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.436.000,00	58.876.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
Kegiatan	: 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan			
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.050.000,00	111.740.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.480.000,00	23.705.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.434.000,00	87.814.000,00	
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Persentase perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)			
Kegiatan	: 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)			
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.165.000,00	95.165.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	348.941.000,00	348.941.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.330.000,00	223.330.000,00	
Program	: 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik			
Kegiatan	: 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.540.000,00	26.640.000,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga			
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Partisipasi Kepemudaan			
Kegiatan	: 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya pengembangan kepeloporan pemuda untuk mendorong kreatifitas, inovasi, terobosan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional			
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0005 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya suatu sistem yang memiliki berbagai komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi antara komponen satu dengan komponen yang lain untuk menciptakan suatu output			
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Kader yang Terasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.300.000,00	47.875.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya prosentase perolehan medali pada event tingkat provinsi, nasional dan Internasional			
Kegiatan	: 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Terbentuknya Pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan , kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	880.000.000,00	880.000.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Memasyarakatkan Olahraga, menjangkit bibit atlet potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan prestasi olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan kesehatan nasional.			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	39.840.000,00	39.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	675.460.000,00	932.990.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Olahraga Prestasi melalui Pembinaan dan Pengembangan Olahraga secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	1.500.000.000,00	500.000.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			
Indikator Keluaran	: Terwujudnya proses untuk mencapai Prestasi puncak melalui Pembinaan Organisasi atau Club Olahraga yang dilaksanakan secara Efisien, sistimatik dan Berkelanjutan			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.04.0004 Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			
Indikator Keluaran	: Meningkatkan Kesehatan, Kebugaran, Rekreasi dan Kesenangan Masyarakat melalui Olahraga			
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.555.000,00	551.555.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.623.445.000,00	29.723.445.000,00	
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pembinaan Kepramukaan			
Kegiatan	: 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			
Indikator Keluaran	: Mewujudkan Generasi yang tangguh, Berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air yang ditujukan pada setiap kegiatan			
Sub Kegiatan	: 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			
Unit Organisasi	: 2.16.2.21.2.20.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
Indikator Hasil	: Tersedianya Data Statistik Sektoral			

Kegiatan	: 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Data tentang Kabupaten Bangli			
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	19.664.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral			
Indikator Keluaran	: Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
Indikator Hasil	: Prosentase Keamanan SPBE			
Kegiatan	: 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Rasio Dokumen nPersandian terhadap kebutuhan			
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.408.500,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	31.012.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	0,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.750.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	33.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.610.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.610.000,00	
Kegiatan	: 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.900.000,00	0,00	
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
Indikator Hasil	: persentase peningkatan desa adat serta subak dan subak abian yang dikelola dengan nilai-nilai sad kerthi			
Kegiatan	: 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah pengelolaan objek /unsur kebudayaan			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	36.000.000,00	29.880.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.675.000,00	425.501.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	230.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah jenis kesenian yang terdata			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah lembaga adat yang ditingkatkan kapasitasnya			
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.503.000,00	305.106.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	61.502.690.000,00	37.469.342.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.672.000,00	88.247.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
Indikator Hasil	: jumlah penyelenggaraan presentasi seni dan budaya			
Kegiatan	: 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah pengembangan seni budaya daerah			
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	23.400.000,00	19.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.741.450.000,00	1.741.500.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	8.075.000.000,00	3.670.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	
Program	: 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
Indikator Hasil	: jumlah simpul-simpul sejarah yang dilindungi/dikembangkan/dimanfaatkan/dibina			
Kegiatan	: 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah pembinaan sejarah			
Sub Kegiatan	: 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
Indikator Hasil	: prosentase cagar budaya yang ditetapkan sebagai warisan budaya bali			
Kegiatan	: 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah cagar budaya yang ditetapkan			
Sub Kegiatan	: 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	39.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0003 Asisten Administrasi Umum			
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
Indikator Hasil	: Cakupan Peningkatan Kualitas Pembinaan Perpustakaan			
Kegiatan	: 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan yang dikelola			
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	2.973.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.640.000,00	6.385.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	3.525.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka			
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			

Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.000,00	528.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi dan lomba			
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.040.000,00	108.740.000,00	
Program	: 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
Indikator Hasil	: PERSENTASE PENINGKATAN PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
Kegiatan	: 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.01.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.03.2.01.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.055.000,00	6.392.500,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
Indikator Hasil	: Persentase Instansi Pemerintah yang pengelolaan kearsipannya mengacu pada peraturan perundang-undangan			
Kegiatan	: 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah Perangkat Daerah yang Arsip Dinamis diawasi dan dikelola			
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.149.000,00	2.149.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.735.000,00	1.735.000,00	
Kegiatan	: 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Arsip Statis Yang Dikelola Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	996.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	996.000,00	0,00	

Kegiatan	: 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah Informasi Simpul Jaringan Nasional Yang Dilestarikan dan Unit Kearsipan Yang Dibina dan Dilberdayakan			
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	747.000,00	747.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.535.000,00	2.535.000,00	
Program	: 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
Indikator Hasil	: Cakupan Dokumen/arsip daerah yang dilestarikan			
Kegiatan	: 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			
Indikator Keluaran	: jumlah Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang			
Sub Kegiatan	: 2.24.03.2.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Organisasi	: 3.27.3.25.2.09.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan			
Unit Organisasi	: 3.27.3.25.2.09.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan			
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
Indikator Hasil	: Persentase konsumsi ikan masyarakat meningkat			
Kegiatan	: 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase prasarana usaha perikanan tangkap tersedia			
Sub Kegiatan	: 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			

Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
Indikator Hasil	: Persentase Konsumsi Ikan Masyarakat Meningkat			
Kegiatan	: 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			
Indikator Keluaran	: Produktifitas Perikanan Budidaya			
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	293.649.800,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.299.800,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	111.529.800,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.179.800,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.2.04.0006 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			
Indikator Keluaran	: Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	654.164.800,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.464.800,00	0,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
Indikator Hasil	: Indeks Konsumsi Ikan			
Kegiatan	: 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			
Indikator Keluaran	: Produktifitas perikanan budidaya			
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			
Indikator Keluaran	: Terfasilitasnya promosi produk unggulan daerah			
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.017.800,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	26.017.800,00	
Kegiatan	: 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			

Indikator Keluaran	: persentase pengetahuan dan kesehatan masyarakat meningkat			
Sub Kegiatan	: 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	22.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.415.800,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	276.302.800,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
Unit Organisasi	: 3.26.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.982.000,00	2.882.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.729.867.000,00	5.579.867.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.292.000,00	1.292.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.310.000,00	2.310.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.549.500,00	4.549.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.080.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	463.170.500,00	531.420.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.684.500,00	31.574.625,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	250.000.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.200.000,00	47.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	86.040.000,00	86.040.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.235.500,00	118.871.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.100.000,00	23.280.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.004.000,00	126.058.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.420.000,00	12.420.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
Indikator Hasil	: persentase pengembangan destinasi pariwisata			
Kegiatan	: 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: prosentase daya tarik wisata sesuai dengan tahapan pengembangan rintisan berkembang,pemantapan,revitalisasi			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.471.772.000,00	22.846.190.667,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: jumlah prosentase pengadaan /pemeliharaan /rehabilitasi/sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	43.200.000,00	35.040.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.228.000,00	168.527.999,72	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.637.000,00	300.637.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.090.500.000,00	1.440.498.870,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.975.000.000,00	3.975.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase industri pariwisata yang memiliki sertifikat standar sertifikasi			
Sub Kegiatan	: 3.26.02.2.04.0011 Kesiadaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
Indikator Hasil	: IKM Kepariwisataan			
Kegiatan	: 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: persentase penyelenggaraan pemasaran dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota			
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	6.060.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	8.100.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	108.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.200.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	6.060.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	8.100.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	123.652.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.002.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	23.000.000,00	
Program	: 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
Indikator Hasil	: Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif			
Kegiatan	: 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif			
Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.02.0009 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan SDM Pariwisata			
Kegiatan	: 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
Indikator Keluaran	: persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar			
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.175.744.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI			

Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	706.046.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	469.697.600,00	
Kegiatan	: 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: prosentase pelaksanaan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif			
Sub Kegiatan	: 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
Organisasi	: 3.27.3.25.2.09.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan			
Unit Organisasi	: 3.27.3.25.2.09.01.0000 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan			
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.189.000,00	8.494.500,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	26.059.243.500,00	25.780.760.500,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.456.000,00	10.456.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	14.960.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.743.000,00	12.743.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	16.720.000,00	16.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.000.000,00	254.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.500.000,00	5.500.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.289.000,00	10.289.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	5.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.660.000,00	5.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.449.000,00	164.199.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.01	Belanja Pegawai	36.520.000,00	36.520.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.924.000,00	175.044.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.520.000,00	27.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase sarana pertanian dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.840.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	4.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.766.500,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	168.395.335,00	
5.1.05	Belanja Hibah	320.000.000,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	320.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.01	Belanja Pegawai	1.010.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	1.010.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.288.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	41.272.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.02.0005 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan			
Indikator Keluaran	: Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.460.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	8.460.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.140.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	132.905.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			
Indikator Keluaran	: Persentase bibit ternak yang diadakan			
Sub Kegiatan	: 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			
Indikator Keluaran	: Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik			
Kegiatan	: 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Persentase perencanaan pembangunan prasarana pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	100.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian			
Indikator Keluaran	: Persentase pembangunan prasarana pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			
Indikator Keluaran	: Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	9.660.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	9.660.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.342.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	575.017.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	765.000.000,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	40.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit			
Indikator Keluaran	: Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.970.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	40.000.000,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	40.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	36.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.000.000,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	64.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			

Indikator Keluaran	: Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
Indikator Hasil	: Persentase kasus penyakit ternak menurun			
Kegiatan	: 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase Coverage Vaksinasi Rabies			
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular			
Indikator Keluaran	: Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.460.000,00	8.460.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.240.000,00	297.145.000,00	
Kegiatan	: 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner terkelola			
Sub Kegiatan	: 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	54.187.800,00	
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase kelompok yang dibina dalam pengendalian OPT			
Kegiatan	: 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok yang dibina			
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	7.260.000,00	7.260.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.490.000,00	30.844.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.05.2.01.0004 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis			
Indikator Keluaran	: Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
Indikator Hasil	: Persentase penyelenggaraan penyuluh pertanian			
Kegiatan	: 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
Indikator Keluaran	: Persentase penyelenggaraan penyuluh pertanian			
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.630.000,00	3.630.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.600.000,00	157.683.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.630.000,00	3.630.000,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.170.000,00	127.791.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah			
Kegiatan	: 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen Penyusunan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	26.520.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	26.520.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	849.600,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	849.600,00	0,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	567.251.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.631.000,00	0,00	
Program	: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan			
Kegiatan	: 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			
Indikator Keluaran	: Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.05.0001 Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C			
Indikator Keluaran	: Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2			
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.06.0002 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Sarana dan prasarana Distribusi Perdagangan			
Kegiatan	: 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	19.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	200.590.100,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	65.755.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	3.685.600.000,00	
Kegiatan	: 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	727.800.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.445.570.700,00	
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
Indikator Hasil	: Persentase Pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting			
Kegiatan	: 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			

Indikator Keluaran	: Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	13.732.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.952.000,00	0,00	
Program	: 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Nilai Ekspor			
Kegiatan	: 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang			
Sub Kegiatan	: 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			
Kegiatan	: 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.120.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	12.120.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.710.800,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	16.504.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pemasaran Produk Dalam Negeri			
Kegiatan	: 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah			
Kegiatan	: 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	4.896.168.525,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	4.996.168.525,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	47.606.700,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.356.700,00	0,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.097.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.097.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.458.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.458.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	57.720.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	65.880.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	238.768.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.368.500,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	63.470.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.970.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.620.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.665.000,00	0,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	146.811.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	146.631.000,00	0,00	
Kegiatan	: 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Cakupan Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	73.337.700,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.865.400,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.040.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.040.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya			
Kegiatan	: 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.306.141.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.306.141.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	30.240.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	30.240.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	315.000.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	363.021.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	750.000.000,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	750.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.595.000.000,00	0,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	4.595.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.106.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	77.106.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	85.000.000,00	0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	85.000.000,00	
Program	: 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pengendalian Ijin Usaha Industri			
Kegiatan	: 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS			
Sub Kegiatan	: 3.31.03.2.01.0004 Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
Indikator Hasil	: Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			
Kegiatan	: 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
Sub Kegiatan	: 3.31.04.2.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0001 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat			
Program	: 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			

Indikator Hasil	: -			
Kegiatan	: 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Prosentase Calon Transmigrasi Yang Difasilitasi			
Sub Kegiatan	: 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.102.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.505.000,00	0,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH			
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	24.407.957.800,00	23.593.957.800,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.670.000.000,00	8.665.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	824.620.000,00	993.620.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.400.000,00	446.399.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	617.691.500,00	352.777.600,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahn ketentuan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	825.480.000,00	825.480.000,00	

Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0001 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat			
Program	: 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Indikator Hasil	: Persentase penyelesaian administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			
Kegiatan	: 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	727.612.200,00	671.919.700,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.469.000,00	8.469.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.01.0003 Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.766.300,00	50.761.800,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.01	Belanja Pegawai	43.200.000,00	35.040.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.203.087.900,00	16.012.814.800,00	
5.1.05	Belanja Hibah	9.070.000.000,00	28.334.745.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.602.000,00	16.427.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.312.000,00	65.012.000,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Fasilitas dan Koordinasi Hukum			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.556.000,00	127.741.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	634.608.300,00	519.797.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			

Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	31.080.000,00	22.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.620.700,00	203.147.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.842.000,00	0,00	
Kegiatan	: 4.01.02.2.04 Fasilitas Kerja Sama Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Fasilitas Kerja Sama Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.983.200,00	20.148.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.029.000,00	0,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0002 Asisten Perekonomian dan Pembangunan			
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
Indikator Hasil	: Cakupan pelayanan fasilitas administrasi perekonomian dan pembangunan			
Kegiatan	: 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.590.300,00	5.927.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.500.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.519.500,00	218.412.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.660.000,00	14.143.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.923.700,00	7.008.500,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.768.000,00	44.768.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.620.000,00	81.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	25.080.000,00	16.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.310.000,00	45.510.000,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.126.100,00	79.442.700,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.687.500,00	52.687.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.186.400,00	14.186.400,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	25.080.000,00	16.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.073.000,00	46.300.000,00	
Kegiatan	: 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			
Sub Kegiatan	: 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.136.500,00	6.114.900,00	

Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah			
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0003 Asisten Administrasi Umum			
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	234.480.000,00	234.480.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.857.500,00	9.857.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.097.200,00	156.097.200,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	397.232.000,00	659.325.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.238.766.700,00	1.697.236.700,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.794.000,00	122.544.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000.000,00	1.201.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.050.000,00	789.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	773.500.000,00	1.034.600.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	30.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.365.000,00	63.685.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.577.000,00	357.457.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.590.000,00	40.540.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	200.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	360.000.000,00	480.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	36.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	980.000.000,00	980.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000.000,00	720.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.899.500,00	67.842.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0002 Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.261.800,00	51.896.900,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.942.400,00	92.517.400,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.500.000,00	0,00	
Kegiatan	: 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.708.620.000,00	2.091.443.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	34.680.000,00	26.520.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	356.020.500,00	283.306.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.152.300,00	220.959.100,00	

Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD			
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD			
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD			
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: meningkatnya indek Repormasi Birokrasi			
Kegiatan	: 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.178.434.000,00	4.029.599.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.750.000,00	232.750.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Fasilitas kunjungan Tamu Tersedianya Komponen instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.010.000,00	6.010.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.094.600,00	411.344.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.869.600,00	69.869.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	487.350.000,00	513.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.250.000,00	126.250.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya Tersedianya sarana dan Prasarana Gedung Kantor			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.195.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.415.250,00	14.415.250,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	480.000.000,00	0,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pelayanan umum Tersedianya Penyediaan jasa surat menyurat			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.000.000,00	255.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	75.000.000,00	75.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.650.200.000,00	1.626.800.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional dan lapangan Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.514.000,00	149.746.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.530.000,00	134.530.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.800.000,00	169.800.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
Indikator Keluaran	: Tersedianya hak keuangan anggota DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	20.382.178.050,00	20.642.178.050,00	
Kegiatan	: 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya fasilitasi Fraksi DPRD Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD			
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	695.439.000,00	695.439.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	35.040.000,00	35.040.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.545.438.250,00	18.561.438.250,00	
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			

Indikator Hasil	: Meningkatnya Prosentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			
Kegiatan	: 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.140.000,00	100.665.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD Tersedianya penyebaran produk hukum Daerah Publikasi dan Dokumentasi Dewan Terselenggaranya hubungan masyarakat			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.994.120.000,00	1.734.120.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.750.000,00	20.075.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.192.750.000,00	1.219.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Reses			
Sub Kegiatan	: 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	30.240.000,00	30.240.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.309.500.000,00	1.362.000.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN			
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.468.000,00	2.232.100,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.628.057.000,00	4.688.057.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.100.000,00	21.350.000,00	

Kegiatan	: 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Aadministrasi barang milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.156.000,00	1.156.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	770.800,00	770.800,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.160.000,00	4.760.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.592.500,00	78.643.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.474.400,00	13.810.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.195.000,00	137.371.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	12.890.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	48.720.000,00	48.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.350.000,00	120.650.000,00	
Kegiatan	: 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.149.400,00	107.409.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	14.200.000,00	
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan			
Kegiatan	: 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan Pembangunan daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.200.000,00	409.425.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.470.000,00	2.445.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.470.000,00	720.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.300.000,00	87.300.000,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan Pembangunan daerah Persentase tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.150.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	27.070.000,00	
Kegiatan	: 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang tersusun			
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.120.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.620.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	19.320.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	22.720.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.910.000,00	0,00	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Keselarasan antar dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			
Kegiatan	: 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: tingkat keselarasan antar dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.460.000,00	8.460.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.440.000,00	22.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.460.000,00	8.460.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	22.600.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
Indikator Keluaran	: tingkat keselarasan antar dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.800.000,00	20.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.800,00	324.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: tingkat keselarasan antar dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA			
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.985.000,00	20.790.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.960.000,00	24.210.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN			
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah			
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah			
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	18.011.749.009,00	12.668.296.435,71	
Kegiatan	: 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			

Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	7.376.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.054.000,00	7.054.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	252.840.000,00	218.360.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	649.311.200,00	522.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.876.200,00	54.971.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.239.000,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.442.500,00	280.477.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	17.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	52.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.331.000,00	160.331.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	427.288.500,00	341.238.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.250.000,00	78.250.000,00	
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah			
Kegiatan	: 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.040.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.598.600,00	173.708.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	101.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.365.000,00	14.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.800.000,00	638.400.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			

Indikator Keluaran	: Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.050.000,00	130.410.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.284.800,00	164.664.800,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	156.310.964.000,00	152.481.657.284,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.250.000.000,00	1.260.018.557,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.4	BELANJA TRANSFER			
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.617.333.850,00	13.317.333.850,00	
Kegiatan	: 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	336.810.000,00	0,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Kegiatan	: 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga			
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Harga yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	1.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.220.000,00	3.220.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.700.000,00	6.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.063.000,00	86.555.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.146.000,00	98.936.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.168.000,00	171.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	16.100.000,00	16.100.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.046.000,00	125.285.000,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase PAD terhadap pendapatan			
Kegiatan	: 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.066.500,00	343.550.000,00	

5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	553.618.800,00	421.988.800,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	200.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	19.320.000,00	19.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	671.391.000,00	945.066.000,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN			
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.192.739.000,00	5.146.089.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	1.350.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksannya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	1.300.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.840.000,00	4.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.475.000,00	22.850.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.698.000,00	1.698.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.748.100,00	1.748.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.241.400,00	91.241.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.830.600,00	6.830.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	5.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	300.000.000,00	

Kegiatan	: 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.085.000,00	148.525.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	3.950.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.100.000,00	29.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	60.600.000,00	52.440.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.950.000,00	75.900.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.524.000,00	80.249.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.840.000,00	5.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.03.01.2.13 Penataan Organisasi			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Organisasi yang tertata			
Sub Kegiatan	: 5.03.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.300.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	0,00	
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Pelayanan			
Kegiatan	: 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.298.000,00	55.598.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.840.000,00	4.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.077.100,00	12.279.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.270.000,00	24.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.537.500,00	38.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	4.840.000,00	4.840.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.187.100,00	3.799.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.225.000,00	700.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Aparatur			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	7.260.000,00	7.260.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.880.000,00	20.880.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	7.260.000,00	7.260.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.520.000,00	48.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN			

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.220.000,00	3.220.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00	11.862.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN			
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Aparatur			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.280.000,00	34.825.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.395.000,00	14.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.440.000,00	6.440.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.400.000,00	113.400.000,00	
Kegiatan	: 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang dibina			
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.285.600,00	2.285.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.440.000,00	6.440.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.585.600,00	13.885.600,00	
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
Indikator Hasil	: Persentase ASN mendapatkan Pendidikan Diklat			
Kegiatan	: 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis			
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi			
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi			
Sub Kegiatan	: 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	3.220.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	3.220.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	338.341.500,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	428.567.000,00	0,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah			

Unit Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah			
Program	: 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	765.965.000,00	1.016.747.899,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.085.600,00	2.085.600,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.853.000,00	1.853.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.900.800,00	2.900.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.800.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.862.500,00	40.377.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.292.000,00	3.292.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.500.000,00	12.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	34.200.000,00	34.200.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.400.000,00	20.700.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.556.700,00	44.896.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	2.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Indikator Hasil	: Presentase Penelitian dan pengembangan Daerah			
Kegiatan	: 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.472.200,00	141.547.200,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan di Bidang sosial dan kependudukan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			

-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Inovasi dan teknologi yang telah di uji cobakan			
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.931.300,00	111.351.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH			
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat			
Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat			
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	7.830.247.000,00	10.411.505.127,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	516.314.001,00	581.414.001,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	1.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	60.600.000,00	57.200.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.585.299,00	246.452.199,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.105.600,00	31.094.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.620.000,00	4.620.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	0,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.759.000,00	3.523.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.750.000,00	22.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.306.600,00	133.056.600,00	
Kegiatan	: 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.079.500,00	164.608.300,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.170.000,00	32.170.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	100.000.000,00	
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
Indikator Hasil	: Cakupan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (Tindaklanjut)			
Kegiatan	: 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.900.000,00	57.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.500.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.250.000,00	7.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.560.000,00	35.310.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	40.000.000,00	0,00	

Kegiatan	: 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
Sub Kegiatan	: 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.210.000,00	7.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.500.000,00	0,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
Indikator Hasil	: Persentase Monev, Koordinasi, Pendampingan, Asistensi dan verifikasi pengawasan (MCP)			
Kegiatan	: 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.650.000,00	9.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	497.970.000,00	349.520.000,00	

Sub Kegiatan	: 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.310.000,00	157.160.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 7 UNSUR KEWILAYAHAN			
Bidang Urusan	: 7.01 KECAMATAN			
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bangli			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Bangli			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	12.880.000,00	12.880.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.380.000,00	3.700.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.588.820.000,00	6.507.020.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.280.000,00	1.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.984.000,00	10.984.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	32.520.000,00	29.800.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	700.060.100,00	743.686.300,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.854.400,00	22.774.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	7.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.853.500,00	16.087.500,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.345.000,00	23.360.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.160.000,00	10.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.685.000,00	55.685.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	49.080.000,00	45.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.429.146.000,00	1.409.646.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.301.000,00	91.058.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.810.000,00	17.810.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.01	Belanja Pegawai	8.080.000,00	8.080.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.978.500,00	28.221.500,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	26.600.000,00	26.600.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.720.600,00	454.853.000,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.231.500,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.085.500,00	20.085.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	16.920.000,00	16.920.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	452.722.500,00	533.572.500,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.360.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.937.500,00	150.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.436.400,00	83.809.200,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.080.000,00	8.080.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.756.000,00	137.675.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.080.000,00	8.080.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.043.500,00	200.093.500,00	

Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	8.080.000,00	8.080.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.635.000,00	2.112.500,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kintamani			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Kintamani			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah			
Kegiatan	: 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	720.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.000,00	540.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.454.151.000,00	3.229.253.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.716.600,00	1.716.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.210.200,00	248.510.200,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	1.080.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.092.000,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

Indikator Keluaran	: Jumlah LaporanJasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	21.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	20.040.000,00	15.960.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.490.000,00	47.920.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.530.800,00	141.780.800,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.650.000,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase Pelayanan Publik yang dilakukan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	21.784.200,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.534.200,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	6.060.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	42.585.200,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.785.200,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	42.776.800,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.815.800,00	0,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.490.000,00	6.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.549.200,00	39.209.200,00	
Kegiatan	: 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			

Indikator Keluaran	: Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Prosentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.142.400,00	22.320.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0002 Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0001 Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.060.000,00	6.060.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.063.600,00	47.490.600,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0003 Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0005 Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0006 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0007 Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Susut			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Susut			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Daerah			
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.818.692.000,00	2.997.692.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.896.400,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	20.970.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	14.850.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.512.300,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	203.262.300,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.050.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	5.050.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.762.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.008.400,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.876.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.500.500,00	71.500.500,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.300.000,00	33.450.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.050.000,00	5.050.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.753.300,00	72.753.300,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	2.190.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.050.000,00	5.050.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.371.000,00	800.000,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			
Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	700.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.030.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	5.050.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	5.050.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	55.845.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.945.000,00	0,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Prosentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.050.000,00	5.050.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.162.500,00	47.662.500,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra Suku,Umat beragama,Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.050.000,00	5.050.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.356.000,00	3.699.000,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0002 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.050.000,00	5.050.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.685.000,00	2.385.000,00	
Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Tembuku			
Unit Organisasi	: 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Tembuku			
Program	: 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.858.513.000,00	3.758.513.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.016.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.016.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.726.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.726.000,00	0,00	
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.065.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	153.070.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.070.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.164.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.164.000,00	0,00	

Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.080.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.450.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			

-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	17.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	28.700.000,00	24.620.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.750.000,00	31.000.000,00	
Kegiatan	: 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.534.000,00	79.534.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	3.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
Indikator Hasil	: Prsentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Kegiatan	: 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	2.020.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	0,00	2.020.000,00	
5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.360.000,00	0,00	
Program	: 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
Indikator Hasil	: Prsentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			

Kegiatan	: 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.850.000,00	35.558.000,00	
Program	: 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
Indikator Hasil	: Prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Kegiatan	: 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
Sub Kegiatan	: 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.760.000,00	2.960.000,00	
Program	: 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
Indikator Hasil	: Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
Kegiatan	: 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			
Sub Kegiatan	: 7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
-	-	0,00	0,00	
Program	: 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
Indikator Hasil	: Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			
Kegiatan	: 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Sub Kegiatan	: 7.01.06.2.01.0013 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.145.000,00	3.145.000,00	
BELANJA DAERAH				
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Indikator Hasil	: Persentase Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah			
Kegiatan	: 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.558.927.000,00	3.858.927.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	54.480.000,00	46.320.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	11.500.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.206.700,00	1.206.700,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.063.000,00	1.063.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.617.700,00	52.067.700,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.970.000,00	4.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	0,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.790.000,00	6.790.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator Keluaran	: Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.429.100,00	80.822.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	

5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	10.750.000,00	
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
Indikator Hasil	: Persentase Masyarakat dalam Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
Kegiatan	: 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	9.660.000,00	9.660.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	760.567.100,00	736.117.100,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
Indikator Hasil	: Persentase Masyarakat Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu			
Kegiatan	: 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			

Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	27.918.440.800,00	27.918.440.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.05	Belanja Hibah	772.467.238,00	785.573.716,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	5.040.000,00	5.040.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.300.000,00	98.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			

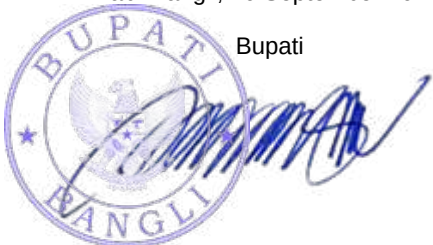
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.170.000,00	14.450.000,00	
Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
Indikator Hasil	: Persentase Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat			
Kegiatan	: 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
Sub Kegiatan	: 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
Indikator Hasil	: Persentase Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya			
Kegiatan	: 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.050.000,00	6.050.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.200.000,00	17.200.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
-	-			
-	-			
-	-	0,00	0,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
Indikator Hasil	: Persentase Informasi Dan Bahan Keterangan Terkait Stabilitas Daerah			
Kegiatan	: 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
Indikator Keluaran	: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	6.050.000,00	6.050.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.807.350,00	61.642.350,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.01	Belanja Pegawai	3.630.000,00	3.630.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.579.050,00	63.708.050,00	
PEMBIAYAAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	80.079.285.674,00	13.269.063.462,69	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	80.079.285.674,00	13.269.063.462,69	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	13.962.764.660,00	11.962.764.660,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	0,00	

PEMBIAYAAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	11.962.764.660,00	11.962.764.660,00	

Kab. Bangli, 20 September 2024

Bupati



SANG NYOMAN SEDANA ARTA



REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN

KABUPATEN BANGLI

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen											
1	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	30.600.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600.000,00	40.800.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
2	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1723 Orang/bulan	231.083.987.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.083.987.450,00	0,00	DAK Non Fisik-TKG PNSD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
3	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1969 Orang/bulan	0,00	227.434.463.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.434.463.108,00	DAK Non Fisik-TKG PNSD Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksannya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen											
4	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	65.730.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.730.000,00	47.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen											
5	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.528.200,00	8.528.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.528.200,00	8.528.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak
6	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.109.600,00	8.109.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109.600,00	8.109.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak
7	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	275.593.400,00	267.410.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.593.400,00	267.410.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
8	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44.434.000,00	44.434.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.434.000,00	44.434.400,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
9	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.527.500,00	3.527.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527.500,00	3.527.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
10	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	47.657.500,00	47.657.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.657.500,00	47.657.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
11	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	102.900.000,00	0,00	72.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.700.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
12	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	102.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
13	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	26.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
14	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	206.886.000,00	165.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.886.000,00	165.006.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
15	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	966.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.330.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
16	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	750.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.900.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
17	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	341.121.900,00	231.051.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.121.900,00	231.051.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
18	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	0,00	53.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.980.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
19	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	53.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.980.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
20	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
21	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Prosentase Kualitas Pengelolaan Pendidikan	86 Persen											
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	80 Persen											
22	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	0,00	0,00	0,00	998.592.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.592.400,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
23	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10 Ruang	0,00	0,00	998.592.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.592.400,00	0,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
24	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
26	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah													
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9 Ruang	0,00	0,00	669.354.600,00	669.354.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.354.600,00	669.354.600,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
27	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	8 Unit	42.752.500,00	43.675.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.752.500,00	43.675.500,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU													
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	0,00	250.335.300,00	250.335.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.335.300,00	250.335.300,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
29	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	0,00	94.766.000,00	94.766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.766.000,00	94.766.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
30	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah													
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0,00	0,00	527.320.850,00	527.320.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.320.850,00	527.320.850,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
31	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
33	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar													
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	160 Peserta Didik	88.696.000,00	88.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.696.000,00	88.696.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
34	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
35	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa													
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	45 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
36	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Peserta Didik	127.925.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.925.800,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
37	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa													
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
38	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	422 Orang	6.772.500.000,00	8.898.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772.500.000,00	8.898.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
39	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	197 Satuan Pendidikan	56.733.000,00	11.610.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.733.000,00	11.610.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	164 Satuan Pendidikan	0,00	21.833.770.982,68	0,00	2.256.644.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.090.415.212,68	DAK Non Fisik-BOS Reguler Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
41	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	163 Satuan Pendidikan	17.721.254.800,00	0,00	6.330.705.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.051.960.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
42	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar													
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	5 Ruang	0,00	0,00	2.496.481.000,00	2.496.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.481.000,00	2.496.481.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
43	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	827.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.000.000,00	Insentif Fiskal
44	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	0,00	0,00	243.973.350,00	243.973.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.973.350,00	243.973.350,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
45	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	45 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
46	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	75 Ruang	0,00	0,00	0,00	7.998.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998.037.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Insentif Fiskal
48	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	75 Ruang	0,00	0,00	5.978.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978.037.000,00	0,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	86 Persen											
49	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	36 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
51	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium													
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	36 Ruang	0,00	0,00	321.023.050,00	321.023.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.023.050,00	321.023.050,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	28.775.000,00	29.697.500,00	322.773.350,00	322.773.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.548.350,00	352.470.850,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
53	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	36 Ruang	0,00	0,00	2.693.177.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693.177.750,00	0,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
54	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah													
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	37.972.000,00	0,00	3.083.177.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121.149.750,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Insentif Fiskal
55	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah													
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0,00	0,00	90.026.750,00	90.026.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.026.750,00	90.026.750,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
56	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah													
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	0,00	0,00	376.524.025,00	376.524.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.524.025,00	376.524.025,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
57	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16 Unit	0,00	0,00	0,00	2.334.449.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.449.075,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
58	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	0,00	0,00	2.334.449.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.449.075,00	0,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
59	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah													
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	0,00	0,00	327.700.000,00	327.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.700.000,00	327.700.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
60	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	202 Peserta Didik	161.304.000,00	161.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.304.000,00	161.304.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
61	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	235 Orang	3.764.250.000,00	4.856.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764.250.000,00	4.856.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
62	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	26 Satuan Pendidikan	11.915.028.989,00	0,00	2.859.641.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.774.670.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	28 Satuan Pendidikan	0,00	13.693.089.485,00	0,00	1.309.630.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.002.720.000,00	DAK Non Fisik-BOS Reguler
64	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama													
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	650 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	19.999.800,00	332.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999.800,00	332.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
67	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi													
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	25.861.400,00	12.226.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.861.400,00	12.226.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
68	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik													
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	193 Satuan Pendidikan	18.138.400,00	400.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.138.400,00	400.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	86 Persen											
69	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	0,00	2.370.000,00	0,00	168.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.128.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
70	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit	2.280.000,00	0,00	168.758.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.038.000,00	0,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
71	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD													
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
72	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD													
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
73	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
74	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD													
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	2 Paket	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
75	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD													
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3544 Peserta Didik	0,00	2.424.595.700,00	0,00	106.604.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531.200.000,00	DAK Non Fisik-BOP PAUD DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
76	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD													
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3587 Peserta Didik	2.379.055.036,00	0,00	147.044.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526.100.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOP PAUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
77	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD													
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	155 Orang	2.614.500.000,00	3.402.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.500.000,00	3.402.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
78	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD													
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	124 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
79	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD													
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	0 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
81	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
82	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen	0,00	67.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
83	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan													
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	88.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.320.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
84	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru													
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Insentif Fiskal
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terwujudnya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	86 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	3 Satuan Pendidikan	91.800.000,00	96.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.800.000,00	96.900.000,00	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya Porsentase Pengembangan Kurikulum	96 Persen											
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Muatan Lokas Pendidikan Dasar	96 Persen											
86	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar													
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	10 Orang	30.591.000,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.591.000,00	1.285.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya Prosentase Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	97 Persen											
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksannya Pendidikan dan Tenaga Pendidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang adil dan Merata	97 Persen											
87	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2 Dokumen	83.196.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.196.000,00	20.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
88	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	87.804.000,00	49.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.804.000,00	49.344.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Berbasis Keagamaan Pada Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Dalam Bentuk Pesraman	48 Persen											
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Telaksanya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	48 Persen											
89	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Peserta Didik	45.032.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.032.500,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90	1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Peserta Didik	0,00	25.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya Partisipasi Kepemudaan	89 Persen											
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terwujudnya pengembangan kepeloporan pemuda untuk mendorong kreatifitas, inovasi, terobosan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional	89 Persen											
91	2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92	2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
93	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi													
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
94	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi													
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
95	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda													
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
96	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya suatu sistem yang memiliki berbagai komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi antara komponen satu dengan komponen yang lain untuk menciptakan suatu output	89 Persen											
97	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha													
			Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
98	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha													
			Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
99	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	10 Dokumen	145.300.000,00	147.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.300.000,00	147.875.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya prosentase perolehan medali pada event tingkat provinsi, nasional dan Internasional	89 Persen											
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya Pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan , kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani.	89 Persen											
100	2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar													
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
101	2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar													
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	75 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
102	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2 Unit	880.000.000,00	880.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000.000,00	880.000.000,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Memasyarakatkan Olahraga, menjaring bibit atlet potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan prestasi olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan kesehatan nasional.	89 Persen											
103	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
104	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
105	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan													
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	265 Orang	715.300.000,00	972.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.300.000,00	972.830.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terwujudnya Olahraga Prestasi melalui Pembinaan dan Pengembangan Olahraga secara terencana,sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.	89 Persen											
106	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	1000 Orang	1.500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terwujudnya proses untuk mencapai Prestasi puncak melalui Pembinaan Organisasi atau Club Olahraga yang dilaksanakan secara Efisien, sistimatik dan Berkelanjutan	89 Persen											
107	2.19.03.2.04.0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi													
			Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	1 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
108	2.19.03.2.04.0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi													
			Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan	0 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Meningkatkan Kesehatan, Kebugaran, Rekreasi dan Kesenangan Masyarakat melalui Olahraga	89 Persen											
109	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
110	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
111	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi													
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	1 Unit	551.555.000,00	0,00	29.623.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.175.000.000,00	0,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
112	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi													
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	1 Unit	0,00	551.555.000,00	0,00	29.723.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.275.000.000,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya Pembinaan Kepramukaan	85 Persen											
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Mewujudkan Generasi yang tangguh, Berbudi luhur dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air yang ditujukan pada setiap kegiatan	85 Persen											
113	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah													
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1260 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kesehatan													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen											
114	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
115	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	15.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
116	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	59.533.100,00	47.613.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.533.100,00	47.613.100,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
117	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6144 Orang/bulan	48.234.850.600,00	47.752.395.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.234.850.600,00	47.752.395.016,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
118	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	106.030.000,00	95.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.030.000,00	95.020.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksannya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen											
119	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
120	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
121	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	151.070.000,00	135.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.070.000,00	135.120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen											
122	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	9.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.550.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
123	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
124	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai													
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	65.300.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.300.000,00	59.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen											
125	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
126	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
127	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
128	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	23.632.800,00	23.632.800,00	39.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.520.800,00	23.632.800,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
129	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	525.625.100,00	448.975.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.625.100,00	448.975.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak
130	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	87.620.000,00	87.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.620.000,00	87.620.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
131	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15 Unit											
132	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	83 Unit	0,00	0,00	9.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.402.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
133	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
134	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
135	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	0,00	0,00	118.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.200.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
136	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
137	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	215.500.000,00	287.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.500.000,00	287.320.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
138	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	328.860.000,00	365.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.860.000,00	365.760.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
139	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	594.074.000,00	453.303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.074.000,00	453.303.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
140	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
141	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	60 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
142	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	0,00	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
143	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 Unit	20.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
144	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	91 Persen											
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	91 Persen											
145	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas													
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
146	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas													
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
147	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas													
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	12 Unit	0,00	19.000.000,00	0,00	3.655.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674.870.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak
148	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	12 Unit	22.700.000,00	0,00	3.655.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.678.570.000,00	0,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak
149	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
150	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
151	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
152	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
153	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
154	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
155	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
156	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
157	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	24 Unit	0,00	0,00	0,00	183.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.316.000,00	Insentif Fiskal
158	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	13 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
159	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi													
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	150 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
160	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi													
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
161	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	150 Unit	51.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.842.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
162	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	150 Unit	0,00	51.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.842.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
163	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	2.715.813.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715.813.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
164	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	0,00	2.732.117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732.117.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Insentif Fiskal
165	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga													
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	760 Keluarga	0,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
166	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga													
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	760 Keluarga	20.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.950.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
167	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	0,00	232.048.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.048.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
168	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Paket	221.548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.548.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	91 Persen											
169	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3656 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
170	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1408 Orang	0,00	119.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.640.000,00	Insentif Fiskal
171	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
172	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3490 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
173	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3324 Orang	57.020.000,00	57.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.020.000,00	57.020.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
174	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
175	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16046 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
176	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7144 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
177	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
178	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
179	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	155754 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
180	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
181	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37911 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
182	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
183	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61736 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
184	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1816 Orang	0,00	213.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.052.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
185	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2825 Orang	213.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.052.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
186	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	693 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
187	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
188	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	151 Orang	6.575.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575.000,00	4.750.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
189	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3658 Orang	6.575.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.575.000,00	4.750.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
190	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
191	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
192	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
193	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	0,00	450.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
194	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	0,00	35.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.880.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
195	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	35.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.880.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
196	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
197	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
198	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	342.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.510.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak
199	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	0,00	342.510.000,00	0,00	299.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.360.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal
200	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen	0,00	177.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.033.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
201	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	177.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.033.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
202	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
203	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	11.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
204	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	298.790.000,00	298.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.790.000,00	298.790.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
205	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	693 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
206	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
207	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	599 Orang	0,00	52.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.420.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
208	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	693 Orang	52.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.420.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
209	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
210	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
211	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	795.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.453.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak
212	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0,00	981.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981.843.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
213	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	26.333.237.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.333.237.200,00	0,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak
214	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	45.555.482.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.555.482.200,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
215	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
216	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 Dokumen	79.985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.985.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
217	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	0,00	63.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.550.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
218	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
219	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
220	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	377.400.000,00	452.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.400.000,00	452.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
221	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Dokumen	170.141.000,00	149.684.500,00	28.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.971.000,00	149.684.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
222	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
223	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	0,00	13.056.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.056.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
224	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500.000,00	28.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
225	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
226	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
227	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)													
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	37.452.000,00	26.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.452.000,00	26.052.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
228	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	61 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
229	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
230	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
231	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
232	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	16 Orang	18.575.000,00	16.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.575.000,00	16.750.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak
233	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok													
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	0 Tatanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
234	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok													
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	4 Tatanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
235	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
236	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
237	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
238	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
239	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	159.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.075.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
240	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	0,00	159.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.075.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya sistem informasi Kesehatan secara terintergrasi	91 Persen											
241	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
242	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	11.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.240.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbitnya izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91 Persen											
243	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	13 Unit	117.620.000,00	56.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.620.000,00	56.620.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	86 Persen											
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya perizinan praktek tenaga kesehatan	86 Persen											
244	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen	64.520.000,00	61.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.520.000,00	61.560.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan	86 Persen											
245	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
246	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	3.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
247	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	525 Orang	0,00	999.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.600.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
248	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	525 Orang	810.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.900.000,00	0,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
249	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	0,00	301.558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.558.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak
250	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	305.258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.258.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	86 Persen											
251	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	525 Orang	1.012.904.000,00	940.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.904.000,00	940.004.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	91 Persen											
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terbitnya izin Apotek, Toko Obat, Alat Kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional	91 Persen											
252	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dokumen	61.001.000,00	61.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.001.000,00	61.001.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terbitya sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	91 Persen											
253	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	132.650.000,00	132.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.650.000,00	132.650.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terbitnya sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	91 Persen											
254	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
255	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pemeriksaan post market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	91 Persen											
256	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan													
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	178.680.000,00	178.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.680.000,00	178.680.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	92 Persen											
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92 Persen											
257	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
258	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	0,00	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92 Persen											
259	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
260	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
261	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
262	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	0,00	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota
		Puskesmas Bangli													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
263	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.289.801.500,00	1.319.538.809,54	85.950.000,00	135.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.751.500,00	1.455.488.809,54	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	91 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	91 Persen											
264	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80 Orang	8.736.000,00	8.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736.000,00	8.736.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
265	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37 Orang	3.158.000,00	3.158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158.000,00	3.158.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
266	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	743 Orang	38.950.000,00	38.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.950.000,00	38.950.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
267	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8 Orang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
268	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	24 Orang	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
269	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	221.608.000,00	221.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.608.000,00	221.608.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
270	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	32 Dokumen	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	5.350.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
271	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	9.428.000,00	9.428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.428.000,00	9.428.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
272	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23 Dokumen	153.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.542.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
273	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23 Dokumen	0,00	153.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.542.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
274	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	25 Dokumen	164.500.000,00	164.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500.000,00	164.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
275	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4 Laporan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
276	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
277	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
278	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	130 Dokumen	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
279	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	13 Dokumen	106.220.000,00	106.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.220.000,00	106.220.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya sistem informasi Kesehatan secara terintergrasi	91 Persen											
280	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
281	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	92 Persen											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92 Persen											
282	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	0,00	8.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
283	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5 Dokumen	8.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Bangli Utara													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
284	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	959.073.450,00	1.192.057.561,92	258.600.000,00	298.165.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.673.450,00	1.490.222.783,92	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	91 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	91 Persen											
285	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	905 Orang	55.562.500,00	55.562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.562.500,00	55.562.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
286	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	368 Orang	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700.000,00	21.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
287	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
288	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1314 Orang	58.950.000,00	58.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.950.000,00	58.950.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
289	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	108 Orang	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
290	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	458 Orang	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900.000,00	22.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
291	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	225 Orang	6.525.000,00	6.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525.000,00	6.525.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
292	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
293	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	8358 Dokumen	214.622.500,00	214.622.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.622.500,00	214.622.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
294	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	510 Dokumen	23.925.000,00	23.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.925.000,00	23.925.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
295	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	144 Dokumen	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
296	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2826 Dokumen	133.625.000,00	133.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.625.000,00	133.625.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
297	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1409 Dokumen	184.520.000,00	184.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.520.000,00	184.520.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
298	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	44 Laporan	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
299	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	259 Orang	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950.000,00	12.950.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
300	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	60 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Susut I													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
301	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.504.170.143,00	1.491.226.302,55	108.500.000,00	210.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612.670.143,00	1.701.726.302,55	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	91 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	91 Persen											
302	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	344 Orang	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
303	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	329 Orang	14.125.000,00	14.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125.000,00	14.125.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
304	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
305	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	313 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
306	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
307	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1614 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
308	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1789 Orang	38.225.000,00	38.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.225.000,00	38.225.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
309	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10131 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
310	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4933 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
311	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5868 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
312	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	442 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
313	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	89 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
314	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	210 Orang	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
315	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	344 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
316	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4579 Dokumen	207.400.000,00	207.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.400.000,00	207.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
317	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	52 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
318	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	198 Dokumen	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
319	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
320	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	58 Dokumen	24.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00	24.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
321	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	66 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
322	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	768 Dokumen	121.100.000,00	121.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.100.000,00	121.100.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
323	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional													
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	210 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
324	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	38 Dokumen	166.500.000,00	166.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500.000,00	166.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
325	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
326	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
327	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21 Orang	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
328	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12 Orang	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
329	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok													
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	28 Tatanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
330	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
331	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	90.650.000,00	90.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.650.000,00	90.650.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
332	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
333	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	92 Persen											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92 Persen											
334	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	32 Dokumen	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100.000,00	15.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Susut II													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
335	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.215.379.972,00	1.353.991.315,17	188.226.320,00	312.726.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.606.292,00	1.666.717.635,17	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	91 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	91 Persen											
336	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	420 Orang	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
337	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	420 Orang	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
338	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	0,00	36.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
339	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	36.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
340	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	23.210.000,00	23.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.210.000,00	23.210.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
341	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
342	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	252 Dokumen	235.700.000,00	235.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.700.000,00	235.700.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
343	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	88 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
344	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	172 Dokumen	9.890.000,00	9.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890.000,00	9.890.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
345	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	281 Dokumen	131.646.000,00	131.646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.646.000,00	131.646.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
346	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	161.500.000,00	161.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.500.000,00	161.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
347	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	48 Laporan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
348	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
349	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
350	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	50 Dokumen	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
351	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	50 Dokumen	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
352	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	24 Dokumen	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000.000,00	79.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya sistem informasi Kesehatan secara terintegrasi	91 Persen											
353	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
354	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	92 Persen											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92 Persen											
355	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	9.354.000,00	9.354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354.000,00	9.354.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
		Puskesmas Tembuku I													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
356	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.272.689.838,00	1.417.865.341,79	201.708.762,00	361.567.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.398.600,00	1.779.432.947,79	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	91 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	91 Persen											
357	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	247 Orang	32.960.000,00	32.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960.000,00	32.960.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
358	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
359	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
360	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1232 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
361	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1650 Orang	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550.000,00	17.550.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
362	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13006 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
363	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
364	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
365	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2111 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
366	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	52 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
367	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
368	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17 Orang	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
369	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	17 Orang	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
370	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
371	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	264 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
372	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	130 Dokumen	202.853.000,00	202.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.853.000,00	202.853.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
373	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
374	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
375	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	114 Dokumen	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
376	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
377	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	532 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
378	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	122 Dokumen	0,00	35.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.954.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
379	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	122 Dokumen	35.954.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.954.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
380	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	234 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
381	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
382	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	453 Dokumen	104.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
383	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	453 Dokumen	0,00	104.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.700.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
384	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	28 Dokumen	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000.000,00	162.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
385	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	216 Laporan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
386	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
387	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
388	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10 Orang	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
389	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
390	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
391	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	200 Dokumen	84.463.000,00	84.463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.463.000,00	84.463.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
392	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	200 Dokumen	46.620.000,00	46.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.620.000,00	46.620.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
393	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	20 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
394	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	20 Dokumen	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	92 Persen											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92 Persen											
395	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	36 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
396	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	36 Dokumen	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Tembuku II													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
397	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.365.303.800,00	0,00	189.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.403.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
398	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	1.511.644.209,93	0,00	50.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.344.209,93	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	91 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	91 Persen											
399	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	290 Orang	14.800.000,00	14.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
400	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50 Orang	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620.000,00	10.620.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
401	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
402	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
403	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1849 Orang	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
404	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
405	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
406	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
407	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
408	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
409	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12 Orang	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
410	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
411	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
412	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	259 Dokumen	218.125.000,00	218.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.125.000,00	218.125.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
413	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
414	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	358 Dokumen	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300.000,00	36.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
415	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
416	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	394 Dokumen	45.255.000,00	45.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.255.000,00	45.255.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
417	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	878 Dokumen	100.075.000,00	100.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.075.000,00	100.075.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
418	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	186 Dokumen	167.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
419	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	186 Dokumen	0,00	167.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
420	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	28 Laporan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
421	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	48 Orang	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
422	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Orang	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
423	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
424	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	256 Dokumen	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
425	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	256 Dokumen	0,00	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
426	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	636 Dokumen	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400.000,00	62.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
427	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
428	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	92 Persen											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92 Persen											
429	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025.000,00	3.025.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Kintamani I													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
430	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.386.437.500,00	1.482.942.691,70	212.200.000,00	335.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.637.500,00	1.818.142.691,70	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
431	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga													
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	160 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
432	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga													
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	91 Persen											
433	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	349 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
434	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
435	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18 Orang	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
436	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	342 Orang	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
437	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	330 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
438	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
439	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3525 Orang	44.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
440	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2309 Orang	0,00	44.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
441	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
442	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
443	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
444	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5727 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
445	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
446	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	336 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
447	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	53 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
449	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Orang	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
450	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
451	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
452	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
453	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	17 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
454	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	0,00	212.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
455	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	212.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.200.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
456	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
457	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
458	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
459	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
460	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
461	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
462	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
463	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
464	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
465	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	24 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
466	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7 Dokumen	107.700.000,00	107.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.700.000,00	107.700.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
467	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	6 Dokumen	171.291.000,00	171.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.291.000,00	171.291.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
468	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
469	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15 Orang	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
470	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1 Orang	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
471	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34 Orang	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
472	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	354 Orang	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
473	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	130.400.000,00	130.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.400.000,00	130.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
474	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
475	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	7 Dokumen	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	92 Persen											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92 Persen											
476	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	20.159.000,00	20.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.159.000,00	20.159.000,00	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
		Puskesmas Kintamani II													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
477	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	907.840.000,00	1.124.959.361,59	140.000.000,00	269.523.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.840.000,00	1.394.482.964,59	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-											
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
478	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga													
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
479	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga													
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	91 Persen											
480	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	333 Orang	72.990.000,00	72.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.990.000,00	72.990.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
481	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	952 Orang	29.160.000,00	29.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160.000,00	29.160.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
482	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	748 Orang	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900.000,00	15.900.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
483	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8895 Orang	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300.000,00	38.300.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
484	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1332 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
485	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	311 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
486	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
487	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	23 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
488	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40 Orang	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
489	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	278 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
490	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	125 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
491	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100 Dokumen	233.850.000,00	233.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.850.000,00	233.850.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
492	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	14 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
493	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	14 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
494	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	27 Dokumen	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250.000,00	47.250.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
495	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	82 Dokumen	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	9.750.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
496	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	50 Dokumen	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
497	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA													
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	18 Orang	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
498	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	76 Dokumen	125.450.000,00	125.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.450.000,00	125.450.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
499	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	37 Dokumen	163.480.000,00	163.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.480.000,00	163.480.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
500	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10 Laporan	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
501	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10 Laporan	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
502	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4 Orang	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
503	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	250 Orang	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
504	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	250 Orang	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya sistem informasi Kesehatan secara terintergrasi	91 Persen											
505	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	31 Dokumen	0,00	18.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
506	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	31 Dokumen	18.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.020.000,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
507	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
508	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
		Puskesmas Kintamani III													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
509	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	958.400.000,00	1.014.172.268,65	128.980.000,00	194.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.380.000,00	1.208.502.268,65	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	91 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	91 Persen											
510	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	70 Orang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
511	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	96 Orang	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
512	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	251 Orang	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
513	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40 Orang	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
514	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	140 Orang	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
515	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	209.700.000,00	209.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.700.000,00	209.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
516	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
517	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450.000,00	7.450.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
518	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	147.050.000,00	147.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.050.000,00	147.050.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
519	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	162.500.000,00	162.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500.000,00	162.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
520	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
521	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
522	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
523	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	114.200.000,00	114.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.200.000,00	114.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Tersedianya sistem informasi Kesehatan secara terintergrasi	91 Persen											
524	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
525	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	92 Persen											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92 Persen											
526	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
527	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Kintamani IV													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
528	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	876.690.152,00	903.695.330,16	21.903.048,00	92.922.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.593.200,00	996.617.842,16	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	91 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	91 Persen											
529	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	215 Orang	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
530	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	213 Orang	7.460.000,00	7.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460.000,00	7.460.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
531	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
532	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir													
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
533	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	718 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
534	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
535	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1061 Orang	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750.000,00	11.750.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
536	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7229 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
537	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
538	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut													
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	560 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
539	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2367 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
540	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi													
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
541	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	174 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
542	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus													
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
543	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	37 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
544	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
545	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	20 Orang	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
546	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	221 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
547	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
548	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
549	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
550	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	239.425.000,00	239.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.425.000,00	239.425.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
551	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
552	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
553	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
554	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
555	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
556	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	20.395.000,00	20.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.395.000,00	20.395.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
557	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	0,00	114.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.212.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
558	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	114.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.212.500,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
559	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	164.000.000,00	164.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000.000,00	164.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
560	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
561	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5 Orang	0,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
562	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
563	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
564	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
565	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
566	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen	94.050.000,00	94.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.050.000,00	94.050.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
567	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
568	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	86 Persen											
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	86 Persen											
569	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	12 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
570	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	92 Persen											
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92 Persen											
571	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
572	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92 Persen											
573	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	6.287.500,00	6.287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287.500,00	6.287.500,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Kintamani V													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
574	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.375.188.500,00	1.386.459.269,62	389.267.000,00	389.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.455.500,00	1.775.726.269,62	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	91 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	91 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
575	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1358 Orang	96.620.000,00	96.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.620.000,00	96.620.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
576	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1184 Orang	28.960.000,00	28.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.960.000,00	28.960.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
577	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	722 Orang	36.100.000,00	36.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.100.000,00	36.100.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
578	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif													
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	576 Orang	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
579	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	100 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
580	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	6 Dokumen	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
581	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9816 Dokumen	212.920.000,00	212.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.920.000,00	212.920.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
582	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	624 Dokumen	33.420.000,00	33.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.420.000,00	33.420.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
583	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	120 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
584	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16 Dokumen	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
585	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2244 Dokumen	113.680.000,00	113.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.680.000,00	113.680.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
586	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1160 Dokumen	155.481.000,00	155.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.481.000,00	155.481.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
587	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24 Laporan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
588	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	120 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
589	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria													
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	30 Orang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-											
590	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	228 Dokumen	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
591	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	228 Dokumen	0,00	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Puskesmas Kintamani VI													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 Persen											
592	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.094.850.610,00	1.143.950.103,78	215.755.490,00	381.755.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.606.100,00	1.525.705.593,78	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Terintegrasi	91 Persen											
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP	91 Persen											
593	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	184 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
594	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	191 Orang	52.461.000,00	52.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.461.000,00	52.461.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
595	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2053 Orang	23.700.000,00	23.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700.000,00	23.700.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
596	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	40 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
597	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	36 Dokumen	207.528.000,00	207.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.528.000,00	207.528.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
598	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
599	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24 Dokumen	16.011.000,00	16.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.011.000,00	16.011.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
600	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 Dokumen	81.590.000,00	81.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.590.000,00	81.590.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
601	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	40 Dokumen	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000.000,00	174.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
602	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	24 Laporan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
603	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2 Orang	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
604	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	24 Dokumen	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850.000,00	17.850.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
605	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	36 Dokumen	75.550.000,00	75.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.550.000,00	75.550.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	92 Persen											
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92 Persen											
606	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20 Dokumen	42.210.000,00	42.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.210.000,00	42.210.000,00	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas
		Rumah Sakit Umum Daerah													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 %											
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan											
607	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	455 Orang/bulan	0,00	47.135.954.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.135.954.899,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
608	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	455 Orang/bulan	46.733.453.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.733.453.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terpenuhinya Pelayanan BLUD	100 %											
609	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0,00	79.763.622.849,18	0,00	4.947.319.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.710.942.049,18	Pendapatan dari BLUD
610	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	59.023.918.750,00	0,00	1.560.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.583.918.750,00	0,00	Pendapatan dari BLUD
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	3 Unit											
611	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya													
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	4.108.376.340,00	0,00	16.625.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.733.376.340,00	0,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
612	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya													
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	0,00	4.421.116.216,00	0,00	27.484.279.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.905.395.796,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
613	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	0,00	0,00	588.030.000,00	588.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.030.000,00	588.030.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
614	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit													
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	0,00	0,00	13.848.606.000,00	13.848.606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.848.606.000,00	13.848.606.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
615	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	0,00	546.000.000,00	0,00	4.199.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745.994.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
616	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	409.500.000,00	0,00	4.199.994.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609.494.000,00	0,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
617	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan													
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	15.892.990.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.892.990.900,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	100 %											
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
618	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/bulan	12.337.968.500,00	12.187.968.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.337.968.500,00	12.187.968.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
619	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.880.000,00	7.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880.000,00	7.880.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
620	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	109.832.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.832.000,00	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
621	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	449.094.800,00	376.155.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.094.800,00	376.155.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
622	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	38.076.000,00	38.076.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.076.000,00	38.076.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
623	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.000,00	3.720.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
624	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
625	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar													
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
626	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	17.680.000,00	17.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.680.000,00	17.680.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
627	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	49.399.000,00	49.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.399.000,00	49.399.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
628	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	14.062.400,00	14.242.400,00	8.541.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.603.600,00	14.242.400,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
629	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	74 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
630	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	408.608.021,00	454.049.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.608.021,00	454.049.200,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
631	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar													
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	14 Unit	347.850.000,00	83.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.850.000,00	83.400.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
632	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	31.640.000,00	31.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.640.000,00	31.640.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
633	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	20,41 %											
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Teknis Kegiatan	100 %											
634	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6,2 KM	263.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.000.000,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
635	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan													
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6,2 KM	0,00	285.303.400,00	0,00	348.696.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
636	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi													
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	1 Bendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
637	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk berakses air minum	88,70 %											
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	100 %											
638	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	0,00	0,00	200.000.000,00	490.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	490.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
639	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik	7.295.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.295.000.000,00	0,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal
640	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik	0,00	8.788.291.000,00	0,00	22.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810.352.000,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal Pendapatan Bagi Hasil Pajak
641	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan													
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	830 SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kinerja Pengelolaan Persampahan	28 %											
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang memadai	100 %											
642	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS													
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	2,3 Ton/hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah tinggal bersanitasi layak	92,49 %											
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya kebijakan strategis pengelolaan air limbah	100 %											
643	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman													
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	70 M³/Hari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
644	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)													
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Jaringan Drainase Dalam Kondisi Baik	24,47 %											
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Skala Kota	100 %											
645	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan													
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2300 M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
646	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan													
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	10 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	27,64 %											
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tertatanya Bangunan Gedung Di Wilayah Kabupaten Bangli	100 %											
647	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	3 Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung													
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
649	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	332.000.000,00	412.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.000.000,00	3.412.000.000,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
650	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	30 Dokumen	296.356.500,00	308.734.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.356.500,00	308.734.900,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Dokumen Penyusunan Perencanaan Penataan Kota	20,11 %											
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	100 %											
651	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya													
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	904.773.700,00	1.254.141.000,00	20.929.815.600,00	23.744.720.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.834.589.300,00	24.998.861.835,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
652	1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya													
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
653	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	23,34 %											
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100 %											
654	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan													
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	45.515 KM	0,00	430.890.000,00	0,00	37.536.169.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.967.059.920,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitunga Anggaran Tahun Sebelumnya
655	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	45.515 KM	215.000.000,00	0,00	33.099.922.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.314.922.630,00	0,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
656	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	105 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
657	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	66 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
658	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan													
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	15 Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
659	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan													
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2 KM	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
660	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan													
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	40 KM	4.045.900.000,00	4.786.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.900.000,00	4.786.270.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi	10 %											
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya Tenaga yang Terampil	100 %											
661	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis													
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	90 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Tenaga yang Terampil	100 %											
662	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	10 Paket Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase Ruang Publik Umum yang Nyaman dan Aman	29,03 %											
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang	100 %											
663	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang													
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2 Dokumen	126.430.000,00	129.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.430.000,00	129.490.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
664	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
665	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang													
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	100 %											
666	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
667	1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang													
			Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100 %											
668	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang													
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	10 Layanan	136.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.200.000,00	61.200.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	100 %											
669	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK													
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	53.900.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900.000,00	59.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
670	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal													
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	10 Berita Acara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya perumahan layak huni yang di bangun	21,90 %											
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang Terlayani	100 %											
671	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana													
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
672	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit Rumah	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Insentif Fiskal
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 %											
673	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kawasan permukiman yang tertangani	22,95 %											
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penyusunan dan/ atau Review Serta Terlegalisasinya Rencana dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	100 %											
674	1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik													
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
675	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	100 %											
676	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP													
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
677	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh													
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Rumah Layak Huni	100 %											
678	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni													
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	132 Unit Rumah	0,00	4.063.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063.760.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
679	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni													
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	82 Unit Rumah	1.773.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.310.000,00	0,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	23,58 %											
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100 %											
680	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha													
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	10 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Tertatanya perumahan yang disediakan prasarana,sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	95,74 %											
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	100 %											
681	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian													
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	7 Lokasi	735.707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.707.000,00	0,00	Insentif Fiskal
682	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian													
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	7 Lokasi	0,00	2.250.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.844.000,00	Insentif Fiskal Pendapatan Bagi Hasil Pajak
		Satuan Polisi Pamong Praja													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 %											
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen											
683	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	128.925.000,00	66.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.925.000,00	66.765.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
684	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen											
685	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	11.146.818.000,00	10.265.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.146.818.000,00	10.265.018.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 persen											
686	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
687	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen											
688	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
689	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.668.500,00	3.668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668.500,00	3.668.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
690	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	300.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	480.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
691	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	71.206.300,00	68.161.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.206.300,00	68.161.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
692	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
693	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen											
694	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
695	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
696	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
697	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	19.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.563.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen											
698	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
699	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	14.851.500,00	12.721.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851.500,00	12.721.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
700	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen											
701	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	148.693.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.693.500,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
702	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	0,00	168.428.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.428.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak
703	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	12.940.000,00	12.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940.000,00	12.940.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Pemeliharaan Trantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	100 %											
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tenwujudnya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 persen											
704	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	11.457.200,00	11.457.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457.200,00	11.457.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
705	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
706	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia													
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	131 Orang	0,00	251.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak
707	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia													
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	131 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
708	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
709	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan													
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	365 laporan	1.176.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.460.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan													
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 laporan	0,00	1.835.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835.842.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
711	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa													
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100 persen											
712	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4 Laporan	18.588.000,00	17.088.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.588.000,00	17.088.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
713	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	173.898.300,00	170.740.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.898.300,00	170.740.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Karir PPNS	100 persen											
714	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS													
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	22.120.000,00	13.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.120.000,00	13.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi Pemerintah Daerah	100 %											
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan											
715	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	6.527.341.000,00	6.407.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527.341.000,00	6.407.341.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
716	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
717	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
718	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	1.621.600,00	1.621.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.600,00	1.621.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
719	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76 Paket	99.460.200,00	63.460.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.460.200,00	63.460.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
720	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	29.000.000,00	29.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	29.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
721	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
722	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
723	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
724	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
725	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
726	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
727	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	34.200.000,00	37.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200.000,00	37.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
728	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	45 Laporan	148.660.000,00	77.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.660.000,00	77.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
729	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	314.703.400,00	279.045.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.703.400,00	279.045.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
730	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
731	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
732	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	85,00 %											
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga/Desa Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %											
733	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)													
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	20 Orang	14.320.000,00	14.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.320.000,00	14.320.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penanggulangan Bencana Yang Tertangani	2 Paket											
734	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	25 Kawasan	14.390.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390.000,00	3.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
735	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	433.620.000,00	522.720.000,00	17.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.920.000,00	522.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 Dokumen											
736	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	0,00	36.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.690.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
737	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota													
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan	53.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.340.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Penyelesaian Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	62,50 %											
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Paket											
738	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	24 Laporan	255.220.000,00	284.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.220.000,00	284.520.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
739	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
740	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran													
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	46 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
741	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	0,00	0,00	22.984.800,00	22.984.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.984.800,00	22.984.800,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pemerdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	325 Orang											
742	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat													
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	325 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 persen											
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen											
743	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	2 dokumen											
744	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	4.507.321.000,00	4.557.321.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507.321.000,00	4.557.321.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
745	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
746	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 dokumen											
747	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	57 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
748	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
749	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya administrasi umum perangkat daerah	30 paket											
750	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	3.264.000,00	3.264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.000,00	3.264.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
751	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	7.177.500,00	7.177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.177.500,00	7.177.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
752	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
753	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	104 Paket	238.499.000,00	259.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.499.000,00	259.275.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
754	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	17.386.900,00	17.426.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.386.900,00	17.426.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
755	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420.000,00	6.420.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
756	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
757	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8 Laporan	3.584.000,00	1.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584.000,00	1.384.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	32 unit											
758	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
759	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
760	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	0,00	0,00	36.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
761	1.06.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
762	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa peninjang urusan pemerintah daerah	62 laporan											
763	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1298 Laporan	7.060.000,00	7.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.060.000,00	7.060.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
764	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
765	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300.000,00	36.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	84 unit											
766	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	231.213.650,00	196.284.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.213.650,00	196.284.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
767	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
768	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	22.870.000,00	22.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.870.000,00	22.870.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
769	1.06.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
770	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
771	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
772	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya Presentase Masyarakat Miskin yang diberdayakan	40 persen											
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Presentase masyarakat miskin dan psks yang diberdayakan	40 persen											
773	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	272 Orang	0,00	89.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
774	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	102 Orang	36.037.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.037.500,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
775	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	0,00	140.074.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.074.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
776	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Keluarga	51.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.212.500,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
777	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Lembaga	73.550.000,00	73.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.550.000,00	73.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Presentase Warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke desa/kelurahan asal	100 persen											
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Presentase warga negara migran korban kekerasan yang dipulangkan	100 persen											
778	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal													
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, dan Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan dan Rehabilitas Sosial Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan Pengemis di luar panti sosial	1,40 persen 9292undefined persen											
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan Pengemis di luar panti sosial	9292undefined %undefined											
779	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
780	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	97 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
782	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	97 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
783	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2130 Orang	0,00	826.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.323.000,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
784	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat													
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	159.473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.473.000,00	0,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
785	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak													
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
786	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak													
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar gelandangan serta pengemis di luar panti sosial yang terlayani dan direhabilitasi sosial	497 orang											
787	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	8.074.200,00	8.074.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074.200,00	8.074.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
788	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	20.218.700,00	21.681.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.218.700,00	21.681.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
789	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial													
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	presentase pengelolaan data fakir miskin	85,16 persen											
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	presentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang ditangani	100 persen											
790	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	49000 Keluarga	54.652.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.652.200,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
791	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	49000 Keluarga	0,00	56.771.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.771.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
792	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga													
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Keluarga	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	Insentif Fiskal
793	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga													
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Keluarga	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	Insentif Fiskal
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani presentase meningkatnya penanganan kepada korban bencana alam dan bencana sosial	100 persen 100 persen											
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Korban Bencana yang ditangani presentase penanganan bagi korban bencana alam dan bencana sosial	100 persen 001100 %persen											
794	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
795	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
796	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
797	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	presentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	100 persen											
798	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
799	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana													
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	84 Orang	36.331.400,00	24.162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.331.400,00	24.162.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	meningkatkan presentase pengelolaan taman makam pahlawan	100 persen											
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	presentase pengelolaan taman makam pahlawan	100 persen											
800	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota													
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Tenaga Kerja Perempuan di Eksekutif, Legislatif dan Swasta meningkatnya persentase tenaga kerja perempuan di eksekutif,legislatif dan swasta	30 persen 31 persen											
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	presentase tenaga kerja perempuan di eksekutif,legislatif dan swasta	31 persen											
801	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
802	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
803	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Perangkat Daerah	61.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.470.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
804	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Perangkat Daerah	0,00	89.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.610.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
805	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
806	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	presentase partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	100 persen											
807	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi													
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan bagi perempuan korban kekerasan	100 persen											
808	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	40 Orang	14.140.000,00	8.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140.000,00	8.410.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	meningkatkan presentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 persenen											
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100 persenn											
809	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Dokumen	43.883.000,00	43.883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.883.000,00	43.883.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
810	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	presentase perempuan korban tindak kekerasan yang mendapat layanan pengaduan masyarakat	100 persen											
811	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	103.544.000,00	103.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.544.000,00	103.544.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	presentase meningkatnya peran keluarga dalam peningkatan kualitas anak	100 persen											
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya peran keluarga dalam pemenuhan kualitas anak	100 persen											
812	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	presentase tersedianya data informasi gender dan anak	100 persen											
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	presentase tersedianya dokumen informasi gender dan anak di kabupaten bangli	100 persen											
813	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	presentase terwujudnya kabupaten layak anak Tersedianya data informasi gender dan anak	100 persen 1 Pratama											
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	presentase terwujudnya kabupaten layak anak presentase terwujudnya kabupaten layak anak Tersedianya data informasi gender dan anak	100 persen 100 persen 1 Pratama											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
814	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2 Organisasi	0,00	45.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.140.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
815	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	2 Organisasi	40.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
816	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
817	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	8.235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	presentase lembaga penyedia layanan bagi anak yang di beri peningkatan kualitas	100 persen											
818	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
819	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu cakupan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak dilingkup daerah/kota	100 persen 100 persen											
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	presentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah/kota	100 persen											
820	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA													
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	160 Orang	0,00	60.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.437.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
821	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA													
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	160 Orang	60.437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.437.000,00	0,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	presentase pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah/kota	100 persen											
822	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK													
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	28 Orang	140.396.000,00	140.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.396.000,00	140.396.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
823	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota													
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
824	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/													
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	40 Orang	71.840.000,00	71.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.840.000,00	71.840.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
825	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota													
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
826	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dinas Lingkungan Hidup													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi Pemerintah Daerah	100 %											
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
827	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
828	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
829	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	313 Orang/bulan	26.624.418.000,00	26.349.358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.624.418.000,00	26.349.358.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
830	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	738.000,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
831	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0,00	5.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
832	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
833	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	20.398.800,00	20.398.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.398.800,00	20.398.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
834	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76 Paket	0,00	258.738.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.738.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
835	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	76 Paket	306.498.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.498.400,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
836	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	18.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.165.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
837	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	0,00	18.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.165.000,00	Penerimaan Pembiayaan
838	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
839	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
840	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
841	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	9.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940.000,00	0,00	Penerimaan Pembiayaan
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
842	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
843	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
844	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
845	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
846	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
847	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
848	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
849	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
850	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	49.647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.647.500,00	Penerimaan Pembiayaan
851	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	49.647.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.647.500,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
852	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	16.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
853	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	21.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
854	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	0,00	217.813.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.813.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
855	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	315.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.439.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
856	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	16.920.000,00	16.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920.000,00	16.920.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
857	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
858	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
859	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
860	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup												
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen RPPLH yang Tersusun												
861	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
862	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
863	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota													
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	0 Dokuman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
864	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota													
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokuman	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen KLHS yang Tersusun	100 %											
865	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD													
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0,00	98.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
866	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang													
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
867	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang													
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62 %											
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Tingkat Pencemaran Lingkungan Presentase jumlah sampah yang tertangani	100 % undefined undefined											
868	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	0,00	47.462.400,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.462.400,00	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup PENDAPATAN TRANSFER
869	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	49.962.800,00	0,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.962.800,00	0,00	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
870	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	0,00	6.928.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928.800,00	PENDAPATAN TRANSFER
871	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	6.928.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928.800,00	0,00	PENDAPATAN TRANSFER
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen IKLH yang Tersusun	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
872	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat													
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
873	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat													
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %											
874	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota													
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	7 Kegiatan	135.512.000,00	127.372.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.512.000,00	127.372.400,00	PENDAPATAN TRANSFER
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	16 %											
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan RTH	100 %											
875	2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya													
			Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
876	2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya													
			Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
877	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Ha	1.085.436.400,00	1.294.236.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.436.400,00	1.294.236.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Perijinan dan Pengawasan dalam Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)	76,68 %											
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah usaha penghasil limbah B3 yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	17 usaha											
878	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3													
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	20 Laporan	17.086.000,00	17.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.086.000,00	17.086.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Usaha/Kegiatan yang Memiliki Ijin Lingkungan dan PPLH	50 usaha											
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha/Kegiatan Yang Sudah Memiliki Ijin Lingkungan	100 %											
879	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH													
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	45 Dokumen	71.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.140.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
880	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH													
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	45 Dokumen	0,00	71.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.140.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal	60 %											
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terbinananya Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bangli	2 Desa											
881	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH													
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
882	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH													
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	60 %											
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Mengikuti Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup	68 Desa/Kelurahan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
883	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat													
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
884	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat													
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	68 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100 %											
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %											
885	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophl yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas	51.150.400,00	59.389.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.150.400,00	59.389.400,00	PENDAPATAN TRANSFER
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pananganan Pengaduan Lingkungan Hidup	70 %											
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Terkelolanya Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH	100 %											
886	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 Pengaduan	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
887	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	1 Pengaduan	16.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	71 %											
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
888	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan													
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	72 Kelompok	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Penerimaan Pembiayaan
889	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan													
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	72 Kelompok	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
890	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	37 Unit	0,00	72.305.800,00	0,00	1.680.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753.293.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
891	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	37 Unit	72.305.800,00	0,00	1.053.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.293.800,00	0,00	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
892	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional													
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	9 Ton	0,00	5.195.609.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.195.609.150,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
893	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional													
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	9 Ton	3.996.930.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996.930.650,00	0,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen											
894	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
895	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7.100.000,00	4.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	4.880.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
896	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	4.807.974.000,00	4.937.974.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807.974.000,00	4.937.974.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
897	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Diadministrasikan	100 Persen											
898	2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
899	2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen											
900	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.599.000,00	6.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.599.000,00	6.599.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
901	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.491.900,00	5.491.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491.900,00	5.491.900,00	Pendapatan Bagi Hasil
902	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	61.831.750,00	61.681.750,00	867.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.698.950,00	61.681.750,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
903	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.065.000,00	6.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065.000,00	6.065.000,00	Pendapatan Bagi Hasil
904	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120.000,00	8.120.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
905	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
906	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
907	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
908	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
909	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
910	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	19 Unit	0,00	0,00	24.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
911	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	0,00	0,00	47.433.150,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.433.150,00	30.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
912	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
913	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil
914	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
915	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
916	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	298.921.000,00	228.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.921.000,00	228.061.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
917	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	99.144.000,00	88.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.144.000,00	88.371.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
918	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
919	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
920	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	16.760.000,00	16.760.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.760.000,00	26.760.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
921	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
922	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
923	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	88 Persen											
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang didaftar	100 Persen											
924	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	200 Dokumen	7.695.000,00	6.697.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695.000,00	6.697.500,00	Pendapatan Bagi Hasil
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penataan Pendaftaran Penduduk	100 Persen											
925	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan													
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	7 Dokumen	354.510.000,00	385.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.510.000,00	385.860.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 Persen											
926	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	10.000.000,00	9.760.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.760.600,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
927	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	0,00	50.461.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.461.000,00	Insentif Fiskal Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
928	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen	318.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.572.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 Persen											
929	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk													
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	12 Laporan	6.232.000,00	5.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232.000,00	5.966.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	82 Persen											
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Pencatatan Sipil yang dilayani	100 Persen											
930	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	5 Paket	89.610.000,00	89.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.610.000,00	89.610.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 Persen											
931	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	12 Laporan	9.139.000,00	7.609.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.139.000,00	7.609.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
932	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	122.208.000,00	150.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.208.000,00	150.499.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
933	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
934	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil													
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Meningkatnya Data Kependudukan Yang Akurat	85 Persen											
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100 Persen											
935	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	80 Dokumen	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00	Pendapatan Bagi Hasil
936	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	15 Dokumen	4.032.000,00	702.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032.000,00	702.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 Persen											
937	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	18.240.000,00	16.245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.240.000,00	16.245.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
938	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	108.200.000,00	135.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.200.000,00	135.110.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 Persen											
939	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	6.840.000,00	4.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840.000,00	4.845.000,00	Pendapatan Bagi Hasil
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase Meningkatnya kualitas Penyusunan Profil Kependudukan	61 Persen											
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Profil Kependudukan Yang Disusun	100 Persen											
940	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain													
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	80 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
941	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	5.001.826.000,00	4.690.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001.826.000,00	4.690.251.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
942	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen											
943	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.012.000,00	4.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012.000,00	4.012.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
944	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	29.000.000,00	29.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	29.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
945	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	248.353.350,00	222.193.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.353.350,00	222.193.350,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
946	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.333.500,00	21.336.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.333.500,00	21.336.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
947	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8.940.000,00	8.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940.000,00	8.940.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
948	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
949	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	25.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.346.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
950	2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
951	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
952	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
953	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	9.600.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
954	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	96 Unit	300.850.600,00	241.208.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.850.600,00	241.208.950,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
955	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900.000,00	21.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
956	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase desa yang melakukan penataan desa	10,30 Persen											
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Tertatanya desa yang baik	100 Persen											
957	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa													
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	2.200.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	218.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
958	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	14 Unit	2.680.000,00	2.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Prosentase desa dalam meningkatkan kerjasama desa	100 Persen											
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa	100 Persen											
959	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	68 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase administrasi pemerintahan desa yang baik	80 Persen											
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tertatnya administrasi pemerintahan desa yang baik	72 Desa/Kelurahan											
960	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	68 Dokumen	215.095.000,00	104.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.095.000,00	104.030.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
961	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	14 Dokumen	58.858.000,00	952.458.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.858.000,00	952.458.716,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
962	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	272 Orang	149.138.500,00	16.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.138.500,00	16.886.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
963	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	68 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
964	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	14 Dokumen	71.838.500,00	52.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.838.500,00	52.470.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
965	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	5 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
966	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa													
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	14 Dokumen	6.255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
967	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	14 Dokumen	30.617.000,00	24.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.617.000,00	24.860.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
968	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD													
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	68 Orang	33.840.000,00	8.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.840.000,00	8.880.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
969	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5 Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
970	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	14 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
971	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	5 Dokumen	8.500.000,00	2.332.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	2.332.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Prosentase lembaga kemasyarakatan dalam menunjang pemberdayaan masyarakat	42,60 Persen											
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya lembaga Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	72 Desa/Kelurahan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
972	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	22 Dokumen	245.266.000,00	434.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.266.000,00	434.765.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
973	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	5 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
974	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	13 Laporan	37.982.000,00	34.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.982.000,00	34.988.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
975	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	72 Laporan	19.910.000,00	25.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.910.000,00	25.160.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
976	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	15 Dokumen	2.145.900.000,00	2.074.059.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.900.000,00	2.074.059.500,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani (unmeet need)	4,3 Persen											
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tercapainya Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100 Persen											
977	2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
978	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal													
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
979	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga													
			Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
980	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana													
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Jumlah Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen											
981	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan													
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
982	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga													
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
983	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga													
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
984	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga													
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	435 Dokumen	392.850.000,00	523.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.850.000,00	523.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
985	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga													
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	4 Laporan	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
986	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB													
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	4 Dokumen	120.420.000,00	130.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.420.000,00	130.620.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
987	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain													
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
988	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)													
			Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	10 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) bagi pasangan usia subur	86,1 Persen											
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tercapainya Jumlah Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	100 Persen											
989	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
990	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana													
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3000 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
991	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	148.800.000,00	148.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.800.000,00	148.800.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
992	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)													
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
993	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokumen	91.400.000,00	91.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.400.000,00	91.400.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
994	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal													
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
995	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja													
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	8 Organisasi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tercapainya Jumlah Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 Persen											
996	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB													
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	26 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
997	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)													
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	435 Orang	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000.000,00	216.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
998	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB													
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	4 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
999	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)													
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Jumlah Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen											
1000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24 Laporan	53.100.000,00	53.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100.000,00	53.100.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
1001	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3000 Orang	225.786.000,00	225.786.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.786.000,00	225.786.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
1002	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB													
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	132 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1003	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1004	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	48 Laporan	35.650.000,00	35.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.650.000,00	35.650.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
1005	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi													
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1006	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak													
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1007	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria													
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1008	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	80 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1009	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan													
			Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	250 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Tercapainya Jumlah Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 Persen											
1010	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	35 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1011	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB													
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	17 Dokumen	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
1012	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas													
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	17 Kampung	238.500.000,00	238.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.500.000,00	238.500.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pelaksanaa Pembinaan terhadap seluruh Poktan	100 Persen											
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tercapinya Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Keleluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 Persen											
1013	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)													
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	18 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1014	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3770 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1015	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	2 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB
1016	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	5000 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1017	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1018	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	58 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1019	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	4 Orang	1.273.020.000,00	1.273.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.020.000,00	1.273.020.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1020	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)													
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	1 Kelompok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tercapainya Jumlah Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100 Persen											
1021	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)													
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1022	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja													
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dinas Perhubungan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 %											
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	46 Orang / Bulan											
1023	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	4.603.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.329.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1024	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	0,00	4.603.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603.329.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
1025	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1026	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	82 Paket	87.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan											
1027	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1.506.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.500,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1028	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	0,00	1.506.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1029	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	8.291.200,00	8.291.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.291.200,00	8.291.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1030	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	182.291.100,00	197.591.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.291.100,00	197.591.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1031	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	70.800.000,00	105.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800.000,00	105.130.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1032	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00	5.220.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1033	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	59.240.000,00	152.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.240.000,00	152.520.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
1034	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1035	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	60.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.860.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan											
1036	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1037	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	50.300.000,00	50.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300.000,00	50.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1038	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	152.070.000,00	130.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.070.000,00	130.860.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15 Unit											
1039	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	249.134.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.134.600,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1040	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	0,00	202.835.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.835.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1041	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	22.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.840.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1042	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	0,00	22.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1043	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1044	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	20,84 %											
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5 Jenis											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1045	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	0 Unit	1.505.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.209.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1046	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 Unit	0,00	1.611.718.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.718.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terbayarnya Insentif Petugas Parkir	1 Dokumen											
1047	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	108.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.816.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1048	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00	108.817.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.817.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	terlaksananya Pengujian Kendaraan Bermotor	8425 Unit											
1049	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	8425 Unit	239.946.500,00	244.216.500,00	74.280.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.226.500,00	296.216.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang aman dan tertib	1 Dokumen											
1050	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	779.991.600,00	699.680.600,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.991.600,00	699.680.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Lomba WTN untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen											
1051	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin													
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	1 Laporan	72.942.000,00	30.042.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.942.000,00	30.042.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1052	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	65.090.000,00	64.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.090.000,00	64.265.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1053	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pengelolaan Pelayaran	21,83 %											
	2.15.03.2.05	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	terciptanya Keamanan Penyebrangan Danau Batur	1 Laporan											
1054	2.15.03.2.05.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	66.611.500,00	44.972.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.611.500,00	44.972.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 %											
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %											
1055	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1056	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1057	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 Orang/bulan	4.212.433.658,00	4.117.661.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.212.433.658,00	4.117.661.758,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
1058	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1059	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.294.800,00	1.307.800,00	111.222.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.517.550,00	1.307.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1060	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	34.150.200,00	34.150.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.150.200,00	34.150.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1061	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1062	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1063	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1064	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	99.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.930.000,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1065	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1066	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	91.524.000,00	91.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.524.000,00	91.524.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1067	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	85.920.000,00	65.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.920.000,00	65.760.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1068	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	44.694.500,00	45.879.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.694.500,00	45.879.150,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1069	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1070	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1071	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	9.990.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Prosentase Pengembangan Komunikasi,Informasi dan media Massa	100 %											
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Informasi danKomunikasi Publik yang Tersampaikan	100 %											
1072	2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1073	2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1074	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1075	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1076	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	762.787.700,00	1.037.312.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.787.700,00	1.037.312.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1077	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	48.571.300,00	36.481.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.571.300,00	36.481.850,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1078	2.16.02.2.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1079	2.16.02.2.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1080	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas													
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	864.071.000,00	966.725.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.071.000,00	966.725.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase layanan SPBE yang di bangun	74 %											
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Domaimn dan Sub Domain yang dikelola	2 Layanan											
1081	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah													
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	217 Unit	1.263.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.700.000,00	0,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
1082	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah													
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	217 Unit	0,00	1.263.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.700.000,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen E-Gov yang terselesaikan	13 Dokumen											
1083	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik													
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 Unit	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1084	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik													
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1085	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah													
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Layanan	0,00	610.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1086	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah													
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Layanan	610.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.100.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1087	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas													
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	1.295.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.250,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1088	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas													
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	0,00	1.295.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1089	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah													
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	0,00	213.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1090	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah													
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	188.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.830.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya Data Statistik Sektoral	100 %											
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data tentang Kabupaten Bangli	1 Profil											
1091	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	42.000.000,00	19.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	19.664.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1092	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral													
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1093	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral													
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Prosentase Keamanan SPBE	100 %											
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Dokumen nPersandian terhadap kebutuhan	100 %											
1094	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	32.408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.408.500,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1095	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	0,00	31.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.012.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1096	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1097	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1098	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1099	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	101.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.750.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1100	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	30 Perangkat Daerah	17.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.610.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1101	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	29 Perangkat Daerah	0,00	17.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.610.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	20 %											
1102	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	29 Perangkat Daerah	0,00	14.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1103	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	30 Perangkat Daerah	14.520.000,00	0,00	27.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.420.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	prosentase informasi ketenagakerjaan	100 persen											
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Prosentase informasi ketenagakerjaan	100 persen											
1104	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro													
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1105	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro													
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1106	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro													
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	0 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1107	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro													
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	0 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	prosentase jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	93 persen											
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	prosentase peningkatan kompetensi calon tenaga kerja	0 persen											
1108	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1109	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi													
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	220 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1110	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja													
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1111	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja													
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1112	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1113	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1114	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi													
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1115	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi													
			Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	32 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	prosentase terbinanya lembaga latihan kerja	100 Lembaga											
1116	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta													
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	14 Lembaga	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1117	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	14 Lembaga	0,00	42.920.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.920.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	prosentase jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan	81,25 persen											
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelayanan antar kerja	100 persen											
1118	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan													
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1119	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan													
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	prosentase meningkatnya pengelolaan informasi pasar kerja	0 persen											
1120	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online													
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1121	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online													
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1122	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja													
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	70 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1123	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja													
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pekerja migran yang dilatih	100 persen											
1124	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)													
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1125	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)													
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1126	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan													
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1127	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan													
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	74,12 persen											
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	prosentase perusahaan yang didata dan diberi sosialisasi tentang peraturan ketenagakerjaan	72 persen											
1128	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan													
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 Laporan	0,00	20.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.555.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1129	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan													
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 Laporan	33.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	prosentase penyelesaian perselisihan perusahaan	0 persen											
1130	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	0 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1131	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1132	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terseseaikan	5 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1133	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										Sumber Dana
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	0 Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1134	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi													
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1135	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi													
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1136	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1137	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1138	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja													
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1139	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja													
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 persen											
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersediannya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	60 persen											
1140	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1141	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1142	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1143	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersediannya administrasi keuangan perangkat daerah	60 persen											
1144	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	5.071.774.000,00	5.091.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071.774.000,00	5.091.774.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1145	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1146	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1147	2.17.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1148	2.17.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan													
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1149	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1150	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1151	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1152	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran													
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersediannya administrasi kepegawaian perangkat daerah	60 persen											
1153	2.17.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	53 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1154	2.17.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai													
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1155	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	53 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1156	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1157	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1158	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersediannya administrasi umum perangkat daerah	56,41 persen											
1159	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1160	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1161	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.664.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.200,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1162	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	0,00	2.664.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.200,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1163	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1164	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1165	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	0,00	189.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.456.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1166	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	186.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.936.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1167	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	13.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.982.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1168	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	0,00	14.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1169	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1170	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1171	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1172	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material													
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1173	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1174	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1175	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1176	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersediannya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen											
1177	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1178	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1179	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1180	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1181	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1182	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	0,00	58.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1183	2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1184	2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1185	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1186	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1187	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1188	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersediannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	57,70 persen											
1189	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1190	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	56.535.000,00	123.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.535.000,00	123.385.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1191	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	91.100.000,00	91.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.100.000,00	91.250.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah urusan pemerintah daerah	58,46 persen											
1192	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	70.640.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.640.900,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1193	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	0,00	67.046.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.046.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1194	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	8.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1195	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	0,00	8.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1196	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1197	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	prosentase koperasi yang difasilitasi IUSP dan Ijin operasional	8,86 persen											
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	prosentase koperasi yang difasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam	8,86 persen											
1198	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1199	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	prosentase koperasi yang difasilitasi penerbitan ijin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam	0 persen											
1200	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1201	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	prosentase koperasi aktif	83,57 persen											
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	prosentase koperasi yang diperiksa dan diawasi	83,57 persen											
1202	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	0,00	66.010.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.010.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1203	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	20 Unit Usaha	56.822.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.822.200,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	prosentase koperasi yang sehat dan berkualitas	60,60 persen											
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	prosentase koperasi yang dinilai	60,60 persen											
1204	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	40 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1205	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	prosentase peningkatan profesionalisme pengelola koperasi	70,90 persen											
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	prosentase profesionalisme pengelola koperasi yang dilatih	70,90 persen											
1206	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi													
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	90 Orang	261.938.000,00	261.938.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.938.000,00	261.938.000,00	DAK Non Fisik-PK2UKM Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	prosentase struktur permodalan dan usaha koperasi	59,76 persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	prosentase koperasi yang difasilitasi	59,76 persen											
1207	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1208	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya													
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1209	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha													
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	34 Unit Usaha	58.427.700,00	39.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.427.700,00	39.698.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	prosentase wirausaha baru	6,47 persen											
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	prosentase wirausaha baru	6,47 persen											
1210	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro													
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	275 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1211	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro													
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1212	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro													
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1213	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro													
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	175 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1214	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro													
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1215	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro													
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1216	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro													
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1217	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro													
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	150 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1218	2.17.07.2.01.0012	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah													
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	87.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.550.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1219	2.17.07.2.01.0012	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah													
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	50 Unit Usaha	0,00	102.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.749.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1220	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro													
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1500 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1221	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro													
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1222	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan													
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	130 Orang	575.997.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.997.320,00	0,00	DAK Non Fisik-PK2UKM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1223	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	130 Orang	0,00	575.997.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.997.320,00	DAK Non Fisik-PK2UKM PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	prosentase pelaku usaha kecil yang berdaya saing	12 persen											
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	prosentase pelaku usaha kecil yang berdaya saing	12 persen											
1224	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro													
			0	200 0	0,00	321.000,00	0,00	37.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.296.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1225	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro													
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1226	2.17.08.2.01.0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro													
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	320 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 %											
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
1227	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1228	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1229	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	5.721.304.000,00	5.761.304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.721.304.000,00	5.761.304.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
1230	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	746.000,00	746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.000,00	746.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1231	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.947.700,00	1.947.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.700,00	1.947.700,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1232	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	151.556.300,00	151.456.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.556.300,00	151.456.300,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1233	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	5.532.400,00	5.732.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532.400,00	5.732.400,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1234	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1235	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	682.500,00	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.500,00	682.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1236	2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1237	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1238	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	19.190.000,00	19.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.190.000,00	19.010.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1239	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	62.820.000,00	37.770.000,00	8.271.352.450,00	8.271.352.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334.172.450,00	8.309.122.450,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1240	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1241	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1242	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1243	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	148.750.000,00	151.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.750.000,00	151.750.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1244	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	137.130.000,00	132.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.130.000,00	132.570.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1245	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	89.459.400,00	66.131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.459.400,00	66.131.200,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1246	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	8.560.000,00	8.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560.000,00	8.560.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1247	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi	850,00 Milyar Rupiah											
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen											
1248	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal													
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 Dokumen	5.180.000,00	5.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180.000,00	5.210.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1249	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko													
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	3 Dokumen	6.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780.000,00	3.780.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang disusun.	3 Dokumen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1250	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1251	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota													
			Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	3 Dokumen	30.265.700,00	58.855.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.265.700,00	58.855.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor (PMA/PMDN)	875 Investor											
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	2 kali											
1252	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	31.446.000,00	59.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.446.000,00	59.886.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1253	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,67 Indeks											
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan	96,97 %											
1254	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah													
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	1 Kegiatan Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1255	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	495 Pelaku Usaha	0,00	115.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.780.000,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1256	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	495 Pelaku Usaha	82.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.090.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1257	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko													
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	125 Pelaku Usaha	23.490.000,00	24.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.490.000,00	24.715.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1258	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko													
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	480 Kegiatan Usaha	63.444.000,00	88.824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.444.000,00	88.824.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	51,67 %											
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	70 Perusahaan											
1259	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya													
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60 Kegiatan Usaha.	95.165.000,00	95.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.165.000,00	95.165.000,00	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
1260	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	60 Pelaku Usaha	348.941.000,00	348.941.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.941.000,00	348.941.000,00	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal
1261	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal													
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60 Kegiatan Usaha	224.340.000,00	224.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.340.000,00	224.340.000,00	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase Peningkatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik	80 %											
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen											
1262	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	15.540.000,00	26.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540.000,00	26.640.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	persentase peningkatan desa adat serta subak dan subak abian yang dikelola dengan nilai-nilai sad kerthi	33,02 persen											
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengelolaan objek /unsur kebudayaan	23 Objek											
1263	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	23 Objek	530.675.000,00	455.381.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.675.000,00	455.381.000,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah jenis kesenian yang terdata	1 jenis data											
1264	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya													
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1265	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya													
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1266	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1267	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan													
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	0 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengantunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga adat yang ditingkatkan kapasitasnya	95 objek lembaga adat											
1268	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	970 Objek	61.756.193.000,00	37.774.448.200,00	60.672.000,00	88.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.816.865.000,00	37.862.695.200,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
1269	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	jumlah penyelenggaraan presentasi seni dan budaya	25 sekaa											
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengembangan seni budaya daerah	25 sekaa/sa nggar											
1270	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	70 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1271	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1272	2.22.03.2.01.0002	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	0 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1273	2.22.03.2.01.0002	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan													
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	30 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1274	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional													
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Lembaga	9.839.850.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854.850.000,00	0,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
1275	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15 Lembaga	0,00	5.430.820.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445.820.000,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	jumlah simpul-simpul sejarah yang dilindungi/dikembangkan/di manfaatkan/dibina	1 dokumen											
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembinaan sejarah	0 simpul sejarah											
1276	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1277	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1278	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah													
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1279	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah													
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	prosentase cagar budaya yang ditetapkan sebagai warisan budaya bali	2,57 persen											
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah cagar budaya yang ditetapkan	22 cagar budaya											
1280	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	22 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1281	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya													
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1 Objek	0,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 persen											
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen											
1282	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1283	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	19.982.000,00	2.882.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.982.000,00	2.882.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 orang											
1284	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang/bulan	0,00	5.579.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579.867.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
1285	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	5.729.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729.867.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
1286	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1287	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0,00	1.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen											
1288	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1289	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.549.500,00	4.549.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549.500,00	4.549.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1290	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	467.250.500,00	531.420.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.250.500,00	531.420.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
1291	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	91.684.500,00	31.574.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.684.500,00	31.574.625,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1292	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	4.080.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1293	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1294	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1295	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	Penerimaan Pembiayaan
1296	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Penerimaan Pembiayaan
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 unit											
1297	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1298	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1299	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1300	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1301	3.26.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1302	3.26.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen											
1303	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	47.200.000,00	47.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200.000,00	47.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1304	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 Laporan	162.275.500,00	204.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.275.500,00	204.911.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1305	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	23.100.000,00	23.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100.000,00	23.280.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30 unit											
1306	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	128.004.000,00	126.058.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.004.000,00	126.058.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1307	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420.000,00	12.420.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1308	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1309	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	persentase pengembangan destinasi pariwisata	79,00 persen											
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	prosentase daya tarik wisata sesuai dengan tahapan pengembangan rintisan berkembang,pemantapan,revitalisasi	100 persen											
1310	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1311	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1312	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	18.471.772.000,00	22.846.190.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.471.772.000,00	22.846.190.667,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	jumlah prosentase pengadaan /pemeliharaan /rehabilitasi/sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata	100 persen											
1313	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	4 Unit	0,00	303.567.999,72	0,00	5.716.135.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.019.703.869,72	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah
1314	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	247.428.000,00	0,00	5.366.137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.613.565.000,00	0,00	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Transfer Antar Daerah
1315	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1316	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Lokasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1317	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase industri pariwisata yang memiliki sertifikat standar sertifikasi	40 persen											
1318	3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota													
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1319	3.26.02.2.04.0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota													
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase Pemasaran Pariwisata	80 persen											
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	persentase penyelenggaraan pemasaran dalam dan luar negeri daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	80 persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1320	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1321	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1322	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	145.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.300.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
1323	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	0,00	114.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.060.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
1324	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1325	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota													
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1326	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	0,00	129.712.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.712.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
1327	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi	152.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.102.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	15 persen											
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	15 persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1328	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1329	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1330	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1331	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan SDM Pariwisata	77,78 persen											
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	50,78 persen											
1332	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif													
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
1333	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif													
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	300 Orang	1.175.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.744.000,00	0,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
1334	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI													
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	180 Orang	0,00	706.046.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.046.400,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
1335	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata													
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	120 Orang	0,00	469.697.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.697.600,00	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	prosentase pelaksanaan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	20 persen											
1336	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	20 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1337	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Prosentase infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang diadakan	18,18 %											
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase infrastruktur dan seluruh kemandirian pangan yang diadakan	18,18 %											
1338	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya													
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1339	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya													
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase tingkat diversivikasi pangan masyarakat	16,86 %											
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase harga pangan pokok terpantau	8,11 %											
1340	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	42.408.000,00	38.398.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.408.000,00	38.398.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1341	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya													
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	6 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Insentif Fiskal
1342	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota													
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	33.374.000,00	29.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.374.000,00	29.495.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase laporan pola konsumsi dan suplai pangan tersedia	16,67 %											
1343	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	59.734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.734.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1344	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun													
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	0,00	25.844.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.844.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kasus kerawanan pangan menurun	18,30 %											
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase laporan ketahanan pangan tersedia	16,67 %											
1345	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan													
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	0,00	24.320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.320.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1346	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan													
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	20.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase karawanan pangan kabupaten terpantau	19,94 %											
1347	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1348	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	24.979.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.979.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1349	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota													
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1350	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota													
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	persentase skor pola pangan harapan	95,30 %											
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	informasi pemantauan mutu dan keamanan pangan tersedia	1 Dokumen											
1351	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.484.000,00	25.880.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.484.000,00	25.880.700,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pendapatan masyarakat meningkat	23,91 %											
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase prasarana usaha perikanan tangkap tersedia	19,35 %											
1352	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap													
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	60 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1353	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap													
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	24,97 %											
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produktifitas Perikanan Budidaya	3,82 %											
1354	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1355	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1356	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16 Unit	283.299.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.299.800,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1357	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	16 Unit	0,00	293.649.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.649.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1358	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	30 Dokumen	101.179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.179.800,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1359	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	30 Dokumen	0,00	111.529.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.529.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1360	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat													
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1361	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat													
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1362	3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat													
			Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	0,5 Ha	0,00	654.164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.164.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1363	3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat													
			Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	0,5 Ha	633.464.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.464.800,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Indeks Konsumsi Ikan	30,94 %											
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Produktifitas perikanan budidaya	3,82 %											
1364	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1365	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terfasilitasnya promosi produk unggulan daerah	2 Unit Usaha											
1366	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil													
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha	0,00	26.017.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.017.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1367	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil													
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 Unit Usaha	26.017.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.017.800,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	persentase pengetahuan dan kesehatan masyarakat meningkat	16,74 %											
1368	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Ton	294.335.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.335.800,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1369	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Ton	0,00	299.222.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.222.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 %											
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %											
1370	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	27.189.000,00	8.494.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.189.000,00	8.494.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %											
1371	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	258 Orang/bulan	26.059.243.500,00	25.780.760.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.059.243.500,00	25.780.760.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	100 %											
1372	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.456.000,00	10.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.456.000,00	10.456.000,00	Pendapatan Bagi Hasil
1373	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.703.000,00	12.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.703.000,00	12.743.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1374	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	249.720.000,00	270.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.720.000,00	270.720.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1375	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.789.000,00	15.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.789.000,00	15.789.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1376	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340.000,00	5.340.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1377	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											
1378	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5.660.000,00	5.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660.000,00	5.660.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1379	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	162.969.000,00	178.719.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.969.000,00	178.719.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1380	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	200.444.000,00	211.564.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.444.000,00	211.564.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1381	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	54.520.000,00	27.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.520.000,00	27.020.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1382	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1383	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian dalam kondisi baik	19,19 %											
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	27,89 %											
1384	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi													
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	8 Laporan	457.606.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.606.500,00	0,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Insentif Fiskal Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1385	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi													
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	8 Laporan	0,00	493.235.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.235.335,00	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Insentif Fiskal Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1386	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	0,00	42.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.282.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1387	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	40.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.298.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan	5,81 %											
1388	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1389	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman													
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1390	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman													
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	0 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1391	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman													
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1392	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan													
			Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 laporan	0,00	141.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.365.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1393	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan													
			Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 laporan	130.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.600.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase bibit ternak yang diadakan	%											
1394	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain													
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	0 Ekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1395	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain													
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	7 Ekor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	23,81 %											
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase perencanaan pembangunan prasarana pertanian	33 %											
1396	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya													
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1397	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya													
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1398	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian													
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1399	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian													
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase pembangunan prasarana pertanian	14,29 %											
1400	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian													
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1401	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian													
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1402	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8 Unit	0,00	624.677.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.677.000,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Insentif Fiskal Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1403	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9 Unit	809.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.002.000,00	0,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Insentif Fiskal Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1404	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit													
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1405	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit													
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1406	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air													
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1407	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air													
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1408	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	0,00	41.970.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.970.000,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1409	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya													
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	43.300.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.300.000,00	0,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1410	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani													
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1411	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani													
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase kasus penyakit ternak menurun	3,58 %											
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Coverage Vaksinasi Rabies	17,61 %											
1412	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular													
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	2 Laporan	276.700.000,00	305.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.700.000,00	305.605.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dikelola	17,61 %											
1413	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner													
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	0,00	54.187.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.187.800,00	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
1414	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner													
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kelompok yang dibina dalam pengendalian OPT	17,95 %											
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang dibina	17,95 %											
1415	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	581 Ha	45.750.000,00	38.104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750.000,00	38.104.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1416	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	2 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1417	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis													
			Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	0 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyelenggaraan penyuluh pertanian	18,70 %											
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase penyelenggaraan penyuluh pertanian	15,82 %											
1418	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa													
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1419	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa													
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1420	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa													
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Unit	181.230.000,00	161.313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.230.000,00	161.313.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1421	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Unit	111.800.000,00	131.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800.000,00	131.421.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1422	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1423	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen											
1424	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	27.369.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.369.600,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1425	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	0,00	27.369.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.369.600,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen											
1426	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1427	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
1428	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	384.631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.631.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1429	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	567.251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.251.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	5,42 Persen											
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	2,59 Persen											
1430	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C													
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1431	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C													
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	2,83 Persen											
1432	3.30.02.2.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	20 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1433	3.30.02.2.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1434	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1435	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	20 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Distribusi Perdagangan	100 Persen											
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit											
1436	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	0,00	219.910.100,00	0,00	3.751.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971.265.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1437	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	246.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.320.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	12 dokumen											
1438	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1439	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1440	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	0,00	1.445.570.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.570.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1441	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	727.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.800.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Stabilnya Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 Persen											
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 Persen											
1442	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1443	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1444	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	15.952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.952.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1445	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	0,00	13.732.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.732.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Nilai Ekspor	1,70 Persen											
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1,70 Persen											
1446	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1447	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional													
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	43,00 Persen											
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	43,00 Persen											
1448	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang													
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	6500 Unit	27.830.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.830.800,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1449	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang													
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	6500 Unit	0,00	28.624.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.624.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1450	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal													
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1451	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal													
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	6500 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pemasaran Produk Dalam Negeri												
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3,07 persen											
1452	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1453	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	30 UMKM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah	100 Persen											
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48 Orang/Bulan											
1454	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	0,00	4.896.168.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.896.168.525,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1455	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	4.996.168.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996.168.525,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1456	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	0,00	47.606.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.606.700,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum
1457	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	28.356.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.356.700,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen											
1458	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	0,00	5.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1459	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	5.097.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1460	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1461	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	0,00	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1462	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	296.488.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.488.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1463	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	376.248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.248.500,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1464	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	0,00	63.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.470.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1465	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	25.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.970.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1466	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1200 Dokumen	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1467	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1200 Dokumen	0,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1468	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1469	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
1470	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1471	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
1472	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1473	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Laporan	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1474	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	146.631.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.631.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1475	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	146.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.811.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Penyediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen											
1476	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	0,00	73.337.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.337.700,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1477	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	96.865.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.865.400,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1478	3.31.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1479	3.31.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1480	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	14.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1481	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	0,00	14.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1482	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1483	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Berbasis Budaya	30,01 Persen											
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	30,01 Persen											
1484	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10 Dokumen	2.306.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.141.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1485	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10 Dokumen	0,00	2.306.141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306.141.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1486	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	345.240.000,00	0,00	5.345.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690.240.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1487	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	0,00	393.261.000,00	0,00	5.345.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738.261.000,00	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1488	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	0,00	162.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.106.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1489	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	207.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.106.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya Pengendalian Ijin Usaha Industri	9,56 Persen											
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	9,56 Persen											
1490	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1491	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)													
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional												
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan												
1492	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1493	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Sekretariat Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 Persen											
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
1494	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan	24.407.957.800,00	23.593.957.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.407.957.800,00	23.593.957.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen											
1495	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12.670.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670.000.000,00	0,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1496	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	0,00	8.665.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
1497	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1498	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	993.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.620.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1499	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	824.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.620.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
1500	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	382.400.000,00	446.399.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.400.000,00	446.399.600,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1501	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	617.691.500,00	352.777.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.691.500,00	352.777.600,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahn ketentuan	100 Persen											
1502	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	825.480.000,00	825.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.480.000,00	825.480.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat													
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-											
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-											
1503	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi													
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	50 Kepala Keluarga	42.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.505.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1504	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi													
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	50 Kepala Keluarga	0,00	19.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.102.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase penyelesaian administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 Persen											
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Tersusunnya Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	3 Jenis											
1505	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	155 Dokumen	735.772.200,00	671.919.700,00	8.469.000,00	8.469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.241.200,00	680.388.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1506	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1507	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1508	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	75.086.300,00	70.081.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.086.300,00	70.081.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3 Jenis											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1509	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	19.316.287.900,00	44.382.599.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.316.287.900,00	44.382.599.800,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1510	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial													
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	48.602.000,00	16.427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.602.000,00	16.427.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1511	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	20 Dokumen	78.312.000,00	65.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.312.000,00	65.012.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Jenis											
1512	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah													
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1513	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah													
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	251.556.000,00	127.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.556.000,00	127.741.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1514	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum													
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	634.608.300,00	519.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.608.300,00	519.797.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1515	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum													
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	50 Dokumen	148.700.700,00	226.067.000,00	44.842.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.542.700,00	226.067.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1 Tahun											
1516	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	66.983.200,00	20.148.500,00	9.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.012.200,00	20.148.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
		Asisten Perekonomian dan Pembangunan													
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan pelayanan fasilitasi administrasi perekonomian dan pembangunan	90.67 Persen											
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	17 Dokumen											
1517	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	7.590.300,00	5.927.800,00	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.090.300,00	5.927.800,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1518	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	9 Laporan	276.519.500,00	218.412.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.519.500,00	218.412.800,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1519	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil													
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	15.660.000,00	14.143.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.660.000,00	14.143.800,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1520	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	3 Dokumen	23.443.700,00	21.528.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.443.700,00	21.528.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	17 Dokumen											
1521	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan													
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitati Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	44.768.000,00	44.768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.768.000,00	44.768.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1522	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	331.620.000,00	81.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.620.000,00	81.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1523	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	60.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.390.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1524	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	0,00	62.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.430.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Jenis											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1525	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	117.126.100,00	79.442.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.126.100,00	79.442.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1526	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik													
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	52.687.500,00	52.687.500,00	14.186.400,00	74.186.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.873.900,00	126.873.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1527	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	29 Orang	130.153.000,00	63.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.153.000,00	63.220.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Tersusunnya Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	2 Dokumen											
1528	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	8.136.500,00	6.114.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136.500,00	6.114.900,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
		Asisten Administrasi Umum													
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan Peningkatan Kualitas Pembinaan Perpustakaan	33.30 Persen											
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikelola	30 Perpustakaan											
1529	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik													
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	1 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1530	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik													
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1531	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan													
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	0,00	2.973.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1532	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan													
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	30 Perpustakaan	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1533	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	0 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1534	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	12 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1535	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44 Orang	9.640.000,00	6.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640.000,00	6.385.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1536	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota													
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	20 Layanan	6.850.000,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850.000,00	3.525.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1537	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka													
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	3426 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1538	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka													
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	0 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1539	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka													
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	3426 Eksemplar	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1540	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1541	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi dan lomba	44 Sekolah											
1542	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat													
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	0 Lokus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1543	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat													
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	44 Lokus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1544	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	7 Orang	86.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.040.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1545	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca													
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	7 Orang	0,00	108.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.740.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	PERSENTASE PENINGKATAN PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	33,33 Persen											
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	20 Naskah Kuno											
1546	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno													
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1547	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno													
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1548	2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan													
			Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	80 Eksemplar	8.055.000,00	6.392.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055.000,00	6.392.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Instansi Pemerintah yang pengelolaan kearsipannya mengacu pada peraturan perundang-undangan	49.38 Persen											
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat Daerah yang Arsip Dinamis diawasi dan dikelola	30 OPD											
1549	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis													
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	860 Berkas	2.149.000,00	2.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.000,00	2.149.000,00	Pendapatan Bagi Hasil
1550	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Laporan	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.000,00	1.735.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Statis Yang Dikelola Kabupaten/Kota	57.89 Persen											
1551	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis													
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	3 Arsip	0,00	996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1552	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis													
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	3 Arsip	996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Informasi Simpul Jaringan Nasional Yang Dilestarikan dan Unit Kearsipan Yang Dibina dan Diberdayakan	25 OPD											
1553	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN													
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	41 Pengguna	747.000,00	747.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.000,00	747.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1554	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	33 Laporan	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan Dokumen/arsip daerah yang dilestarikan	8.16 Persen											
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	jumlah Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang	2 Jenis											
1555	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)													
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	2 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1556	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH													
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 Persen											
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen											
1557	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	277.680.000,00	234.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.680.000,00	234.480.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
1558	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.857.500,00	9.857.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.857.500,00	9.857.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1559	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	131.097.200,00	0,00	397.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.329.200,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1560	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0,00	156.097.200,00	0,00	659.325.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.423.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1561	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1562	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.238.766.700,00	1.697.236.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.766.700,00	1.697.236.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1563	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	109.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.794.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1564	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	0,00	122.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.544.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1565	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.400.000.000,00	1.201.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000.000,00	1.201.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1566	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1567	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1568	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1569	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1570	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1571	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1572	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1573	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1574	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1575	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
1576	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	320.050.000,00	789.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.050.000,00	789.050.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1577	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	923.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.500.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1578	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	1.064.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
1579	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	45.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.365.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1580	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	0,00	63.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.685.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1581	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	322.577.000,00	357.457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.577.000,00	357.457.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1582	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	32.590.000,00	40.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.590.000,00	40.540.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1583	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	360.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000.000,00	680.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen											
1584	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil
1585	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1586	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1587	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga	100 Persen											
1588	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	48 Paket	980.000.000,00	980.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000.000,00	980.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil
1589	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	48 Paket	720.000.000,00	720.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000.000,00	720.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Tersusunnya Dokumen Penataan Organisasi	100 Persen											
1590	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan													
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	94.819.500,00	84.762.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.819.500,00	84.762.800,00	Pendapatan Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1591	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	63.421.800,00	51.896.900,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.921.800,00	51.896.900,00	Pendapatan Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1592	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	217.942.400,00	92.517.400,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.442.400,00	92.517.400,00	Pendapatan Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 Persen											
1593	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	1.708.620.000,00	2.091.443.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708.620.000,00	2.091.443.600,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1594	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	390.700.500,00	309.826.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.700.500,00	309.826.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1595	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan													
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	326.152.300,00	220.959.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.152.300,00	220.959.100,00	Pendapatan Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
		Sekretariat DPRD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
	4.02	SEKRETARIAT DPRD													
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	meningkatnya indek Repormasi Birokrasi	65 %											
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %											
1596	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.178.434.000,00	4.029.599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178.434.000,00	4.029.599.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut kelengkapannya	100 %											
1597	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	240.910.000,00	232.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.910.000,00	232.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan Tersedianya Bahan Logistik Kantor Tersedianya Fasilitas kunjungan Tamu Tersedianya Komponen instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	100 % 100 % 100 % 100 % 100 %											
1598	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.010.000,00	6.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010.000,00	6.010.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1599	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	420.094.600,00	411.344.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.094.600,00	411.344.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1600	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	69.869.600,00	69.869.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.869.600,00	69.869.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1601	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	487.350.000,00	513.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.350.000,00	513.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1602	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	126.250.000,00	126.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.250.000,00	126.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya Tersedianya sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100 % 100 %											
1603	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	0,00	0,00	111.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.195.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1604	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	494.415.250,00	14.415.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.415.250,00	14.415.250,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa pelayanan umum Tersedianya Penyediaan jasa surat menyurat	100 % 100 % 100 %											
1605	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1606	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000.000,00	255.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1607	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.725.200.000,00	1.701.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.200.000,00	1.701.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional dan lapangan Tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100 % 100 %											
1608	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	207.514.000,00	149.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.514.000,00	149.746.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1609	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	134.530.000,00	134.530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.530.000,00	134.530.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1610	4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya													
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	169.800.000,00	169.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.800.000,00	169.800.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedianya hak keuangan anggota DPRD	100 %											
1611	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD													
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bulan	20.382.178.050,00	20.642.178.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.382.178.050,00	20.642.178.050,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi Fraksi DPRD Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	100 % 100 %											
1612	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	4 Laporan	695.439.000,00	695.439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.439.000,00	695.439.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1613	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD													
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	18.580.478.250,00	18.596.478.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.580.478.250,00	18.596.478.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Prosentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	undefined undefined											
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen hasil penyusunan dan pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	undefined undefined											
1614	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen	199.140.000,00	100.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.140.000,00	100.665.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD Tersedianya penyebaran produk hukum Daerah Publikasi dan Dokumentasi Dewan Terselenggaranya hubungan masyarakat	100 % 100 % 100 %											
1615	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	1.994.120.000,00	1.734.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994.120.000,00	1.734.120.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1616	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 Dokumen	37.750.000,00	20.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750.000,00	20.075.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1617	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD													
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6 Dokumen	1.192.750.000,00	1.219.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.750.000,00	1.219.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Reses	undefined undefined											
1618	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses													
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	1.339.740.000,00	1.392.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.740.000,00	1.392.240.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.01	PERENCANAAN													
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Persen											
1619	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.468.000,00	2.232.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.000,00	2.232.100,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
1620	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	0,00	4.688.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688.057.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1621	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.628.057.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628.057.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1622	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	16.100.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00	21.350.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Aadministrasi barang milik Daerah	100 Persen											
1623	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1624	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1625	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1626	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1627	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1628	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah	100 Persen											
1629	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.156.000,00	1.156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.000,00	1.156.000,00	Pendapatan Bagi Hasil
1630	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	770.800,00	770.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.800,00	770.800,00	Pendapatan Bagi Hasil
1631	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	120.752.500,00	83.403.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.752.500,00	83.403.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1632	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.474.400,00	13.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.474.400,00	13.810.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1633	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Pendapatan Bagi Hasil
1634	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1635	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1636	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1637	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
1638	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1639	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0,00	0,00	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1640	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	85.195.000,00	137.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.195.000,00	137.371.000,00	Pendapatan Bagi Hasil
1641	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1642	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen											
1643	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Pendapatan Bagi Hasil
1644	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28 Laporan	0,00	12.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890.000,00	Pendapatan Bagi Hasil
1645	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil
1646	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	166.070.000,00	169.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.070.000,00	169.370.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
1647	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	102.149.400,00	107.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.149.400,00	107.409.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1648	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	Pendapatan Bagi Hasil
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan	100 Persen											
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan Pembangunan daerah	100 Persen											
1649	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah													
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	312.200.000,00	409.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.200.000,00	409.425.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1650	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik													
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	0,00	2.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1651	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik													
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	18.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.470.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1652	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota													
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	20.470.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.470.000,00	720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1653	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	66.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.300.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1654	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	0,00	87.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	persen terlaksananya koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan Pembangunan daerah	100 Persen											
1655	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1656	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1657	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah													
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	29 Orang	0,00	27.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.070.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1658	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah													
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	28 Orang	39.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.150.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian,evaluasi dan pelaporan yang tersusun	2 dok											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1659	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	0,00	19.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.120.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1660	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	64.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.620.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1661	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan	0,00	42.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1662	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan	41.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.230.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen											
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	tingkat keselarasan antar dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan	100 Persen											
1663	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1664	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1665	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1666	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1667	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1668	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1669	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1670	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1671	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	295.900.000,00	30.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.900.000,00	30.610.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1672	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1673	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1674	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	25.960.000,00	31.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960.000,00	31.060.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1675	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	tingkat keselarasan antar dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen											
1676	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	18.830.000,00	23.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.830.000,00	23.930.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1677	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1678	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1679	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1680	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1681	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1682	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1683	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1684	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1685	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1686	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	2.344.800,00	2.344.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.800,00	2.344.800,00	Pendapatan Bagi Hasil
1687	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1688	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	tingkat keselarasan antar dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persen											
1689	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	20.015.000,00	23.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.015.000,00	23.820.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1690	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1691	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1692	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1693	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1694	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1695	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1696	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1697	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	25.000.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	28.250.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1698	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1699	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1700	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1701	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.02	KEUANGAN													
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	93 persen											
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 persen											
1702	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/bulan	18.011.749.009,00	12.668.296.435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.011.749.009,00	12.668.296.435,71	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 persen											
1703	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.840.000,00	7.376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.000,00	7.376.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1704	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	7.054.000,00	7.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054.000,00	7.054.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1705	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	902.151.200,00	740.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.151.200,00	740.440.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
1706	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	57.876.200,00	54.971.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.876.200,00	54.971.200,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1707	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1708	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1709	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan	34.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.239.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 persen											
1710	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1711	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	122.442.500,00	280.477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.442.500,00	280.477.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1712	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 persen											
1713	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1714	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	52.200.000,00	52.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200.000,00	52.200.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1715	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	160.331.000,00	160.331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.331.000,00	160.331.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 persen											
1716	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1717	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	427.288.500,00	341.238.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.288.500,00	341.238.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1718	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	83.250.000,00	78.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.250.000,00	78.250.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	93 persen											
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 persen											
1719	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD													
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1720	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD													
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30 Dokumen	4.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1721	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0 Dokumen	0,00	196.628.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.628.600,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1722	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	200 Dokumen	230.518.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.518.600,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1723	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD													
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	200 Dokumen	66.000.000,00	101.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	101.020.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1724	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran													
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	50 Dokumen	145.365.000,00	14.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.365.000,00	14.125.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1725	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	720 Orang	650.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.800.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1726	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Orang	0,00	638.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.400.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 persen											
1727	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait													
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	30 Dokumen	249.570.000,00	144.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.570.000,00	144.930.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100 persen											
1728	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran													
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	0 Laporan	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1729	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran													
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1730	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	50 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1731	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1732	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0,00	179.184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.184.800,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
1733	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	226.804.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.804.800,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 persen											
1734	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.310.964.000,00	152.481.657.284,00	156.310.964.000,00	152.481.657.284,00	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dana Desa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Insentif Fiskal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah
1735	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000.000,00	1.260.018.557,00	0,00	0,00	2.250.000.000,00	1.260.018.557,00	Penerimaan Pembiayaan
1736	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.317.333.850,00	0,00	13.317.333.850,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1737	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.617.333.850,00	0,00	12.617.333.850,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 persen											
1738	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1739	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	336.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.810.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	98 persen											
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 persen											
1740	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga													
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1741	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga													
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	0 Dokumen	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1742	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	0 Dokumen	0,00	9.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1743	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	30 Dokumen	26.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.920.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1744	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	30 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1745	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1746	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	12 Laporan	203.063.000,00	86.555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.063.000,00	86.555.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1747	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	30 Laporan	102.146.000,00	98.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.146.000,00	98.936.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1748	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	0 Laporan	0,00	171.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.560.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1749	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	12 Laporan	205.168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.168.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1750	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	0 Dokumen	0,00	141.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.385.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1751	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	180.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.146.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	67 persen											
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100 persen											
1752	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1753	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1754	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1755	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1756	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1757	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1758	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	22 Unit	415.066.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.066.500,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1759	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	0 Unit	0,00	343.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.550.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1760	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0 Laporan	0,00	438.908.800,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.908.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1761	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3000 Laporan	570.538.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.538.800,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
1762	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1763	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1764	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)													
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	91041 Obyek Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1765	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)													
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	0 Obyek Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1766	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1767	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1768	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah													
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	91041 Layanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1769	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	91041 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1770	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1771	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0 Dokumen	0,00	964.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.386.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
1772	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	169400000 Dokumen	690.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.711.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.03	KEPEGAWAIAN													
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	96 Persen											
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen											
1773	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
1774	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	0,00	5.146.089.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146.089.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1775	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	5.192.739.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192.739.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1776	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksannya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen											
1777	5.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen											
1778	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	40.315.000,00	27.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.315.000,00	27.690.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen											
1779	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.698.000,00	1.698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.000,00	1.698.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1780	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.748.100,00	1.748.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.100,00	1.748.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1781	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	0,00	108.161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.161.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1782	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	108.161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.161.400,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1783	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	6.830.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830.600,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1784	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	0,00	6.830.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1785	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2160 Dokumen	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340.000,00	5.340.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1786	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1787	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1788	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	93 Unit											
1789	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1790	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1791	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1792	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1793	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0,00	0,00	159.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.085.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1794	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	0,00	0,00	0,00	148.525.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.525.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1795	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	58 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1796	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
1797	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1798	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1799	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	29.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1800	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.100.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1801	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	128.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.340.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1802	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	131.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.550.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21 Unit											
1803	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	103.524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.524.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1804	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	0,00	80.249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.249.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1805	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1806	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	0,00	5.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1807	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1808	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.03.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-											
1809	5.03.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Dokumen	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1810	5.03.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah													
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Dokumen	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Pelayanan	30 Persen											
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	30 Persen											
1811	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	50.298.000,00	55.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.298.000,00	55.598.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1812	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	21.917.100,00	17.119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.917.100,00	17.119.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1813	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	19.270.000,00	24.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.270.000,00	24.520.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1814	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	35.537.500,00	38.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.537.500,00	38.700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1815	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	40 Dokumen	39.027.100,00	8.639.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.027.100,00	8.639.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1816	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	30 Laporan	3.225.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225.000,00	700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Layanan Aparatur	30 Persen											
1817	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	28.140.000,00	28.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.140.000,00	28.140.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1818	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN													
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	45.780.000,00	55.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.780.000,00	55.980.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1819	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	12 Dokumen	22.020.000,00	15.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.020.000,00	15.082.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Layanan Aparatur	30 Persen											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1820	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	54.280.000,00	34.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.280.000,00	34.825.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1821	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN													
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	30 Orang	18.395.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.395.000,00	14.520.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1822	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional													
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang	100.840.000,00	119.840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.840.000,00	119.840.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang dibina	30 Persen											
1823	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai													
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	200 Orang	5.285.600,00	2.285.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285.600,00	2.285.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1824	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN													
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1250 Orang	23.025.600,00	20.325.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.025.600,00	20.325.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan Pendidikan Diklat	30 Persen											
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi	30 Persen											
1825	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1826	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi	30 Persen											
1827	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	0,00	341.561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.561.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1828	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan													
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2 Laporan	431.787.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.787.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Riset dan Inovasi Daerah													
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi Pemerintah Daerah	100 %											
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
1829	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1830	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5 Orang/bulan	0,00	1.016.747.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.747.899,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1831	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	765.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.965.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1832	5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.085.600,00	2.085.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.600,00	2.085.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1833	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.853.000,00	1.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.000,00	1.853.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1834	5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.900.800,00	2.900.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.800,00	2.900.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1835	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	56.662.500,00	40.377.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.662.500,00	40.377.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1836	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.292.000,00	3.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292.000,00	3.292.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1837	5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1838	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1839	5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1840	5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1841	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1842	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1843	5.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1844	5.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1845	5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1846	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1847	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1848	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	0,00	54.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1849	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	68.556.700,00	44.896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.556.700,00	44.896.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1850	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	0,00	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1851	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1852	5.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1853	5.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase Penelitian dan pengembangan Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	11 Dokumen											
1854	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan													
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1855	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan													
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1856	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan													
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	0 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1857	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan													
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1858	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	2 Laporan	0,00	141.547.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.547.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1859	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	10 Laporan	136.472.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.472.200,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan di Bidang sosial dan kependudukan	1 Dokumen											
1860	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1861	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembagan di Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3 Dokumen											
1862	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1863	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1864	5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1865	5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Kelompok Inovasi dan teknologi yang telah di uji cobakan	3 Kelompok											
1866	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi													
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	129.931.300,00	111.351.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.931.300,00	111.351.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1867	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1868	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi													
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Inspektorat													
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH													
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	98 persen											
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen											
1869	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	7.830.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830.247.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1870	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	0,00	10.411.505.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411.505.127,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen											
1871	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	52 Orang	516.314.001,00	581.414.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.314.001,00	581.414.001,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen											
1872	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1873	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	302.185.299,00	303.652.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.185.299,00	303.652.199,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1874	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48211 Paket	31.105.600,00	31.094.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.105.600,00	31.094.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1875	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1876	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1877	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1500 Laporan	25.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen											
1878	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	0,00	0,00	149.759.000,00	3.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.759.000,00	3.523.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1879	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1880	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen											
1881	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1882	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750.000,00	22.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1883	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	117.306.600,00	133.056.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.306.600,00	133.056.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen											
1884	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	184.079.500,00	164.608.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.079.500,00	164.608.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1885	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	32.170.000,00	32.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.170.000,00	32.170.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1886	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1887	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (Tindaklanjut)	91 persen											
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100 persen											
1888	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	12 Laporan	354.420.000,00	71.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.420.000,00	71.520.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1889	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja													
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1890	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	40 Laporan	5.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1891	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan													
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	40 Laporan	19.570.000,00	14.520.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.070.000,00	14.520.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1892	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal													
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	12 Kesepakatan	12.250.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00	7.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1893	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1 Dokumen	75.080.000,00	49.830.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.080.000,00	49.830.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	91 persen											
1894	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah													
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan	8.210.000,00	7.200.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.710.000,00	7.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Monev, Koordinasi, Pendampingan, Asistensi dan verifikasi pengawasan (MCP)	91 persen											
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100 persen											
1895	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	29 perangkat daerah	14.650.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650.000,00	9.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1896	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	15 perangkat daerah	5.050.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.050.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1897	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi													
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	0 perangkat daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1898	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi													
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	512.490.000,00	364.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.490.000,00	364.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
1899	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15 perangkat daerah	172.310.000,00	157.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.310.000,00	157.160.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
		Kecamatan Bangli													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											
1900	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	16.260.000,00	16.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.260.000,00	16.580.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %											
1901	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	6.588.820.000,00	6.507.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588.820.000,00	6.507.020.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %											
1902	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26 Paket	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	1.280.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1903	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	10.984.000,00	10.984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.984.000,00	10.984.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1904	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	732.580.100,00	773.486.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732.580.100,00	773.486.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
1905	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	22.854.400,00	22.774.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.854.400,00	22.774.400,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
1906	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.380.000,00	7.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380.000,00	7.380.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
1907	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	250 Laporan	78.853.500,00	16.087.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.853.500,00	16.087.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1908	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	0,00	0,00	110.345.000,00	23.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.345.000,00	23.360.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1909	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.160.000,00	10.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160.000,00	10.160.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1910	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55.685.000,00	55.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.685.000,00	55.685.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
1911	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.478.226.000,00	1.454.646.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.226.000,00	1.454.646.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %											
1912	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	111.301.000,00	91.058.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.301.000,00	91.058.400,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
1913	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	17.810.000,00	17.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.810.000,00	17.810.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
1914	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %											
1915	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1916	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 %											
1917	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	48.058.500,00	36.301.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.058.500,00	36.301.500,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %											
1918	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19 Laporan	520.320.600,00	481.453.000,00	1.231.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.552.100,00	481.453.000,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %											
1919	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	23.085.500,00	20.085.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.085.500,00	20.085.500,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
1920	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	17 Unit	469.642.500,00	550.492.500,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.642.500,00	550.492.500,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
1921	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	5.297.500,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297.500,00	150.000,00	Penerimaan Pembiayaan
1922	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	118.436.400,00	83.809.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.436.400,00	83.809.200,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1923	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	149.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.836.000,00	0,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
1924	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	0,00	145.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.755.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %											
1925	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	750 Orang	187.123.500,00	208.173.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.123.500,00	208.173.500,00	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Penerimaan Pembiayaan
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %											
1926	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	24.715.000,00	10.192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.715.000,00	10.192.500,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
		Kecamatan Kintamani													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan dan administrasi pemerintah daerah	100 %											
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1927	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1928	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen											
1929	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	3.454.151.000,00	3.229.253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454.151.000,00	3.229.253.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Paket											
1930	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.716.600,00	1.716.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.600,00	1.716.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1931	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	262.270.200,00	254.570.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.270.200,00	254.570.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1932	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	350 Dokumen	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket											
1933	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1934	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	5.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah LaporanJasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan											
1935	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1936	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	21.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1937	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	83.530.000,00	63.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.530.000,00	63.880.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dipelihara	2 Unit											
1938	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	136.530.800,00	141.780.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.530.800,00	141.780.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1939	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1940	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1941	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilakukan	100 %											
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 %											
1942	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1943	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1944	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1945	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Dokumen											
1946	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Dokumen	0,00	21.784.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.784.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1947	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12 Dokumen	16.534.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.534.200,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1948	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	41.845.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.845.200,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1949	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	0,00	48.645.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.645.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan											
1950	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	0,00	42.776.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.776.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1951	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	33.815.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.815.800,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	100 %											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 %											
1952	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	48 Lembaga Kemasyarakatan	6.490.000,00	6.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490.000,00	6.490.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1953	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	42.609.200,00	45.269.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.609.200,00	45.269.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 %											
1954	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	48 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1955	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1956	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	48 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1957	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1958	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1959	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	48 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1960	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	48 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1961	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelesian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 %											
1962	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	25.202.400,00	28.380.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.202.400,00	28.380.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1963	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1964	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat													
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100 %											
1965	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1966	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 %											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %											
1967	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1968	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	400 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1969	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1970	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	240 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1971	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1972	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 %											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100 %											
1973	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1974	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	48 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1975	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48 Dokumen	47.123.600,00	53.550.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.123.600,00	53.550.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1976	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	48 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1977	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1978	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1979	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	48 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1980	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	48 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1981	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1982	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1983	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	48 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1984	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	48 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1985	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Kecamatan Susut													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Daerah	100 persen											
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen											
1986	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.818.692.000,00	2.997.692.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818.692.000,00	2.997.692.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen											
1987	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1988	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1989	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1990	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	8.896.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896.400,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1991	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	0,00	218.112.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.112.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
1992	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	210.482.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.482.300,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
1993	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	0,00	12.058.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.058.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1994	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	11.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.812.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1995	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1996	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1997	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
1998	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.876.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen											
1999	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2000	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen											
2001	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2002	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	71.500.500,00	71.500.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500.500,00	71.500.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2003	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	42.300.000,00	33.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300.000,00	33.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen											
2004	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	77.803.300,00	77.803.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.803.300,00	77.803.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2005	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2006	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2007	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	86 persen											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kecamatan	86 persen											
2008	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	9.421.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.421.000,00	5.850.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	98 persen											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Perencanaan Pembangunan di Desa	98 persen 98 persen											
2009	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27 Lembaga Kemasyarakatan	4.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2010	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	27 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2011	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	41.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.995.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2012	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	0,00	60.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.895.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	undefined undefined											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	86 persen											
2013	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	42.212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.212.500,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2014	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	0,00	52.712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.712.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	98 persen											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra Suku,Umat beragama,Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	98 persen											
2015	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	140 Orang	15.406.000,00	8.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.406.000,00	8.749.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	86 persen											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	86 persen											
2016	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	8.735.000,00	7.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.735.000,00	7.435.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
		Kecamatan Tembuku													
	7	UNSUR KEWILAYAHAN													
	7.01	KECAMATAN													
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan											
2017	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	0,00	3.758.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758.513.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
2018	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	3.858.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.858.513.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen											
2019	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2020	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	0,00	2.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2021	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.726.000,00	0,00	4.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2022	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0,00	2.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2023	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	0,00	153.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.070.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2024	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	153.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.070.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2025	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	0,00	4.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2026	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	4.164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2027	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2028	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2029	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2030	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	350 Laporan	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
2031	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00	12.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2032	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2033	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2034	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2035	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2036	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan											
2037	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	225 Laporan	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2038	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	225 Laporan	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2039	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2040	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2041	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	0,00	55.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.620.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
2042	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	71.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.450.000,00	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
2043	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	79.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.534.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2044	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	0,00	79.534.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.534.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2045	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2046	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2047	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2048	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prsentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	85 Persen											
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Prsentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen											
2049	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	5.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2050	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2051	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	5.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2052	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prsentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	85 Persen											
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6 Desa											
2053	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	0,00	38.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.588.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2054	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	42.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.880.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	85 Persen											
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	6 Desa											
2055	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	0,00	4.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2056	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	85 Persen											
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif												
2057	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2058	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	85 Persen											
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen											
2059	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6 Dokumen	5.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165.000,00	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2060	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif													
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6 Dokumen	0,00	5.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan dan Administrasi Pemerintah Daerah	100 Persen											
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen											
2061	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.558.927.000,00	3.858.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558.927.000,00	3.858.927.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
2062	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	83.980.000,00	57.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.980.000,00	57.820.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen											
2063	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.206.700,00	1.206.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.700,00	1.206.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2064	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063.000,00	1.063.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil
2065	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	54.617.700,00	52.067.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.617.700,00	52.067.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
2066	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	4.970.000,00	4.970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.000,00	4.970.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2067	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2068	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasiilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit											
2069	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen											
2070	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.790.000,00	6.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790.000,00	6.790.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
2071	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Unit											
2072	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	0,00	80.822.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.822.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
2073	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													

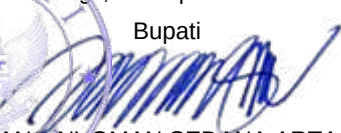
No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	115.429.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.429.100,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
2074	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	0,00	10.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
2075	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat dalam Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	70 Persen											
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen											
2076	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 Orang	0,00	745.777.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.777.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
2077	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 Orang	770.227.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.227.100,00	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
2078	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	60 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2079	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu	72 Persen											
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 Dokumen											
2080	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	27.918.440.800,00	27.918.440.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.918.440.800,00	27.918.440.800,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2081	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	772.467.238,00	785.573.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.467.238,00	785.573.716,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2082	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25 Orang	92.340.000,00	103.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.340.000,00	103.990.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2083	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2084	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan	44.170.000,00	14.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.170.000,00	14.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	75 Persen											
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen											
2085	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	80 Persen											
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen											
2086	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan											
				Target	Pagu Indikatif Belanja (Rp)										
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	132.250.000,00	123.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.250.000,00	123.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2087	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Informasi Dan Bahan Keterangan Terkait Stabilitas Daerah	80 Persen											
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen											
2088	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	445 Orang	101.857.350,00	67.692.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.857.350,00	67.692.350,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
2089	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	60.209.050,00	67.338.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.209.050,00	67.338.050,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



Kab. Bangli, 20 September 2024
Bupati

SANG NYOMAN SEDANA ARTA



KABUPATEN BANGLI
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1				PELAYANAN UMUM										
1	01	1	01	Pendidikan	233.049.955.550,00	229.441.198.708,00	72.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.122.755.550,00	229.441.198.708,00
1	01	1	02	Kesehatan	170.447.372.815,00	192.060.809.330,58	3.874.680.620,00	7.979.926.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.322.053.435,00	200.040.736.283,58
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.050.978.721,00	13.609.210.400,00	118.373.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.169.351.921,00	13.609.210.400,00
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	18.729.909.000,00	17.529.221.300,00	19.563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.749.472.000,00	17.529.221.300,00
1	01	1	06	Sosial	5.107.096.050,00	5.140.782.500,00	36.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143.696.050,00	5.140.782.500,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	27.404.194.700,00	26.979.059.200,00	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.488.194.700,00	26.979.059.200,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.422.454.650,00	6.269.969.250,00	82.710.350,00	840.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505.165.000,00	7.109.969.250,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.738.233.450,00	9.039.429.516,00	25.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.763.579.450,00	9.039.429.516,00
1	01	2	15	Perhubungan	5.500.022.400,00	5.488.423.100,00	60.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560.882.400,00	5.488.423.100,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	4.496.167.158,00	4.478.362.908,00	111.222.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607.389.908,00	4.478.362.908,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.521.454.100,00	5.605.837.300,00	0,00	58.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.521.454.100,00	5.664.437.300,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	6.335.588.300,00	6.325.750.100,00	8.290.542.450,00	8.290.362.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.626.130.750,00	14.616.112.550,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	01	2	20	Statistik	42.000.000,00	19.664.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	19.664.000,00
1	01	2	24	Kearsipan	8.162.000,00	8.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162.000,00	8.162.000,00
1	01	3	26	Pariwisata	6.753.515.000,00	6.823.944.925,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.783.515.000,00	6.823.944.925,00
1	01	3	27	Pertanian	26.840.033.500,00	26.537.266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.840.033.500,00	26.537.266.500,00
1	01	3	30	Perdagangan	412.000.600,00	594.620.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000.600,00	594.620.600,00
1	01	3	31	Perindustrian	5.707.120.125,00	5.559.097.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707.120.125,00	5.559.097.425,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	71.716.086.400,00	92.176.498.900,00	887.258.400,00	1.221.981.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.603.344.800,00	93.398.480.100,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	52.472.557.500,00	52.230.494.500,00	605.610.250,00	14.415.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.078.167.750,00	52.244.909.750,00
1	01	5	01	Perencanaan	6.202.687.900,00	6.053.783.200,00	280.195.000,00	137.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.482.882.900,00	6.191.154.200,00
1	01	5	02	Keuangan	24.079.646.609,00	17.663.846.335,71	122.442.500,00	480.477.500,00	2.250.000.000,00	1.260.018.557,00	168.928.297.850,00	165.798.991.134,00	195.380.386.959,00	185.203.333.526,71
1	01	5	03	Kepegawaian	6.403.487.000,00	6.286.961.500,00	159.085.000,00	148.525.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562.572.000,00	6.435.487.000,00
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	431.787.000,00	341.561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.787.000,00	341.561.500,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	1.261.339.100,00	1.452.971.299,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273.839.100,00	1.465.471.299,00
1	01	6	01	Inspektorat	10.253.588.000,00	12.374.421.027,00	329.759.000,00	103.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.583.347.000,00	12.477.944.027,00
1	01	7	01	Kecamatan	22.556.218.500,00	22.226.005.300,00	186.183.500,00	23.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.742.402.000,00	22.249.365.300,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	33.745.715.038,00	33.915.928.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.745.715.038,00	33.915.928.916,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN										
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	2.185.413.500,00	3.161.737.500,00	40.284.800,00	22.984.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225.698.300,00	3.184.722.300,00
2	03	1	06	Sosial	36.331.400,00	24.162.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.331.400,00	24.162.400,00
3				EKONOMI										
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.457.030.200,00	7.477.339.300,00	57.129.738.230,00	64.729.587.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.586.768.430,00	72.206.926.655,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	82.250.000,00	63.475.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250.000,00	63.475.200,00
3	04	2	09	Pangan	351.750.000,00	318.917.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.750.000,00	318.917.600,00
3	04	2	15	Perhubungan	2.838.606.600,00	2.803.712.300,00	124.280.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.886.600,00	2.855.712.300,00
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	3.939.355.250,00	4.329.335.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939.355.250,00	4.329.335.500,00
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.040.735.220,00	1.046.714.020,00	0,00	37.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.735.220,00	1.084.689.020,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	927.681.700,00	1.053.136.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.681.700,00	1.053.136.700,00
3	04	2	21	Persandian	169.988.500,00	96.142.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.888.500,00	96.142.000,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	1.338.298.000,00	1.384.585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.298.000,00	1.384.585.000,00
3	04	3	27	Pertanian	2.196.286.500,00	2.134.160.635,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.286.500,00	2.234.160.635,00
3	04	3	30	Perdagangan	1.017.902.800,00	1.707.837.600,00	0,00	3.751.355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.902.800,00	5.459.192.600,00
3	04	3	31	Perindustrian	2.858.487.000,00	2.861.508.000,00	5.345.000.000,00	5.345.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.203.487.000,00	8.206.508.000,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP										
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	316.530.000,00	249.690.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.530.000,00	399.690.000,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	5.634.202.850,00	7.044.530.350,00	2.453.988.000,00	3.080.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088.190.850,00	10.125.518.350,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM										
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.295.000.000,00	8.788.291.000,00	200.000.000,00	512.061.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495.000.000,00	9.300.352.000,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.684.017.000,00	6.489.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.017.000,00	6.489.604.000,00
6				KESEHATAN										
6	07	1	02	Kesehatan	64.778.757.440,00	69.042.895.416,00	38.946.330.000,00	50.259.945.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.725.087.440,00	119.302.840.996,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.613.276.000,00	3.754.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613.276.000,00	3.754.426.000,00
7				PARIWISATA										
7	08	3	26	Pariwisata	20.192.346.000,00	24.569.274.666,72	5.366.137.000,00	5.739.135.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.558.483.000,00	30.308.410.536,72
8				PENDIDIKAN										
8	10	1	01	Pendidikan	46.165.798.225,00	55.757.530.267,68	27.325.683.675,00	25.098.171.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.491.481.900,00	80.855.701.812,68
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	3.942.155.000,00	3.202.260.000,00	29.623.445.000,00	29.723.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.565.600.000,00	32.925.705.000,00
8	10	2	22	Kebudayaan	72.126.718.000,00	43.699.649.200,00	75.672.000,00	103.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.202.390.000,00	43.802.896.200,00
8	10	2	23	Perpustakaan	116.613.000,00	128.543.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.613.000,00	128.543.500,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL										

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
9	11	1	06	Sosial	553.218.100,0 0	1.365.924.100 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.218.100,0 0	1.365.924.100 ,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	551.460.000,0 0	571.495.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.460.000,0 0	571.495.000,0 0
9	11	3	32	Transmigrasi	42.505.000,00	19.102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.505.000,00	19.102.500,00
				TOTAL	1.028.142.084 .451,00	1.059.379.261 .295,69	182.298.190. 725,00	208.016.939. 003,00	2.250.000. 000,00	1.260.018. 557,00	168.928.297. 850,00	165.798.991. 134,00	1.381.618.573 .026,00	1.434.455.209 .989,69

Kab. Bangli, 20 September 2024

Bupati



SANG NYOMAN SEDANA ARTA



KABUPATEN BANGLI
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A SPM Bidang Pendidikan				
1.	Pendidikan Dasar	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	19.999.800,00	332.800,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	88.696.000,00	88.696.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	827.000.000,00
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	87.804.000,00	49.344.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	0,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.764.250.000,00	4.856.250.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	161.304.000,00	161.304.000,00
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	83.196.000,00	20.400.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.978.037.000,00	7.998.037.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.772.500.000,00	8.898.750.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	56.733.000,00	11.610.500,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.693.177.750,00	3.121.149.750,00
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	25.861.400,00	12.226.400,00
Total			19.731.558.950,00	26.045.100.450,00
2.	Pendidikan Anak Usia Dini	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0,00	0,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	88.320.000,00	67.100.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	0,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.526.100.000,00	2.531.200.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.614.500.000,00	3.402.000.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	200.000.000,00
Total			5.228.920.000,00	6.200.300.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			24.960.478.950,00	32.245.400.450,00
B SPM Bidang Kesehatan				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	343.685.000,00	343.685.000,00
Total			343.685.000,00	343.685.000,00
2.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	90.000.000,00	90.000.000,00
Total			90.000.000,00	90.000.000,00
3.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.525.000,00	6.525.000,00
Total			6.525.000,00	6.525.000,00
4.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0,00	0,00
Total			0,00	0,00
5.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	213.052.000,00	213.052.000,00
Total			213.052.000,00	213.052.000,00
6.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00
Total			0,00	0,00
7.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	72.775.000,00	70.950.000,00
Total			72.775.000,00	70.950.000,00
8.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.375.000,00	8.550.000,00
Total			10.375.000,00	8.550.000,00
9.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	342.868.500,00	462.508.500,00
Total			342.868.500,00	462.508.500,00
10.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	159.824.000,00	159.824.000,00
Total			159.824.000,00	159.824.000,00
11.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	72.020.000,00	72.020.000,00
Total			72.020.000,00	72.020.000,00
12.	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	117.070.000,00	117.070.000,00
Total			117.070.000,00	117.070.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			1.428.194.500,00	1.544.184.500,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200.000.000,00	490.000.000,00
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7.295.000.000,00	8.810.352.000,00
		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00	0,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
Total			7.495.000.000,00	9.300.352.000,00
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	150.000.000,00	150.000.000,00
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0,00	0,00
Total			150.000.000,00	150.000.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			7.645.000.000,00	9.450.352.000,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0,00	0,00
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	175.000.000,00	175.000.000,00
Total			175.000.000,00	175.000.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			175.000.000,00	175.000.000,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.176.460.000,00	1.835.842.000,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	12.000.000,00	251.720.000,00
Total			1.188.460.000,00	2.087.562.000,00
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	14.320.000,00	14.320.000,00
Total			14.320.000,00	14.320.000,00
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	450.920.000,00	522.720.000,00
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	14.390.000,00	3.600.000,00
Total			465.310.000,00	526.320.000,00
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	0,00	0,00
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	255.220.000,00	284.520.000,00
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	0,00	0,00
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
Total			255.220.000,00	284.520.000,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			1.923.310.000,00	2.912.722.000,00
F SPM Bidang Sosial				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0,00	0,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	159.473.000,00	826.323.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	0,00	0,00
		Penyediaan Permakanan	0,00	0,00
Total			159.473.000,00	826.323.000,00
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Penyediaan Permakanan	0,00	0,00
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0,00	0,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	159.473.000,00	826.323.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	0,00	0,00
Total			159.473.000,00	826.323.000,00
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Penyediaan Alat Bantu	0,00	0,00
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0,00	0,00
		Penyediaan Permakanan	0,00	0,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	159.473.000,00	826.323.000,00
Total			159.473.000,00	826.323.000,00
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Penyediaan Permakanan	0,00	0,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	159.473.000,00	826.323.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	0,00	0,00
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0,00	0,00
Total			159.473.000,00	826.323.000,00
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Penyediaan Makanan	0,00	0,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	0,00	0,00
Total			0,00	0,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			637.892.000,00	3.305.292.000,00

Kab. Bangli, 20 September 2024
 Bupati

 SAUNG NYOMAN SEDANA ARTA
 Halaman 4



KABUPATEN BANGLI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0,00	619.580.000,00	150.270.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.143.696.050,00	5.140.782.500,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0,00	71.140.000,00	71.140.000,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	0,00	149.712.000,00	169.302.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0,00	1.316.018.200,00	1.287.932.400,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0,00	36.331.400,00	24.162.400,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	223.030.900,00	231.827.900,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.707.120.125,00	5.559.097.425,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0,00	739.500.000,00	530.800.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	98.000.000,00	98.000.000,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0,00	663.547.320,00	678.746.320,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	233.122.755.550,00	229.441.198.708,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0,00	697.009.000,00	1.258.745.100,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	0,00	1.573.020.000,00	1.573.020.000,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	4.607.389.908,00	4.478.362.908,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAH RAGAAN	0,00	33.270.300.000,00	32.627.830.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	27.488.194.700,00	26.979.059.200,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	03		KEPEGAWAIAN			
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	467.040.900,00	436.275.400,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	532.970.000,00	577.330.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	266.403.500,00	252.898.500,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0,00	42.225.700,00	67.845.700,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0,00	56.822.200,00	66.010.700,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	02		SEKRETARIAT DPRD			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	48.314.667.750,00	47.778.809.750,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0,00	263.000.000,00	634.000.000,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	1.773.310.000,00	4.063.760.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0,00	49.000.000,00	42.920.200,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	174.322.053.435,00	200.040.736.283,58
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0,00	21.834.589.300,00	24.998.861.835,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0,00	8.055.000,00	6.392.500,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	0,00	1.017.944.400,00	1.059.344.400,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0,00	27.830.800,00	28.624.800,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0,00	5.156.224.450,00	6.981.902.950,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	132.250.000,00	123.250.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	1.052.302.000,00	866.647.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	0,00	42.000.000,00	19.664.000,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	14.626.130.750,00	14.616.112.550,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0,00	731.443.000,00	509.556.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0,00	55.750.000,00	53.375.000,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	770.227.100,00	745.777.100,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0,00	28.827.418.038,00	28.822.454.516,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	431.787.000,00	341.561.500,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	3.853.753.500,00	4.089.416.900,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	03		KEPEGAWAIAN			
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	6.095.531.100,00	5.999.211.600,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0,00	45.750.000,00	38.104.500,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0,00	272.673.000,00	272.673.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0,00	320.353.600,00	325.240.600,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	26.840.033.500,00	26.537.266.500,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	21.418.248.600,00	46.108.262.800,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	16.750.000,00	22.000.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0,00	3.728.356.500,00	3.820.734.900,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	6.783.515.000,00	6.823.944.925,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0,00	45.032.500,00	25.760.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	75.610.000,00	98.020.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	202.529.500,00	216.922.500,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	50.084.315.200,00	46.565.514.900,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0,00	15.540.000,00	26.640.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	388.049.800,00	140.014.800,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0,00	627.270.000,00	768.420.000,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0,00	285.516.000,00	243.737.400,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0,00	30.591.000,00	1.285.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	0,00	574.142.000,00	1.161.917.216,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01		SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0,00	1.100.781.000,00	724.702.400,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	0,00	4.880.000,00	2.898.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	1.007.435.600,00	1.212.572.799,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	162.066.400,00	135.030.400,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	0,00	33.250.000,00	20.555.000,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	02		SEKRETARIAT DPRD			
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	0,00	4.763.500.000,00	4.466.100.000,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	564.840.000,00	590.520.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0,00	9.854.850.000,00	5.445.820.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	412.000.600,00	594.620.600,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	20.754.650.100,00	20.276.941.700,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	0,00	278.204.800,00	307.504.800,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	0,00	160.800.000,00	303.074.500,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	0,00	1.412.986.000,00	1.412.986.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0,00	171.000.000,00	69.744.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0,00	974.120.000,00	5.416.835.800,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	0,00	62.347.540.000,00	38.318.076.200,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0,00	66.611.500,00	44.972.400,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	18.749.472.000,00	17.529.221.300,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	0,00	2.896.275.100,00	2.810.739.900,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0,00	1.085.436.400,00	1.294.236.400,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0,00	261.938.000,00	261.938.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	0,00	187.765.900,00	856.078.400,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	2.197.342.000,00	2.302.722.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	1.592.403.600,00	1.581.763.600,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	0,00	1.675.430.000,00	2.040.520.250,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01		PERENCANAAN			
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.529.993.100,00	5.460.619.400,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0,00	297.402.000,00	266.772.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0,00	108.558.000,00	122.151.000,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0,00	58.427.700,00	39.698.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0,00	316.530.000,00	249.690.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0,00	51.150.400,00	59.389.400,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0,00	197.888.500,00	96.142.000,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	85.738.600,00	76.343.100,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	0,00	8.162.000,00	8.162.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,00	1.175.744.000,00	1.175.744.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0,00	372.331.000,00	372.331.000,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0,00	204.652.200,00	206.771.200,00
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	73.244.858.400,00	80.758.912.812,68

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	1.414.523.500,00	2.299.887.500,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	0,00	220.957.000,00	247.718.500,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	19.883.821.409,00	14.413.034.635,71
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.560.882.400,00	5.488.423.100,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	187.943.500,00	187.943.500,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.521.454.100,00	5.664.437.300,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	42.505.000,00	19.102.500,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	14.169.351.921,00	13.609.210.400,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01		INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	9.224.267.000,00	11.796.874.027,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0,00	8.203.487.000,00	8.206.508.000,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	628.504.500,00	676.882.335,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0,00	668.446.000,00	668.446.000,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	0,00	2.263.925.250,00	2.288.815.250,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0,00	35.750.000,00	49.299.500,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,00	147.427.000,00	147.427.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0,00	276.700.000,00	359.792.800,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0,00	32.446.000,00	60.886.000,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	1.676.316.300,00	1.946.844.800,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	100.967.470.940,00	116.439.844.496,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	7.495.000.000,00	9.300.352.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	0,00	145.300.000,00	147.875.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	0,00	17.086.000,00	17.086.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	0,00	24.085.337.000,00	28.865.894.536,72
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	0,00	293.030.000,00	292.734.000,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0,00	37.760.822.630,00	42.753.329.920,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	0,00	15.952.000,00	13.732.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.417.487.000,00	5.414.203.650,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01		KECAMATAN			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0,00	160.434.700,00	159.397.700,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0,00	30.484.000,00	25.880.700,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0,00	173.088.806.250,00	168.333.898.091,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	735.707.000,00	2.250.844.000,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0,00	169.024.000,00	229.319.000,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	5.735.499.450,00	5.305.641.800,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	2.449.058.000,00	2.568.972.500,00


 Kab. Bangli, 20 September 2024
 Bupati

 SANG NYOMAN SEDANA ARTA



KABUPATEN BANGLI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000						Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	339.840.505.520,00	339.845.605.520,00	343.222.605.520,68
1.01.2.19.0.00.03.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	306.914.800.520,00	306.919.900.520,00	310.296.900.520,68
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	306.914.800.520,00	306.919.900.520,00	310.296.900.520,68
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	77.311.812.812,00	77.316.912.812,00	80.758.912.812,68
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	44.609.957.712,00	44.609.957.712,00	47.239.007.712,68
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	998.592.400,00	998.592.400,00	998.592.400,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	669.354.600,00	669.354.600,00	669.354.600,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	43.675.500,00	43.675.500,00	43.675.500,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	250.335.300,00	250.335.300,00	250.335.300,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	94.766.000,00	94.766.000,00	94.766.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	527.320.850,00	527.320.850,00	527.320.850,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	88.696.000,00	88.696.000,00	88.696.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	8.898.750.000,00	8.898.750.000,00	8.898.750.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	6.610.500,00	6.610.500,00	11.610.500,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	24.313.365.212,00	24.313.365.212,00	24.090.415.212,68
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	2.496.481.000,00	2.496.481.000,00	2.496.481.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00	827.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	243.973.350,00	243.973.350,00	243.973.350,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.978.037.000,00	5.978.037.000,00	7.998.037.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	26.343.627.100,00	26.343.627.100,00	26.956.577.100,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	321.023.050,00	321.023.050,00	321.023.050,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	352.470.850,00	352.470.850,00	352.470.850,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.731.149.750,00	2.731.149.750,00	3.121.149.750,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	90.026.750,00	90.026.750,00	90.026.750,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	376.524.025,00	376.524.025,00	376.524.025,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.334.449.075,00	2.334.449.075,00	2.334.449.075,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	327.700.000,00	327.700.000,00	327.700.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	161.304.000,00	161.304.000,00	161.304.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.856.250.000,00	4.856.250.000,00	4.856.250.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	14.779.770.000,00	14.779.770.000,00	15.002.720.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	332.800,00	332.800,00	332.800,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	12.226.400,00	12.226.400,00	12.226.400,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	400.400,00	400.400,00	400.400,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.261.328.000,00	6.266.428.000,00	6.466.428.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	171.128.000,00	171.128.000,00	171.128.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.526.100.000,00	2.531.200.000,00	2.531.200.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.402.000.000,00	3.402.000.000,00	3.402.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	67.100.000,00	67.100.000,00	67.100.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00	200.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	96.900.000,00	96.900.000,00	96.900.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	96.900.000,00	96.900.000,00	96.900.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.285.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	69.744.000,00	69.744.000,00	69.744.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	69.744.000,00	69.744.000,00	69.744.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	49.344.000,00	49.344.000,00	49.344.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	06	2.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	25.760.000,00	25.760.000,00	25.760.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	229.506.198.708,00	229.506.198.708,00	229.441.198.708,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	227.494.463.108,00	227.494.463.108,00	227.434.463.108,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	227.494.463.108,00	227.494.463.108,00	227.434.463.108,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.000.000,00	52.000.000,00	47.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	52.000.000,00	52.000.000,00	47.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	379.668.100,00	379.668.100,00	379.668.100,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.528.200,00	8.528.200,00	8.528.200,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.109.600,00	8.109.600,00	8.109.600,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	267.410.900,00	267.410.900,00	267.410.900,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.434.400,00	44.434.400,00	44.434.400,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.527.500,00	3.527.500,00	3.527.500,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	47.657.500,00	47.657.500,00	47.657.500,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.900.000,00	102.900.000,00	102.900.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	102.900.000,00	102.900.000,00	102.900.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.151.336.000,00	1.151.336.000,00	1.151.336.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.186.000,00	165.006.000,00	165.006.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	966.150.000,00	966.330.000,00	966.330.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.031.500,00	285.031.500,00	285.031.500,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.051.500,00	231.051.500,00	231.051.500,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.980.000,00	53.980.000,00	53.980.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	32.925.705.000,00	32.925.705.000,00	32.925.705.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	32.925.705.000,00	32.925.705.000,00	32.925.705.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	147.875.000,00	147.875.000,00	147.875.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	147.875.000,00	147.875.000,00	147.875.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	147.875.000,00	147.875.000,00	147.875.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	32.627.830.000,00	32.627.830.000,00	32.627.830.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	880.000.000,00	880.000.000,00	880.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	880.000.000,00	880.000.000,00	880.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	972.830.000,00	972.830.000,00	972.830.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02	0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.02	0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	972.830.000,00	972.830.000,00	972.830.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.03	0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.04	0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	0,00	0,00	0,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	30.275.000.000,00	30.275.000.000,00	30.275.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.05	0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	03	2.05	0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	30.275.000.000,00	30.275.000.000,00	30.275.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.2.19.0.00.03.0000	2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	108.221.933.216,00	108.221.933.216,00	109.021.933.216,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	108.221.933.216,00	108.221.933.216,00	109.021.933.216,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	108.221.933.216,00	108.221.933.216,00	109.021.933.216,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	55.658.851.200,00	55.658.851.200,00	56.458.851.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.685.973.000,00	6.685.973.000,00	6.885.593.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	3.674.870.000,00	3.674.870.000,00	3.674.870.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	183.316.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	51.842.000,00	51.842.000,00	51.842.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.715.813.000,00	2.715.813.000,00	2.732.117.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	232.048.000,00	232.048.000,00	232.048.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.916.258.200,00	48.916.258.200,00	49.516.638.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	0,00	0,00	119.640.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	57.020.000,00	57.020.000,00	57.020.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	213.052.000,00	213.052.000,00	213.052.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	450.500.000,00	450.500.000,00	450.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	35.880.000,00	35.880.000,00	35.880.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	342.510.000,00	342.510.000,00	642.360.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	177.033.000,00	177.033.000,00	177.033.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	298.790.000,00	298.790.000,00	298.790.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	52.420.000,00	52.420.000,00	52.420.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	800.953.000,00	800.953.000,00	981.843.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	45.555.482.200,00	45.555.482.200,00	45.555.482.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	63.550.000,00	63.550.000,00	63.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	452.750.000,00	452.750.000,00	452.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	162.741.000,00	162.741.000,00	149.684.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	0,00	0,00	13.056.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	26.052.000,00	26.052.000,00	26.052.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	16.750.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	159.075.000,00	159.075.000,00	159.075.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.620.000,00	56.620.000,00	56.620.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	56.620.000,00	56.620.000,00	56.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.302.722.000,00	2.302.722.000,00	2.302.722.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	61.560.000,00	61.560.000,00	61.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	61.560.000,00	61.560.000,00	61.560.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.301.158.000,00	1.301.158.000,00	1.301.158.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	999.600.000,00	999.600.000,00	999.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	301.558.000,00	301.558.000,00	301.558.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	940.004.000,00	940.004.000,00	940.004.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	940.004.000,00	940.004.000,00	940.004.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	372.331.000,00	372.331.000,00	372.331.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	61.001.000,00	61.001.000,00	61.001.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	61.001.000,00	61.001.000,00	61.001.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	132.650.000,00	132.650.000,00	132.650.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	132.650.000,00	132.650.000,00	132.650.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	178.680.000,00	178.680.000,00	178.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	178.680.000,00	178.680.000,00	178.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	69.300.000,00	69.300.000,00	69.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.818.729.016,00	49.818.729.016,00	49.818.729.016,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.613.100,00	47.613.100,00	47.613.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.613.100,00	47.613.100,00	47.613.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.847.415.016,00	47.847.415.016,00	47.847.415.016,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.752.395.016,00	47.752.395.016,00	47.752.395.016,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	95.020.000,00	95.020.000,00	95.020.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	135.120.000,00	135.120.000,00	135.120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	135.120.000,00	135.120.000,00	135.120.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	59.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	572.497.900,00	572.497.900,00	572.497.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.632.800,00	23.632.800,00	23.632.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	448.975.100,00	448.975.100,00	448.975.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	87.620.000,00	87.620.000,00	87.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.520.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	663.080.000,00	663.080.000,00	663.080.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	287.320.000,00	287.320.000,00	287.320.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	365.760.000,00	365.760.000,00	365.760.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.003.000,00	494.003.000,00	494.003.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	453.303.000,00	453.303.000,00	453.303.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.700.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001						Puskesmas Bangli	2.201.988.810,00	2.201.988.810,00	2.201.988.809,54
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	738.492.000,00	738.492.000,00	738.492.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	726.492.000,00	726.492.000,00	726.492.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.736.000,00	8.736.000,00	8.736.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.158.000,00	3.158.000,00	3.158.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.950.000,00	38.950.000,00	38.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	221.608.000,00	221.608.000,00	221.608.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.428.000,00	9.428.000,00	9.428.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	153.542.000,00	153.542.000,00	153.542.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	164.500.000,00	164.500.000,00	164.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	106.220.000,00	106.220.000,00	106.220.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	8.008.000,00	8.008.000,00	8.008.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.008.000,00	8.008.000,00	8.008.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	8.008.000,00	8.008.000,00	8.008.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.455.488.810,00	1.455.488.810,00	1.455.488.809,54
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.455.488.810,00	1.455.488.810,00	1.455.488.809,54
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.455.488.810,00	1.455.488.810,00	1.455.488.809,54
1.02.0.00.0.00.01.0002						Puskesmas Bangli Utara	2.259.402.784,00	2.259.402.784,00	2.259.402.783,92

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	769.180.000,00	769.180.000,00	769.180.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	769.180.000,00	769.180.000,00	769.180.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	55.562.500,00	55.562.500,00	55.562.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	21.700.000,00	21.700.000,00	21.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	58.950.000,00	58.950.000,00	58.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	6.525.000,00	6.525.000,00	6.525.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	214.622.500,00	214.622.500,00	214.622.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	23.925.000,00	23.925.000,00	23.925.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.700.000,00	7.700.000,00	7.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	133.625.000,00	133.625.000,00	133.625.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	184.520.000,00	184.520.000,00	184.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	12.950.000,00	12.950.000,00	12.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.490.222.784,00	1.490.222.784,00	1.490.222.783,92
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.490.222.784,00	1.490.222.784,00	1.490.222.783,92
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.490.222.784,00	1.490.222.784,00	1.490.222.783,92
1.02.0.00.0.00.01.0003						Puskesmas Susut I	2.454.226.303,00	2.454.226.303,00	2.454.226.302,55
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	737.400.000,00	737.400.000,00	737.400.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	725.400.000,00	725.400.000,00	725.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14.125.000,00	14.125.000,00	14.125.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	38.225.000,00	38.225.000,00	38.225.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	207.400.000,00	207.400.000,00	207.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.300.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	24.400.000,00	24.400.000,00	24.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	121.100.000,00	121.100.000,00	121.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	166.500.000,00	166.500.000,00	166.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	90.650.000,00	90.650.000,00	90.650.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.701.726.303,00	1.701.726.303,00	1.701.726.302,55
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.701.726.303,00	1.701.726.303,00	1.701.726.302,55
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.701.726.303,00	1.701.726.303,00	1.701.726.302,55
1.02.0.00.0.00.01.0004						Puskesmas Susut II	2.406.217.636,00	2.406.217.636,00	2.406.217.635,17
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	730.146.000,00	730.146.000,00	730.146.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	718.146.000,00	718.146.000,00	718.146.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.210.000,00	23.210.000,00	23.210.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	235.700.000,00	235.700.000,00	235.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	9.890.000,00	9.890.000,00	9.890.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	131.646.000,00	131.646.000,00	131.646.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	161.500.000,00	161.500.000,00	161.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	9.354.000,00	9.354.000,00	9.354.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.354.000,00	9.354.000,00	9.354.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	9.354.000,00	9.354.000,00	9.354.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.666.717.636,00	1.666.717.636,00	1.666.717.635,17
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.666.717.636,00	1.666.717.636,00	1.666.717.635,17
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.666.717.636,00	1.666.717.636,00	1.666.717.635,17
1.02.0.00.0.00.01.0005						Puskesmas Tembuku I	2.522.132.948,00	2.522.132.948,00	2.522.132.947,79
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	735.700.000,00	735.700.000,00	735.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	723.700.000,00	723.700.000,00	723.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.960.000,00	32.960.000,00	32.960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.550.000,00	17.550.000,00	17.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	202.853.000,00	202.853.000,00	202.853.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35.954.000,00	35.954.000,00	35.954.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	104.700.000,00	104.700.000,00	104.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	162.000.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	11.400.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	84.463.000,00	84.463.000,00	84.463.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	46.620.000,00	46.620.000,00	46.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.779.432.948,00	1.779.432.948,00	1.779.432.947,79

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.779.432.948,00	1.779.432.948,00	1.779.432.947,79
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.779.432.948,00	1.779.432.948,00	1.779.432.947,79
1.02.0.00.0.00.01.0006						Puskesmas Tembuku II	2.316.344.210,00	2.316.344.210,00	2.316.344.209,93
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	750.975.000,00	750.975.000,00	750.975.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	738.975.000,00	738.975.000,00	738.975.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.620.000,00	10.620.000,00	10.620.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	46.400.000,00	46.400.000,00	46.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	218.125.000,00	218.125.000,00	218.125.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36.300.000,00	36.300.000,00	36.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	45.255.000,00	45.255.000,00	45.255.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100.075.000,00	100.075.000,00	100.075.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	167.000.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	25.600.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	62.400.000,00	62.400.000,00	62.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3.025.000,00	3.025.000,00	3.025.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.562.344.210,00	1.562.344.210,00	1.562.344.209,93
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.562.344.210,00	1.562.344.210,00	1.562.344.209,93
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.562.344.210,00	1.562.344.210,00	1.562.344.209,93
1.02.0.00.0.00.01.0007						Puskesmas Kintamani I	2.584.092.692,00	2.584.092.692,00	2.584.092.691,70
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	745.791.000,00	745.791.000,00	745.791.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	733.791.000,00	733.791.000,00	733.791.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	212.200.000,00	212.200.000,00	212.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.800.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	22.200.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	107.700.000,00	107.700.000,00	107.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	171.291.000,00	171.291.000,00	171.291.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	130.400.000,00	130.400.000,00	130.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	20.159.000,00	20.159.000,00	20.159.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.159.000,00	20.159.000,00	20.159.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20.159.000,00	20.159.000,00	20.159.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.818.142.692,00	1.818.142.692,00	1.818.142.691,70
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.818.142.692,00	1.818.142.692,00	1.818.142.691,70
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.818.142.692,00	1.818.142.692,00	1.818.142.691,70
1.02.0.00.0.00.01.0008						Puskesmas Kintamani II	2.154.982.965,00	2.154.982.965,00	2.154.982.964,59
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	760.500.000,00	760.500.000,00	760.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	742.480.000,00	742.480.000,00	742.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.990.000,00	72.990.000,00	72.990.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	29.160.000,00	29.160.000,00	29.160.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	38.300.000,00	38.300.000,00	38.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	233.850.000,00	233.850.000,00	233.850.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	47.250.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	125.450.000,00	125.450.000,00	125.450.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	163.480.000,00	163.480.000,00	163.480.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	18.020.000,00	18.020.000,00	18.020.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	18.020.000,00	18.020.000,00	18.020.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.394.482.965,00	1.394.482.965,00	1.394.482.964,59
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.394.482.965,00	1.394.482.965,00	1.394.482.964,59
1.02.0.00.0.00.01.0008	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.394.482.965,00	1.394.482.965,00	1.394.482.964,59
1.02.0.00.0.00.01.0009						Puskesmas Kintamani III	1.954.002.269,00	1.954.002.269,00	1.954.002.268,65
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	738.000.000,00	738.000.000,00	738.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	726.000.000,00	726.000.000,00	726.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	209.700.000,00	209.700.000,00	209.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.450.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	147.050.000,00	147.050.000,00	147.050.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	162.500.000,00	162.500.000,00	162.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	114.200.000,00	114.200.000,00	114.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.208.502.269,00	1.208.502.269,00	1.208.502.268,65
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.208.502.269,00	1.208.502.269,00	1.208.502.268,65
1.02.0.00.0.00.01.0009	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.208.502.269,00	1.208.502.269,00	1.208.502.268,65
1.02.0.00.0.00.01.0010						Puskesmas Kintamani IV	1.740.617.842,00	1.740.617.842,00	1.740.617.842,16

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	737.712.500,00	737.712.500,00	737.712.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	727.712.500,00	727.712.500,00	727.712.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7.460.000,00	7.460.000,00	7.460.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.750.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	239.425.000,00	239.425.000,00	239.425.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	20.395.000,00	20.395.000,00	20.395.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	114.212.500,00	114.212.500,00	114.212.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	164.000.000,00	164.000.000,00	164.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.720.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	94.050.000,00	94.050.000,00	94.050.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.287.500,00	6.287.500,00	6.287.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.287.500,00	6.287.500,00	6.287.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	6.287.500,00	6.287.500,00	6.287.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	996.617.842,00	996.617.842,00	996.617.842,16
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	996.617.842,00	996.617.842,00	996.617.842,16
1.02.0.00.0.00.01.0010	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	996.617.842,00	996.617.842,00	996.617.842,16
1.02.0.00.0.00.01.0011						Puskesmas Kintamani V	2.525.007.270,00	2.525.007.270,00	2.525.007.269,62
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	749.281.000,00	749.281.000,00	749.281.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	726.781.000,00	726.781.000,00	726.781.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96.620.000,00	96.620.000,00	96.620.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	28.960.000,00	28.960.000,00	28.960.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	36.100.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	28.800.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	212.920.000,00	212.920.000,00	212.920.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	33.420.000,00	33.420.000,00	33.420.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	113.680.000,00	113.680.000,00	113.680.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	155.481.000,00	155.481.000,00	155.481.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.775.726.270,00	1.775.726.270,00	1.775.726.269,62
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.775.726.270,00	1.775.726.270,00	1.775.726.269,62
1.02.0.00.0.00.01.0011	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.775.726.270,00	1.775.726.270,00	1.775.726.269,62
1.02.0.00.0.00.01.0012						Puskesmas Kintamani VI	2.267.705.594,00	2.267.705.594,00	2.267.705.593,78
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	699.790.000,00	699.790.000,00	699.790.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	699.790.000,00	699.790.000,00	699.790.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	52.461.000,00	52.461.000,00	52.461.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.700.000,00	23.700.000,00	23.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	207.528.000,00	207.528.000,00	207.528.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.011.000,00	16.011.000,00	16.011.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	81.590.000,00	81.590.000,00	81.590.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	174.000.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	17.850.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	75.550.000,00	75.550.000,00	75.550.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	42.210.000,00	42.210.000,00	42.210.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.210.000,00	42.210.000,00	42.210.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	42.210.000,00	42.210.000,00	42.210.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.525.705.594,00	1.525.705.594,00	1.525.705.593,78
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	1.525.705.594,00	1.525.705.594,00	1.525.705.593,78
1.02.0.00.0.00.01.0012	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.525.705.594,00	1.525.705.594,00	1.525.705.593,78
1.02.0.00.0.00.02.0000						Rumah Sakit Umum Daerah	174.934.922.744,00	174.934.922.744,00	182.934.922.744,18
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	51.088.025.796,00	51.088.025.796,00	51.088.025.796,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	51.088.025.796,00	51.088.025.796,00	51.088.025.796,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	31.905.395.796,00	31.905.395.796,00	31.905.395.796,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	588.030.000,00	588.030.000,00	588.030.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	13.848.606.000,00	13.848.606.000,00	13.848.606.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.745.994.000,00	4.745.994.000,00	4.745.994.000,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	123.846.896.948,00	123.846.896.948,00	131.846.896.948,18
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.135.954.899,00	47.135.954.899,00	47.135.954.899,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.135.954.899,00	47.135.954.899,00	47.135.954.899,00
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	76.710.942.049,00	76.710.942.049,00	84.710.942.049,18
1.02.0.00.0.00.02.0000	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	76.710.942.049,00	76.710.942.049,00	84.710.942.049,18
1.03.1.04.0.00.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	95.510.294.055,00	95.510.294.055,00	102.005.783.055,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	92.810.827.055,00	92.810.827.055,00	95.516.179.055,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	434.000.000,00	434.000.000,00	634.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	434.000.000,00	434.000.000,00	634.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	434.000.000,00	434.000.000,00	634.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.495.000.000,00	7.495.000.000,00	9.300.352.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7.495.000.000,00	7.495.000.000,00	9.300.352.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	490.000.000,00	490.000.000,00	490.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7.005.000.000,00	7.005.000.000,00	8.810.352.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.820.734.900,00	3.820.734.900,00	3.820.734.900,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	3.820.734.900,00	3.820.734.900,00	3.820.734.900,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3.412.000.000,00	3.412.000.000,00	3.412.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	308.734.900,00	308.734.900,00	308.734.900,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	24.998.861.835,00	24.998.861.835,00	24.998.861.835,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	24.998.861.835,00	24.998.861.835,00	24.998.861.835,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	24.998.861.835,00	24.998.861.835,00	24.998.861.835,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	42.053.329.920,00	42.053.329.920,00	42.753.329.920,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	42.053.329.920,00	42.053.329.920,00	42.753.329.920,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	36.867.059.920,00	36.867.059.920,00	37.967.059.920,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.786.270.000,00	4.786.270.000,00	4.786.270.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	249.690.000,00	249.690.000,00	249.690.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	129.490.000,00	129.490.000,00	129.490.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	129.490.000,00	129.490.000,00	129.490.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.02	0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	59.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	59.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.609.210.400,00	13.609.210.400,00	13.609.210.400,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.187.968.500,00	12.187.968.500,00	12.187.968.500,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.187.968.500,00	12.187.968.500,00	12.187.968.500,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	625.831.300,00	625.831.300,00	625.831.300,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.880.000,00	7.880.000,00	7.880.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	376.155.300,00	376.155.300,00	376.155.300,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.076.000,00	38.076.000,00	38.076.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.720.000,00	3.720.000,00	3.720.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.321.400,00	81.321.400,00	81.321.400,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.680.000,00	17.680.000,00	17.680.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.399.000,00	49.399.000,00	49.399.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.242.400,00	14.242.400,00	14.242.400,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	714.089.200,00	714.089.200,00	714.089.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	454.049.200,00	454.049.200,00	454.049.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	83.400.000,00	83.400.000,00	83.400.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.640.000,00	31.640.000,00	31.640.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.699.467.000,00	2.699.467.000,00	6.489.604.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.788.760.000,00	1.788.760.000,00	4.063.760.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.788.760.000,00	1.788.760.000,00	4.063.760.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.788.760.000,00	1.788.760.000,00	4.063.760.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	735.707.000,00	735.707.000,00	2.250.844.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	735.707.000,00	735.707.000,00	2.250.844.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0000	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	735.707.000,00	735.707.000,00	2.250.844.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000						Satuan Polisi Pamong Praja	12.849.010.200,00	12.849.010.200,00	12.909.210.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.849.010.200,00	12.849.010.200,00	12.909.210.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.289.687.500,00	2.289.687.500,00	2.299.887.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.088.819.200,00	2.088.819.200,00	2.099.019.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	11.457.200,00	11.457.200,00	11.457.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	251.720.000,00	251.720.000,00	251.720.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.825.642.000,00	1.825.642.000,00	1.835.842.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	187.828.300,00	187.828.300,00	187.828.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	17.088.000,00	17.088.000,00	17.088.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	170.740.300,00	170.740.300,00	170.740.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	13.040.000,00	13.040.000,00	13.040.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	13.040.000,00	13.040.000,00	13.040.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.559.322.700,00	10.559.322.700,00	10.609.322.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.225.000,00	69.225.000,00	69.225.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.765.000,00	66.765.000,00	66.765.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.460.000,00	2.460.000,00	2.460.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.265.018.000,00	10.265.018.000,00	10.265.018.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.265.018.000,00	10.265.018.000,00	10.265.018.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.839.800,00	76.839.800,00	76.839.800,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.668.500,00	3.668.500,00	3.668.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.161.300,00	68.161.300,00	68.161.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.871.500,00	16.871.500,00	16.871.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.150.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.721.500,00	12.721.500,00	12.721.500,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.368.400,00	131.368.400,00	181.368.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.428.400,00	118.428.400,00	168.428.400,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.940.000,00	12.940.000,00	12.940.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	7.804.733.400,00	7.804.733.400,00	7.804.733.400,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	577.330.000,00	577.330.000,00	577.330.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	14.320.000,00	14.320.000,00	14.320.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	14.320.000,00	14.320.000,00	14.320.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	526.320.000,00	526.320.000,00	526.320.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	522.720.000,00	522.720.000,00	522.720.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	36.690.000,00	36.690.000,00	36.690.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	36.690.000,00	36.690.000,00	36.690.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	307.504.800,00	307.504.800,00	307.504.800,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	307.504.800,00	307.504.800,00	307.504.800,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	284.520.000,00	284.520.000,00	284.520.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	22.984.800,00	22.984.800,00	22.984.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.919.898.600,00	6.919.898.600,00	6.919.898.600,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.407.341.000,00	6.407.341.000,00	6.407.341.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.407.341.000,00	6.407.341.000,00	6.407.341.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.761.800,00	133.761.800,00	97.811.800,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.621.600,00	1.621.600,00	1.621.600,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.460.200,00	99.460.200,00	63.460.200,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.000.000,00	29.000.000,00	29.050.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.100.000,00	118.100.000,00	121.100.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.200.000,00	34.200.000,00	37.050.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.900.000,00	76.900.000,00	77.050.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.695.800,00	260.695.800,00	293.645.800,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	246.095.800,00	246.095.800,00	279.045.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.09.0000	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.245.799.000,00	6.250.899.000,00	7.102.364.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.708.404.000,00	5.713.504.000,00	6.530.869.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	166.974.500,00	166.974.500,00	303.074.500,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	166.974.500,00	166.974.500,00	303.074.500,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	34.210.000,00	34.210.000,00	89.450.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	59.214.500,00	59.214.500,00	140.074.500,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	73.550.000,00	73.550.000,00	73.550.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	185.613.400,00	190.713.400,00	856.078.400,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	155.858.000,00	160.958.000,00	826.323.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	155.858.000,00	160.958.000,00	826.323.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	29.755.400,00	29.755.400,00	29.755.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	8.074.200,00	8.074.200,00	8.074.200,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	21.681.200,00	21.681.200,00	21.681.200,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	206.771.200,00	206.771.200,00	206.771.200,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	206.771.200,00	206.771.200,00	206.771.200,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	56.771.200,00	56.771.200,00	56.771.200,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	24.162.400,00	24.162.400,00	24.162.400,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	24.162.400,00	24.162.400,00	24.162.400,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	24.162.400,00	24.162.400,00	24.162.400,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.124.882.500,00	5.124.882.500,00	5.140.782.500,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.557.321.000,00	4.557.321.000,00	4.557.321.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.557.321.000,00	4.557.321.000,00	4.557.321.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.407.400,00	294.407.400,00	294.947.400,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.264.000,00	3.264.000,00	3.264.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.177.500,00	7.177.500,00	7.177.500,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	258.775.000,00	258.775.000,00	259.275.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.386.900,00	17.386.900,00	17.426.900,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.420.000,00	6.420.000,00	6.420.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.384.000,00	1.384.000,00	1.384.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.360.000,00	69.360.000,00	69.360.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.060.000,00	7.060.000,00	7.060.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.300.000,00	36.300.000,00	36.300.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.794.100,00	203.794.100,00	219.154.100,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.924.100,00	180.924.100,00	196.284.100,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.870.000,00	22.870.000,00	22.870.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	1	06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	537.395.000,00	537.395.000,00	571.495.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	537.395.000,00	537.395.000,00	571.495.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	79.900.000,00	79.900.000,00	98.020.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	71.490.000,00	71.490.000,00	89.610.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.01	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	71.490.000,00	71.490.000,00	89.610.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.410.000,00	8.410.000,00	8.410.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.410.000,00	8.410.000,00	8.410.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	147.427.000,00	147.427.000,00	147.427.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	43.883.000,00	43.883.000,00	43.883.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	43.883.000,00	43.883.000,00	43.883.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	103.544.000,00	103.544.000,00	103.544.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	103.544.000,00	103.544.000,00	103.544.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	37.395.000,00	37.395.000,00	53.375.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	37.395.000,00	37.395.000,00	53.375.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	29.160.000,00	29.160.000,00	45.140.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8.235.000,00	8.235.000,00	8.235.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	272.673.000,00	272.673.000,00	272.673.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	60.437.000,00	60.437.000,00	60.437.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	60.437.000,00	60.437.000,00	60.437.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	140.396.000,00	140.396.000,00	140.396.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	140.396.000,00	140.396.000,00	140.396.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.840.000,00	71.840.000,00	71.840.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	71.840.000,00	71.840.000,00	71.840.000,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00
1.06.2.08.0.00.02.0000	2	08	07	2.03	0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000						Dinas Lingkungan Hidup	36.477.577.550,00	36.477.577.550,00	37.104.577.550,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	36.477.577.550,00	36.477.577.550,00	37.104.577.550,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	98.000.000,00	98.000.000,00	98.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.581.763.600,00	1.581.763.600,00	1.581.763.600,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.454.391.200,00	1.454.391.200,00	1.454.391.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.447.462.400,00	1.447.462.400,00	1.447.462.400,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	6.928.800,00	6.928.800,00	6.928.800,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	127.372.400,00	127.372.400,00	127.372.400,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	127.372.400,00	127.372.400,00	127.372.400,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.294.236.400,00	1.294.236.400,00	1.294.236.400,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.294.236.400,00	1.294.236.400,00	1.294.236.400,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	2.01	0003	Pengelolaan Kebun Raya	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.294.236.400,00	1.294.236.400,00	1.294.236.400,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	17.086.000,00	17.086.000,00	17.086.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	17.086.000,00	17.086.000,00	17.086.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	17.086.000,00	17.086.000,00	17.086.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	71.140.000,00	71.140.000,00	71.140.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71.140.000,00	71.140.000,00	71.140.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	71.140.000,00	71.140.000,00	71.140.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	59.389.400,00	59.389.400,00	59.389.400,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.389.400,00	59.389.400,00	59.389.400,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	59.389.400,00	59.389.400,00	59.389.400,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.354.902.950,00	6.354.902.950,00	6.981.902.950,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	6.354.902.950,00	6.354.902.950,00	6.981.902.950,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.126.293.800,00	1.126.293.800,00	1.753.293.800,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	5.195.609.150,00	5.195.609.150,00	5.195.609.150,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.979.059.200,00	26.979.059.200,00	26.979.059.200,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.820.000,00	6.820.000,00	6.820.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.350.096.000,00	26.350.096.000,00	26.350.096.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.349.358.000,00	26.349.358.000,00	26.349.358.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	738.000,00	738.000,00	738.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.462.200,00	307.462.200,00	307.462.200,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.960.000,00	5.960.000,00	5.960.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.398.800,00	20.398.800,00	20.398.800,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	258.738.400,00	258.738.400,00	258.738.400,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.165.000,00	18.165.000,00	18.165.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.947.500,00	79.947.500,00	79.947.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.647.500,00	49.647.500,00	49.647.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.300.000,00	21.300.000,00	21.300.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.733.500,00	234.733.500,00	234.733.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	217.813.500,00	217.813.500,00	217.813.500,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.920.000,00	16.920.000,00	16.920.000,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.309.969.250,00	6.309.969.250,00	7.109.969.250,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.309.969.250,00	6.309.969.250,00	7.109.969.250,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	458.745.100,00	458.745.100,00	1.258.745.100,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	6.697.500,00	6.697.500,00	6.697.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	6.697.500,00	6.697.500,00	6.697.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	385.860.000,00	385.860.000,00	385.860.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	385.860.000,00	385.860.000,00	385.860.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	60.221.600,00	60.221.600,00	860.221.600,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9.760.600,00	9.760.600,00	9.760.600,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	50.461.000,00	50.461.000,00	850.461.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	5.966.000,00	5.966.000,00	5.966.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	02	2.04	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	5.966.000,00	5.966.000,00	5.966.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	247.718.500,00	247.718.500,00	247.718.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	89.610.000,00	89.610.000,00	89.610.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	89.610.000,00	89.610.000,00	89.610.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	158.108.500,00	158.108.500,00	158.108.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	7.609.500,00	7.609.500,00	7.609.500,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	150.499.000,00	150.499.000,00	150.499.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	169.302.000,00	169.302.000,00	169.302.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	13.102.000,00	13.102.000,00	13.102.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	702.000,00	702.000,00	702.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	151.355.000,00	151.355.000,00	151.355.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	16.245.000,00	16.245.000,00	16.245.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	135.110.000,00	135.110.000,00	135.110.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.845.000,00	4.845.000,00	4.845.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.845.000,00	4.845.000,00	4.845.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.414.203.650,00	5.414.203.650,00	5.414.203.650,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.880.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.937.974.000,00	4.937.974.000,00	4.937.974.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.937.974.000,00	4.937.974.000,00	4.937.974.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.957.650,00	87.957.650,00	87.957.650,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.599.000,00	6.599.000,00	6.599.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.491.900,00	5.491.900,00	5.491.900,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.681.750,00	61.681.750,00	61.681.750,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.065.000,00	6.065.000,00	6.065.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.120.000,00	8.120.000,00	8.120.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.261.000,00	238.261.000,00	238.261.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.061.000,00	228.061.000,00	228.061.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.131.000,00	115.131.000,00	115.131.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.371.000,00	88.371.000,00	88.371.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.760.000,00	26.760.000,00	26.760.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	2	12	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.603.180.516,00	12.603.180.516,00	12.793.855.516,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.848.754.516,00	8.848.754.516,00	9.039.429.516,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	2.898.000,00	2.898.000,00	2.898.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	2.898.000,00	2.898.000,00	2.898.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	218.000,00	218.000,00	218.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.161.917.216,00	1.161.917.216,00	1.161.917.216,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.161.917.216,00	1.161.917.216,00	1.161.917.216,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	104.030.000,00	104.030.000,00	104.030.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	952.458.716,00	952.458.716,00	952.458.716,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	16.886.000,00	16.886.000,00	16.886.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	52.470.000,00	52.470.000,00	52.470.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	24.860.000,00	24.860.000,00	24.860.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	8.880.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2.332.500,00	2.332.500,00	2.332.500,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.378.297.500,00	2.378.297.500,00	2.568.972.500,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.378.297.500,00	2.378.297.500,00	2.568.972.500,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	244.090.000,00	244.090.000,00	434.765.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	34.988.000,00	34.988.000,00	34.988.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	25.160.000,00	25.160.000,00	25.160.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	2.074.059.500,00	2.074.059.500,00	2.074.059.500,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.305.641.800,00	5.305.641.800,00	5.305.641.800,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.690.251.000,00	4.690.251.000,00	4.690.251.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.690.251.000,00	4.690.251.000,00	4.690.251.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.781.850,00	285.781.850,00	285.781.850,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.012.000,00	4.012.000,00	4.012.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.300.000,00	29.300.000,00	29.300.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	222.193.350,00	222.193.350,00	222.193.350,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.336.500,00	21.336.500,00	21.336.500,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.940.000,00	8.940.000,00	8.940.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.500.000,00	66.500.000,00	66.500.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.108.950,00	263.108.950,00	263.108.950,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.208.950,00	241.208.950,00	241.208.950,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.754.426.000,00	3.754.426.000,00	3.754.426.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	768.420.000,00	768.420.000,00	768.420.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.01	0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	768.420.000,00	768.420.000,00	768.420.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	523.800.000,00	523.800.000,00	523.800.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	114.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	130.620.000,00	130.620.000,00	130.620.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.412.986.000,00	1.412.986.000,00	1.412.986.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	640.200.000,00	640.200.000,00	640.200.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	148.800.000,00	148.800.000,00	148.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	91.400.000,00	91.400.000,00	91.400.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	314.536.000,00	314.536.000,00	314.536.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	53.100.000,00	53.100.000,00	53.100.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	225.786.000,00	225.786.000,00	225.786.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35.650.000,00	35.650.000,00	35.650.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	242.250.000,00	242.250.000,00	242.250.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	238.500.000,00	238.500.000,00	238.500.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.573.020.000,00	1.573.020.000,00	1.573.020.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.573.020.000,00	1.573.020.000,00	1.573.020.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1.273.020.000,00	1.273.020.000,00	1.273.020.000,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0,00	0,00	0,00
2.13.2.14.0.00.09.0000	2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perhubungan	8.344.135.400,00	8.344.135.400,00	8.344.135.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	8.344.135.400,00	8.344.135.400,00	8.344.135.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.810.739.900,00	2.810.739.900,00	2.810.739.900,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.611.718.100,00	1.611.718.100,00	1.611.718.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.611.718.100,00	1.611.718.100,00	1.611.718.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	108.817.200,00	108.817.200,00	108.817.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	108.817.200,00	108.817.200,00	108.817.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	296.216.500,00	296.216.500,00	296.216.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	296.216.500,00	296.216.500,00	296.216.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	699.680.600,00	699.680.600,00	699.680.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	699.680.600,00	699.680.600,00	699.680.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	30.042.500,00	30.042.500,00	30.042.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	30.042.500,00	30.042.500,00	30.042.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	64.265.000,00	64.265.000,00	64.265.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	64.265.000,00	64.265.000,00	64.265.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	44.972.400,00	44.972.400,00	44.972.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	2.05		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha	44.972.400,00	44.972.400,00	44.972.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	2.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	44.972.400,00	44.972.400,00	44.972.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.488.423.100,00	5.488.423.100,00	5.488.423.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.603.329.000,00	4.603.329.000,00	4.603.329.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.603.329.000,00	4.603.329.000,00	4.603.329.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	470.258.800,00	470.258.800,00	470.258.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.506.500,00	1.506.500,00	1.506.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.291.200,00	8.291.200,00	8.291.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	197.591.100,00	197.591.100,00	197.591.100,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.130.000,00	105.130.000,00	105.130.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.220.000,00	5.220.000,00	5.220.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	152.520.000,00	152.520.000,00	152.520.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.160.000,00	189.160.000,00	189.160.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.300.000,00	50.300.000,00	50.300.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.860.000,00	130.860.000,00	130.860.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.675.300,00	225.675.300,00	225.675.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.835.300,00	202.835.300,00	202.835.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.840.000,00	22.840.000,00	22.840.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000						Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	8.923.504.408,00	8.923.504.408,00	8.923.504.408,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.807.698.408,00	8.807.698.408,00	8.807.698.408,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.040.520.250,00	2.040.520.250,00	2.040.520.250,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.040.520.250,00	2.040.520.250,00	2.040.520.250,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.037.312.900,00	1.037.312.900,00	1.037.312.900,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	36.481.850,00	36.481.850,00	36.481.850,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02	2.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	966.725.500,00	966.725.500,00	966.725.500,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.288.815.250,00	2.288.815.250,00	2.288.815.250,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.263.700.000,00	1.263.700.000,00	1.263.700.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.263.700.000,00	1.263.700.000,00	1.263.700.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.025.115.250,00	1.025.115.250,00	1.025.115.250,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	610.100.000,00	610.100.000,00	610.100.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1.295.250,00	1.295.250,00	1.295.250,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	03	2.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	213.720.000,00	213.720.000,00	213.720.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.478.362.908,00	4.478.362.908,00	4.478.362.908,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	750.000,00	750.000,00	750.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.117.661.758,00	4.117.661.758,00	4.117.661.758,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.117.661.758,00	4.117.661.758,00	4.117.661.758,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.148.000,00	138.148.000,00	138.148.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.307.800,00	1.307.800,00	1.307.800,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.150.200,00	34.150.200,00	34.150.200,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.930.000,00	99.930.000,00	99.930.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.184.000,00	163.184.000,00	163.184.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.900.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.524.000,00	91.524.000,00	91.524.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.760.000,00	65.760.000,00	65.760.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.869.150,00	55.869.150,00	55.869.150,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.879.150,00	45.879.150,00	45.879.150,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	19.664.000,00	19.664.000,00	19.664.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	19.664.000,00	19.664.000,00	19.664.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	19.664.000,00	19.664.000,00	19.664.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	19.664.000,00	19.664.000,00	19.664.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	96.142.000,00	96.142.000,00	96.142.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	96.142.000,00	96.142.000,00	96.142.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	81.622.000,00	81.622.000,00	81.622.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31.012.000,00	31.012.000,00	31.012.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17.610.000,00	17.610.000,00	17.610.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	14.520.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00
2.16.2.21.2.20.03.0000	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.520.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000						Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	6.732.601.520,00	6.802.601.520,00	6.812.601.520,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	63.475.200,00	63.475.200,00	63.475.200,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	42.920.200,00	42.920.200,00	42.920.200,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	42.920.200,00	42.920.200,00	42.920.200,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	42.920.200,00	42.920.200,00	42.920.200,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	20.555.000,00	20.555.000,00	20.555.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.555.000,00	20.555.000,00	20.555.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	20.555.000,00	20.555.000,00	20.555.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.669.126.320,00	6.739.126.320,00	6.749.126.320,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	02	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	66.010.700,00	66.010.700,00	66.010.700,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	66.010.700,00	66.010.700,00	66.010.700,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	66.010.700,00	66.010.700,00	66.010.700,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	261.938.000,00	261.938.000,00	261.938.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	261.938.000,00	261.938.000,00	261.938.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	261.938.000,00	261.938.000,00	261.938.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	39.698.000,00	39.698.000,00	39.698.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.698.000,00	39.698.000,00	39.698.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	06	2.01	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	39.698.000,00	39.698.000,00	39.698.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	678.746.320,00	678.746.320,00	678.746.320,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	678.746.320,00	678.746.320,00	678.746.320,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0012	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	102.749.000,00	102.749.000,00	102.749.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	575.997.320,00	575.997.320,00	575.997.320,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	38.296.000,00	38.296.000,00	38.296.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	38.296.000,00	38.296.000,00	38.296.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	38.296.000,00	38.296.000,00	38.296.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.584.437.300,00	5.654.437.300,00	5.664.437.300,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.021.774.000,00	5.091.774.000,00	5.091.774.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.021.774.000,00	5.091.774.000,00	5.091.774.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.254.200,00	217.254.200,00	217.412.200,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.664.200,00	2.664.200,00	2.664.200,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	189.456.000,00	189.456.000,00	189.456.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.982.000,00	13.982.000,00	14.140.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.600.000,00	58.600.000,00	58.600.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.600.000,00	58.600.000,00	58.600.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.635.000,00	220.635.000,00	220.635.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.385.000,00	123.385.000,00	123.385.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.250.000,00	91.250.000,00	91.250.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.174.100,00	66.174.100,00	76.016.100,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.204.100,00	57.204.100,00	67.046.100,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.970.000,00	8.970.000,00	8.970.000,00
2.17.2.07.0.00.06.0000	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.659.049.250,00	15.659.049.250,00	15.669.249.250,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	15.659.049.250,00	15.659.049.250,00	15.669.249.250,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	67.845.700,00	67.845.700,00	67.845.700,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.990.000,00	8.990.000,00	8.990.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5.210.000,00	5.210.000,00	5.210.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	3.780.000,00	3.780.000,00	3.780.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	58.855.700,00	58.855.700,00	58.855.700,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	58.855.700,00	58.855.700,00	58.855.700,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	60.886.000,00	60.886.000,00	60.886.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	60.886.000,00	60.886.000,00	60.886.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	59.886.000,00	59.886.000,00	59.886.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	190.619.000,00	190.619.000,00	229.319.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	190.619.000,00	190.619.000,00	229.319.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	102.460.000,00	102.460.000,00	115.780.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	24.715.000,00	24.715.000,00	24.715.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	63.444.000,00	63.444.000,00	88.824.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	668.446.000,00	668.446.000,00	668.446.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	668.446.000,00	668.446.000,00	668.446.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	95.165.000,00	95.165.000,00	95.165.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	348.941.000,00	348.941.000,00	348.941.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	224.340.000,00	224.340.000,00	224.340.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	55.140.000,00	55.140.000,00	26.640.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.140.000,00	55.140.000,00	26.640.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	55.140.000,00	55.140.000,00	26.640.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.616.112.550,00	14.616.112.550,00	14.616.112.550,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.761.304.000,00	5.761.304.000,00	5.761.304.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.761.304.000,00	5.761.304.000,00	5.761.304.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.664.900,00	162.664.900,00	162.664.900,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	746.000,00	746.000,00	746.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.947.700,00	1.947.700,00	1.947.700,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	151.556.300,00	151.556.300,00	151.456.300,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.632.400,00	5.632.400,00	5.732.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	682.500,00	682.500,00	682.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.328.132.450,00	8.328.132.450,00	8.328.132.450,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.010.000,00	19.010.000,00	19.010.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.309.122.450,00	8.309.122.450,00	8.309.122.450,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.320.000,00	289.320.000,00	289.320.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.750.000,00	151.750.000,00	151.750.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.570.000,00	132.570.000,00	132.570.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.691.200,00	74.691.200,00	74.691.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.131.200,00	66.131.200,00	66.131.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.560.000,00	8.560.000,00	8.560.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000						Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	78.455.251.661,00	78.605.251.661,00	80.935.251.661,72
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	41.322.896.200,00	41.472.896.200,00	43.802.896.200,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	36.743.076.200,00	36.868.076.200,00	38.318.076.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	455.381.000,00	455.381.000,00	455.381.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	455.381.000,00	455.381.000,00	455.381.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.287.695.200,00	36.412.695.200,00	37.862.695.200,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	36.287.695.200,00	36.412.695.200,00	37.862.695.200,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	4.540.820.000,00	4.565.820.000,00	5.445.820.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.540.820.000,00	4.565.820.000,00	5.445.820.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	4.540.820.000,00	4.565.820.000,00	5.445.820.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	39.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	37.132.355.461,00	37.132.355.461,00	37.132.355.461,72
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	37.132.355.461,00	37.132.355.461,00	37.132.355.461,72

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	28.865.894.536,00	28.865.894.536,00	28.865.894.536,72
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	22.846.190.667,00	22.846.190.667,00	22.846.190.667,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	22.846.190.667,00	22.846.190.667,00	22.846.190.667,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6.019.703.869,00	6.019.703.869,00	6.019.703.869,72
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6.019.703.869,00	6.019.703.869,00	6.019.703.869,72
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	02	2.04	0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	266.772.000,00	266.772.000,00	266.772.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	266.772.000,00	266.772.000,00	266.772.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	114.060.000,00	114.060.000,00	114.060.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	152.712.000,00	152.712.000,00	152.712.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.175.744.000,00	1.175.744.000,00	1.175.744.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.175.744.000,00	1.175.744.000,00	1.175.744.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	706.046.400,00	706.046.400,00	706.046.400,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	469.697.600,00	469.697.600,00	469.697.600,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.823.944.925,00	6.823.944.925,00	6.823.944.925,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.982.000,00	4.982.000,00	4.982.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.882.000,00	2.882.000,00	2.882.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.581.159.000,00	5.581.159.000,00	5.581.159.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.579.867.000,00	5.579.867.000,00	5.579.867.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.292.000,00	1.292.000,00	1.292.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	823.934.625,00	823.934.625,00	823.934.625,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.549.500,00	4.549.500,00	4.549.500,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	531.420.500,00	531.420.500,00	531.420.500,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.574.625,00	31.574.625,00	31.574.625,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.391.000,00	275.391.000,00	275.391.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.200.000,00	47.200.000,00	47.200.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.911.000,00	204.911.000,00	204.911.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	23.280.000,00	23.280.000,00	23.280.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.478.300,00	138.478.300,00	138.478.300,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.058.300,00	126.058.300,00	126.058.300,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.420.000,00	12.420.000,00	12.420.000,00
3.26.2.22.0.00.01.0000	3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000						Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	30.474.929.735,00	30.474.929.735,00	30.474.929.735,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	318.917.600,00	318.917.600,00	318.917.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	318.917.600,00	318.917.600,00	318.917.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	243.737.400,00	243.737.400,00	243.737.400,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	217.893.400,00	217.893.400,00	217.893.400,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	38.398.400,00	38.398.400,00	38.398.400,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	29.495.000,00	29.495.000,00	29.495.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	25.844.000,00	25.844.000,00	25.844.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	25.844.000,00	25.844.000,00	25.844.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	49.299.500,00	49.299.500,00	49.299.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	24.320.500,00	24.320.500,00	24.320.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	24.320.500,00	24.320.500,00	24.320.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.979.000,00	24.979.000,00	24.979.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.979.000,00	24.979.000,00	24.979.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	25.880.700,00	25.880.700,00	25.880.700,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	25.880.700,00	25.880.700,00	25.880.700,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.880.700,00	25.880.700,00	25.880.700,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30.156.012.135,00	30.156.012.135,00	30.156.012.135,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.384.585.000,00	1.384.585.000,00	1.384.585.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.059.344.400,00	1.059.344.400,00	1.059.344.400,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.059.344.400,00	1.059.344.400,00	1.059.344.400,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	293.649.800,00	293.649.800,00	293.649.800,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	111.529.800,00	111.529.800,00	111.529.800,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	04	2.04	0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	654.164.800,00	654.164.800,00	654.164.800,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	325.240.600,00	325.240.600,00	325.240.600,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	26.017.800,00	26.017.800,00	26.017.800,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	26.017.800,00	26.017.800,00	26.017.800,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	299.222.800,00	299.222.800,00	299.222.800,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	299.222.800,00	299.222.800,00	299.222.800,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	28.771.427.135,00	28.771.427.135,00	28.771.427.135,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	676.882.335,00	676.882.335,00	676.882.335,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	535.517.335,00	535.517.335,00	535.517.335,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	493.235.335,00	493.235.335,00	493.235.335,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	42.282.000,00	42.282.000,00	42.282.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	141.365.000,00	141.365.000,00	141.365.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	141.365.000,00	141.365.000,00	141.365.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	866.647.000,00	866.647.000,00	866.647.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	766.647.000,00	766.647.000,00	766.647.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	624.677.000,00	624.677.000,00	624.677.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	141.970.000,00	141.970.000,00	141.970.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	359.792.800,00	359.792.800,00	359.792.800,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	305.605.000,00	305.605.000,00	305.605.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	305.605.000,00	305.605.000,00	305.605.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	54.187.800,00	54.187.800,00	54.187.800,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	54.187.800,00	54.187.800,00	54.187.800,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	38.104.500,00	38.104.500,00	38.104.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	38.104.500,00	38.104.500,00	38.104.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	38.104.500,00	38.104.500,00	38.104.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	05	2.01	0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	292.734.000,00	292.734.000,00	292.734.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	292.734.000,00	292.734.000,00	292.734.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	161.313.000,00	161.313.000,00	161.313.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	131.421.000,00	131.421.000,00	131.421.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.537.266.500,00	26.537.266.500,00	26.537.266.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.494.500,00	8.494.500,00	8.494.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.494.500,00	8.494.500,00	8.494.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.780.760.500,00	25.780.760.500,00	25.780.760.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.780.760.500,00	25.780.760.500,00	25.780.760.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.048.000,00	325.048.000,00	325.048.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.456.000,00	10.456.000,00	10.456.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.743.000,00	12.743.000,00	12.743.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	270.720.000,00	270.720.000,00	270.720.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.789.000,00	15.789.000,00	15.789.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.379.000,00	184.379.000,00	184.379.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.660.000,00	5.660.000,00	5.660.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.719.000,00	178.719.000,00	178.719.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.584.500,00	238.584.500,00	238.584.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	211.564.500,00	211.564.500,00	211.564.500,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.020.000,00	27.020.000,00	27.020.000,00
3.27.3.25.2.09.01.0000	3	27	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.31.3.30.0.00.02.0000						Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.819.418.625,00	19.819.418.625,00	19.819.418.625,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.053.813.200,00	6.053.813.200,00	6.053.813.200,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	2.06	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.416.835.800,00	5.416.835.800,00	5.416.835.800,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.971.265.100,00	3.971.265.100,00	3.971.265.100,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.971.265.100,00	3.971.265.100,00	3.971.265.100,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1.445.570.700,00	1.445.570.700,00	1.445.570.700,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.445.570.700,00	1.445.570.700,00	1.445.570.700,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	13.732.000,00	13.732.000,00	13.732.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	13.732.000,00	13.732.000,00	13.732.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	13.732.000,00	13.732.000,00	13.732.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	28.624.800,00	28.624.800,00	28.624.800,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	28.624.800,00	28.624.800,00	28.624.800,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	28.624.800,00	28.624.800,00	28.624.800,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	594.620.600,00	594.620.600,00	594.620.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.369.600,00	27.369.600,00	27.369.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.369.600,00	27.369.600,00	27.369.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.251.000,00	567.251.000,00	567.251.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	567.251.000,00	567.251.000,00	567.251.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	13.765.605.425,00	13.765.605.425,00	13.765.605.425,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	8.206.508.000,00	8.206.508.000,00	8.206.508.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	8.206.508.000,00	8.206.508.000,00	8.206.508.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2.306.141.000,00	2.306.141.000,00	2.306.141.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5.738.261.000,00	5.738.261.000,00	5.738.261.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	162.106.000,00	162.106.000,00	162.106.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.559.097.425,00	5.559.097.425,00	5.559.097.425,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.943.775.225,00	4.943.775.225,00	4.943.775.225,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.896.168.525,00	4.896.168.525,00	4.896.168.525,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.606.700,00	47.606.700,00	47.606.700,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	371.133.500,00	371.133.500,00	371.133.500,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.097.000,00	5.097.000,00	5.097.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.458.000,00	1.458.000,00	1.458.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	296.488.500,00	296.488.500,00	296.488.500,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.470.000,00	63.470.000,00	63.470.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.811.000,00	156.811.000,00	156.811.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.811.000,00	146.811.000,00	146.811.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.377.700,00	87.377.700,00	87.377.700,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.337.700,00	73.337.700,00	73.337.700,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.040.000,00	14.040.000,00	14.040.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0000						Sekretariat Daerah	34.672.385.200,00	34.672.385.200,00	34.902.235.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	34.672.385.200,00	34.672.385.200,00	34.902.235.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	34.672.385.200,00	34.672.385.200,00	34.902.235.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.672.385.200,00	34.672.385.200,00	34.902.235.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.593.957.800,00	23.593.957.800,00	23.593.957.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.593.957.800,00	23.593.957.800,00	23.593.957.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	8.665.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	8.665.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.018.620.000,00	1.018.620.000,00	1.018.620.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	993.620.000,00	993.620.000,00	993.620.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	734.327.400,00	734.327.400,00	799.177.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	382.400.000,00	382.400.000,00	446.399.600,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	351.927.400,00	351.927.400,00	352.777.600,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	825.480.000,00	825.480.000,00	825.480.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	825.480.000,00	825.480.000,00	825.480.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001						Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	45.200.552.600,00	46.175.060.300,00	46.127.365.300,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0001	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	19.102.500,00	19.102.500,00	19.102.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	19.102.500,00	19.102.500,00	19.102.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	19.102.500,00	19.102.500,00	19.102.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.102.500,00	19.102.500,00	19.102.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	19.102.500,00	19.102.500,00	19.102.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	45.181.450.100,00	46.155.957.800,00	46.108.262.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	45.181.450.100,00	46.155.957.800,00	46.108.262.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	45.181.450.100,00	46.155.957.800,00	46.108.262.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	750.470.500,00	750.470.500,00	750.470.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	680.388.700,00	680.388.700,00	680.388.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	70.081.800,00	70.081.800,00	70.081.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	43.414.585.100,00	44.389.092.800,00	44.464.038.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	43.333.146.100,00	44.307.653.800,00	44.382.599.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	16.427.000,00	16.427.000,00	16.427.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	65.012.000,00	65.012.000,00	65.012.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	996.246.000,00	996.246.000,00	873.605.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	127.741.000,00	127.741.000,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	127.741.000,00	127.741.000,00	127.741.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	519.797.000,00	519.797.000,00	519.797.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	220.967.000,00	220.967.000,00	226.067.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	20.148.500,00	20.148.500,00	20.148.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20.148.500,00	20.148.500,00	20.148.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0002						Asisten Perekonomian dan Pembangunan	712.652.400,00	712.652.400,00	724.702.400,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	712.652.400,00	712.652.400,00	724.702.400,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	242.892.900,00	242.892.900,00	260.012.900,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5.927.800,00	5.927.800,00	5.927.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	208.599.200,00	208.599.200,00	218.412.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	9.717.400,00	9.717.400,00	14.143.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	18.648.500,00	18.648.500,00	21.528.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	189.038.000,00	189.038.000,00	189.038.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	44.768.000,00	44.768.000,00	44.768.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	81.840.000,00	81.840.000,00	81.840.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	62.430.000,00	62.430.000,00	62.430.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	277.486.600,00	277.486.600,00	269.536.600,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	85.692.700,00	85.692.700,00	79.442.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	126.873.900,00	126.873.900,00	126.873.900,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	64.920.000,00	64.920.000,00	63.220.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	3.234.900,00	3.234.900,00	6.114.900,00
4.01.2.23.2.24.01.0002	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	3.234.900,00	3.234.900,00	6.114.900,00
4.01.2.23.2.24.01.0003						Asisten Administrasi Umum	11.599.235.200,00	11.599.235.200,00	11.799.985.400,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	136.705.500,00	136.705.500,00	136.705.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	128.543.500,00	128.543.500,00	128.543.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	122.151.000,00	122.151.000,00	122.151.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.411.000,00	13.411.000,00	13.411.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	2.973.000,00	2.973.000,00	2.973.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.01	0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.385.000,00	6.385.000,00	6.385.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	3.525.000,00	3.525.000,00	3.525.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	528.000,00	528.000,00	528.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	108.740.000,00	108.740.000,00	108.740.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	108.740.000,00	108.740.000,00	108.740.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	6.392.500,00	6.392.500,00	6.392.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	6.392.500,00	6.392.500,00	6.392.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	23	03	2.01	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	6.392.500,00	6.392.500,00	6.392.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	8.162.000,00	8.162.000,00	8.162.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	8.162.000,00	8.162.000,00	8.162.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	3.884.000,00	3.884.000,00	3.884.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	2.149.000,00	2.149.000,00	2.149.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1.735.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	996.000,00	996.000,00	996.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	996.000,00	996.000,00	996.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	3.282.000,00	3.282.000,00	3.282.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	747.000,00	747.000,00	747.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	03	2.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	11.462.529.700,00	11.462.529.700,00	11.663.279.900,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	11.462.529.700,00	11.462.529.700,00	11.663.279.900,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.462.529.700,00	11.462.529.700,00	11.663.279.900,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	234.480.000,00	234.480.000,00	234.480.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	234.480.000,00	234.480.000,00	234.480.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.654.311.200,00	3.654.311.200,00	3.846.061.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.857.500,00	9.857.500,00	9.857.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	635.423.000,00	635.423.000,00	815.423.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.499.236.700,00	1.499.236.700,00	1.697.236.700,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	109.794.000,00	109.794.000,00	122.544.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.201.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.892.050.000,00	1.892.050.000,00	1.853.650.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	820.050.000,00	820.050.000,00	789.050.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.072.000.000,00	1.072.000.000,00	1.064.600.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.079.531.600,00	1.079.531.600,00	1.141.682.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.484.600,00	129.484.600,00	63.685.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357.457.000,00	357.457.000,00	357.457.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.590.000,00	32.590.000,00	40.540.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	560.000.000,00	560.000.000,00	680.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	36.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	36.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	980.000.000,00	980.000.000,00	980.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	720.000.000,00	720.000.000,00	720.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	229.177.300,00	229.177.300,00	229.177.100,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	84.763.000,00	84.763.000,00	84.762.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	51.896.900,00	51.896.900,00	51.896.900,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	92.517.400,00	92.517.400,00	92.517.400,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.646.979.600,00	2.646.979.600,00	2.622.229.600,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	2.116.193.600,00	2.116.193.600,00	2.091.443.600,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	309.826.900,00	309.826.900,00	309.826.900,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	220.959.100,00	220.959.100,00	220.959.100,00
4.02.0.00.0.00.01.0000						Sekretariat DPRD	52.189.909.750,00	52.249.909.750,00	52.244.909.750,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	52.189.909.750,00	52.249.909.750,00	52.244.909.750,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.726.100.000,00	4.726.100.000,00	4.466.100.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100.665.000,00	100.665.000,00	100.665.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	100.665.000,00	100.665.000,00	100.665.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	3.233.195.000,00	3.233.195.000,00	2.973.195.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	1.994.120.000,00	1.994.120.000,00	1.734.120.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20.075.000,00	20.075.000,00	20.075.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1.219.000.000,00	1.219.000.000,00	1.219.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.392.240.000,00	1.392.240.000,00	1.392.240.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	1.392.240.000,00	1.392.240.000,00	1.392.240.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.463.809.750,00	47.523.809.750,00	47.778.809.750,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.029.599.000,00	4.029.599.000,00	4.029.599.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.029.599.000,00	4.029.599.000,00	4.029.599.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	232.750.000,00	232.750.000,00	232.750.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	232.750.000,00	232.750.000,00	232.750.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.127.074.200,00	1.127.074.200,00	1.127.074.200,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.010.000,00	6.010.000,00	6.010.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	411.344.600,00	411.344.600,00	411.344.600,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.869.600,00	69.869.600,00	69.869.600,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	513.600.000,00	513.600.000,00	513.600.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	126.250.000,00	126.250.000,00	126.250.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.415.250,00	14.415.250,00	14.415.250,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.415.250,00	14.415.250,00	14.415.250,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.926.800.000,00	1.986.800.000,00	1.986.800.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	255.000.000,00	255.000.000,00	255.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.641.800.000,00	1.701.800.000,00	1.701.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.076.000,00	454.076.000,00	454.076.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.746.000,00	149.746.000,00	149.746.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.530.000,00	134.530.000,00	134.530.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	169.800.000,00	169.800.000,00	169.800.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	20.382.178.050,00	20.382.178.050,00	20.642.178.050,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	20.382.178.050,00	20.382.178.050,00	20.642.178.050,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	19.296.917.250,00	19.296.917.250,00	19.291.917.250,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0002	Fasilitas Fraksi DPRD	695.439.000,00	695.439.000,00	695.439.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	2.16	0003	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	18.601.478.250,00	18.601.478.250,00	18.596.478.250,00
5.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.056.054.200,00	6.191.154.200,00	6.191.154.200,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.056.054.200,00	6.191.154.200,00	6.191.154.200,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	6.056.054.200,00	6.191.154.200,00	6.191.154.200,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	485.420.000,00	590.520.000,00	590.520.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	394.790.000,00	499.890.000,00	499.890.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	309.425.000,00	409.425.000,00	409.425.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	2.445.000,00	2.445.000,00	2.445.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	720.000,00	720.000,00	720.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	82.200.000,00	87.300.000,00	87.300.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	29.470.000,00	29.470.000,00	29.470.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	27.070.000,00	27.070.000,00	27.070.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	61.160.000,00	61.160.000,00	61.160.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	19.120.000,00	19.120.000,00	19.120.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	42.040.000,00	42.040.000,00	42.040.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	140.014.800,00	140.014.800,00	140.014.800,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	61.670.000,00	61.670.000,00	61.670.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.610.000,00	30.610.000,00	30.610.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	31.060.000,00	31.060.000,00	31.060.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	26.274.800,00	26.274.800,00	26.274.800,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.930.000,00	23.930.000,00	23.930.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2.344.800,00	2.344.800,00	2.344.800,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	52.070.000,00	52.070.000,00	52.070.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	23.820.000,00	23.820.000,00	23.820.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	28.250.000,00	28.250.000,00	28.250.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.430.619.400,00	5.460.619.400,00	5.460.619.400,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.382.100,00	2.232.100,00	2.232.100,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.382.100,00	2.232.100,00	2.232.100,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.679.407.000,00	4.709.407.000,00	4.709.407.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.658.057.000,00	4.688.057.000,00	4.688.057.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.350.000,00	21.350.000,00	21.350.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.908.300,00	301.908.300,00	301.240.300,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.156.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	770.800,00	770.800,00	770.800,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.403.500,00	83.403.500,00	83.403.500,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.478.000,00	14.478.000,00	13.810.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137.371.000,00	137.371.000,00	137.371.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	137.371.000,00	137.371.000,00	137.371.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.720.000,00	196.870.000,00	188.760.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.890.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.220.000,00	178.370.000,00	169.370.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.831.000,00	112.831.000,00	121.609.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.631.000,00	98.631.000,00	107.409.000,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000						Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	186.472.764.800,00	185.051.057.100,00	185.203.333.526,71
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02				KEUANGAN	186.472.764.800,00	185.051.057.100,00	185.203.333.526,71
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	169.610.400.791,00	168.283.933.091,00	168.333.898.091,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	909.328.600,00	909.328.600,00	950.173.600,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	190.803.600,00	190.803.600,00	196.628.600,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	66.000.000,00	66.000.000,00	101.020.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	14.125.000,00	14.125.000,00	14.125.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	638.400.000,00	638.400.000,00	638.400.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	144.930.000,00	144.930.000,00	144.930.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	144.930.000,00	144.930.000,00	144.930.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	179.784.800,00	179.784.800,00	179.784.800,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	600.000,00	600.000,00	600.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	179.184.800,00	179.184.800,00	179.184.800,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	168.376.357.391,00	167.049.889.691,00	167.059.009.691,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	152.472.537.284,00	152.472.537.284,00	152.481.657.284,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2.586.486.257,00	1.260.018.557,00	1.260.018.557,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	13.317.333.850,00	13.317.333.850,00	13.317.333.850,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	509.556.000,00	509.556.000,00	509.556.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	509.556.000,00	509.556.000,00	509.556.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	9.370.000,00	9.370.000,00	9.370.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	86.555.000,00	86.555.000,00	86.555.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	98.936.000,00	98.936.000,00	98.936.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	171.560.000,00	171.560.000,00	171.560.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	141.385.000,00	141.385.000,00	141.385.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.001.544.800,00	2.001.544.800,00	1.946.844.800,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.001.544.800,00	2.001.544.800,00	1.946.844.800,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	478.650.000,00	478.650.000,00	343.550.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	582.828.800,00	582.828.800,00	638.908.800,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	940.066.000,00	940.066.000,00	964.386.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.351.263.209,00	14.256.023.209,00	14.413.034.635,71
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.775.385.009,00	12.675.385.009,00	12.668.296.435,71
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.775.385.009,00	12.675.385.009,00	12.668.296.435,71
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	795.071.200,00	799.831.200,00	814.641.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.840.000,00	2.840.000,00	7.376.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.054.000,00	7.054.000,00	7.054.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	725.480.000,00	730.240.000,00	740.440.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.897.200,00	54.897.200,00	54.971.200,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.187.500,00	131.187.500,00	280.477.500,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	131.187.500,00	131.187.500,00	280.477.500,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.131.000,00	230.131.000,00	230.131.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.200.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	160.331.000,00	160.331.000,00	160.331.000,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.488.500,00	419.488.500,00	419.488.500,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	341.238.500,00	341.238.500,00	341.238.500,00
5.02.0.00.0.00.04.0000	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.250.000,00	78.250.000,00	78.250.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.766.848.500,00	6.766.848.500,00	6.777.048.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	6.366.699.500,00	6.366.699.500,00	6.435.487.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	443.213.400,00	443.213.400,00	436.275.400,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	145.277.200,00	145.277.200,00	145.277.200,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	55.598.000,00	55.598.000,00	55.598.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	17.119.600,00	17.119.600,00	17.119.600,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	24.520.000,00	24.520.000,00	24.520.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	38.700.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	8.639.600,00	8.639.600,00	8.639.600,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	106.140.000,00	106.140.000,00	99.202.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	28.140.000,00	28.140.000,00	28.140.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	55.980.000,00	55.980.000,00	55.980.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	22.020.000,00	22.020.000,00	15.082.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	169.185.000,00	169.185.000,00	169.185.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	34.825.000,00	34.825.000,00	34.825.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	14.520.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	119.840.000,00	119.840.000,00	119.840.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	22.611.200,00	22.611.200,00	22.611.200,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	2.285.600,00	2.285.600,00	2.285.600,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	20.325.600,00	20.325.600,00	20.325.600,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.923.486.100,00	5.923.486.100,00	5.999.211.600,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.147.439.000,00	5.147.439.000,00	5.147.439.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.146.089.000,00	5.146.089.000,00	5.146.089.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.690.000,00	27.690.000,00	27.690.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.690.000,00	27.690.000,00	27.690.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	423.778.100,00	423.778.100,00	423.778.100,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.698.000,00	1.698.000,00	1.698.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.748.100,00	1.748.100,00	1.748.100,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.161.400,00	108.161.400,00	108.161.400,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.830.600,00	6.830.600,00	6.830.600,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.340.000,00	5.340.000,00	5.340.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	83.000.000,00	83.000.000,00	148.525.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.000.000,00	83.000.000,00	148.525.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.190.000,00	151.190.000,00	161.390.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.100.000,00	29.100.000,00	29.100.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.140.000,00	118.140.000,00	128.340.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.089.000,00	86.089.000,00	86.089.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.249.000,00	80.249.000,00	80.249.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.13		Penataan Organisasi	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	03	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	400.149.000,00	400.149.000,00	341.561.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	400.149.000,00	400.149.000,00	341.561.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	0,00	0,00	0,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	400.149.000,00	400.149.000,00	341.561.500,00
5.03.5.04.0.00.01.0000	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	400.149.000,00	400.149.000,00	341.561.500,00
5.05.0.00.0.00.01.0000						Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.465.471.299,00	1.465.471.299,00	1.465.471.299,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.465.471.299,00	1.465.471.299,00	1.465.471.299,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	252.898.500,00	252.898.500,00	252.898.500,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	141.547.200,00	141.547.200,00	141.547.200,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	141.547.200,00	141.547.200,00	141.547.200,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	111.351.300,00	111.351.300,00	111.351.300,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	111.351.300,00	111.351.300,00	111.351.300,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.212.572.799,00	1.212.572.799,00	1.212.572.799,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.018.833.499,00	1.018.833.499,00	1.018.833.499,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.016.747.899,00	1.016.747.899,00	1.016.747.899,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.085.600,00	2.085.600,00	2.085.600,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.323.300,00	62.323.300,00	62.323.300,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.853.000,00	1.853.000,00	1.853.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.900.800,00	2.900.800,00	2.900.800,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.377.500,00	40.377.500,00	40.377.500,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.292.000,00	3.292.000,00	3.292.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.900.000,00	68.900.000,00	68.900.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.900.000,00	54.900.000,00	54.900.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.816.000,00	47.816.000,00	47.816.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.896.000,00	44.896.000,00	44.896.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
6.01.0.00.0.00.01.0000						Inspektorat	12.407.944.027,00	12.407.944.027,00	12.477.944.027,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	12.407.944.027,00	12.407.944.027,00	12.477.944.027,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	12.407.944.027,00	12.407.944.027,00	12.477.944.027,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	150.270.000,00	150.270.000,00	150.270.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	143.070.000,00	143.070.000,00	143.070.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	71.520.000,00	71.520.000,00	71.520.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	14.520.000,00	14.520.000,00	14.520.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	49.830.000,00	49.830.000,00	49.830.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	520.800.000,00	520.800.000,00	530.800.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	520.800.000,00	520.800.000,00	530.800.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	354.040.000,00	354.040.000,00	364.040.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	157.160.000,00	157.160.000,00	157.160.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.736.874.027,00	11.736.874.027,00	11.796.874.027,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.351.505.127,00	10.351.505.127,00	10.411.505.127,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.351.505.127,00	10.351.505.127,00	10.411.505.127,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	581.414.001,00	581.414.001,00	581.414.001,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	581.414.001,00	581.414.001,00	581.414.001,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	341.346.999,00	341.346.999,00	341.346.999,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	303.652.199,00	303.652.199,00	303.652.199,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.094.800,00	31.094.800,00	31.094.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.620.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.523.000,00	3.523.000,00	3.523.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	3.523.000,00	3.523.000,00	3.523.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.306.600,00	162.306.600,00	162.306.600,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.750.000,00	22.750.000,00	22.750.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.056.600,00	133.056.600,00	133.056.600,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.778.300,00	296.778.300,00	296.778.300,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.608.300,00	164.608.300,00	164.608.300,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.170.000,00	32.170.000,00	32.170.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000						Kecamatan Bangli	10.560.064.300,00	10.570.264.300,00	10.584.724.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7					UNSUR KEWILAYAHAN	10.560.064.300,00	10.570.264.300,00	10.584.724.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01				KECAMATAN	10.560.064.300,00	10.570.264.300,00	10.584.724.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.301.500,00	36.301.500,00	36.301.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	36.301.500,00	36.301.500,00	36.301.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.301.500,00	36.301.500,00	36.301.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.124.042.400,00	1.124.042.400,00	1.135.990.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	467.053.000,00	467.053.000,00	481.453.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	467.053.000,00	467.053.000,00	481.453.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	656.989.400,00	656.989.400,00	654.537.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.085.500,00	20.085.500,00	20.085.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	529.892.500,00	529.892.500,00	550.492.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	106.861.400,00	106.861.400,00	83.809.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	135.555.000,00	145.755.000,00	145.755.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	135.555.000,00	145.755.000,00	145.755.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	135.555.000,00	145.755.000,00	145.755.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	208.173.500,00	208.173.500,00	208.173.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	208.173.500,00	208.173.500,00	208.173.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	208.173.500,00	208.173.500,00	208.173.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.192.500,00	10.192.500,00	10.192.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.192.500,00	10.192.500,00	10.192.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.192.500,00	10.192.500,00	10.192.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.045.799.400,00	9.045.799.400,00	9.048.311.600,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.260.000,00	16.260.000,00	16.580.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.260.000,00	16.260.000,00	16.580.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.507.020.000,00	6.507.020.000,00	6.507.020.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.507.020.000,00	6.507.020.000,00	6.507.020.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	810.660.000,00	810.660.000,00	831.992.200,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.984.000,00	10.984.000,00	10.984.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	752.074.100,00	752.074.100,00	773.486.300,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.854.400,00	22.854.400,00	22.774.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.380.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.087.500,00	16.087.500,00	16.087.500,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.500.000,00	57.500.000,00	23.360.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.500.000,00	57.500.000,00	23.360.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.505.491.000,00	1.505.491.000,00	1.520.491.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.160.000,00	10.160.000,00	10.160.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.685.000,00	55.685.000,00	55.685.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.439.646.000,00	1.439.646.000,00	1.454.646.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.868.400,00	148.868.400,00	148.868.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.058.400,00	91.058.400,00	91.058.400,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.810.000,00	17.810.000,00	17.810.000,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000						Kecamatan Kintamani	3.976.747.000,00	3.976.747.000,00	3.976.747.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	113.206.200,00	113.206.200,00	113.206.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	70.429.400,00	70.429.400,00	70.429.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	21.784.200,00	21.784.200,00	21.784.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.645.200,00	48.645.200,00	48.645.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	42.776.800,00	42.776.800,00	42.776.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	42.776.800,00	42.776.800,00	42.776.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.759.200,00	51.759.200,00	51.759.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	51.759.200,00	51.759.200,00	51.759.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.490.000,00	6.490.000,00	6.490.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.269.200,00	45.269.200,00	45.269.200,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.380.400,00	28.380.400,00	28.380.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	28.380.400,00	28.380.400,00	28.380.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	28.380.400,00	28.380.400,00	28.380.400,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	0,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	53.550.600,00	53.550.600,00	53.550.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.550.600,00	53.550.600,00	53.550.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	53.550.600,00	53.550.600,00	53.550.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.729.850.600,00	3.729.850.600,00	3.729.850.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	720.000,00	720.000,00	720.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.229.253.000,00	3.229.253.000,00	3.229.253.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.229.253.000,00	3.229.253.000,00	3.229.253.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	257.366.800,00	257.366.800,00	257.366.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.716.600,00	1.716.600,00	1.716.600,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	254.570.200,00	254.570.200,00	254.570.200,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.480.000,00	90.480.000,00	90.480.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.880.000,00	63.880.000,00	63.880.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.430.800,00	145.430.800,00	145.430.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.780.800,00	141.780.800,00	141.780.800,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000						Kecamatan Susut	3.544.048.000,00	3.554.248.000,00	3.554.248.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	51.395.000,00	61.595.000,00	61.595.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	51.395.000,00	61.595.000,00	61.595.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	700.000,00	700.000,00	700.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.695.000,00	60.895.000,00	60.895.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	52.712.500,00	52.712.500,00	52.712.500,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	52.712.500,00	52.712.500,00	52.712.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	52.712.500,00	52.712.500,00	52.712.500,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.749.000,00	8.749.000,00	8.749.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.749.000,00	8.749.000,00	8.749.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	8.749.000,00	8.749.000,00	8.749.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.435.000,00	7.435.000,00	7.435.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.435.000,00	7.435.000,00	7.435.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.435.000,00	7.435.000,00	7.435.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.417.906.500,00	3.417.906.500,00	3.417.906.500,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.997.692.000,00	2.997.692.000,00	2.997.692.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.997.692.000,00	2.997.692.000,00	2.997.692.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	232.420.700,00	232.420.700,00	232.270.700,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.896.400,00	8.896.400,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	209.612.300,00	209.612.300,00	218.112.300,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.812.000,00	11.812.000,00	12.058.400,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	107.800.500,00	107.800.500,00	107.950.500,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	71.500.500,00	71.500.500,00	71.500.500,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.300.000,00	33.300.000,00	33.450.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.993.300,00	79.993.300,00	79.993.300,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.803.300,00	77.803.300,00	77.803.300,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000						Kecamatan Tembuku	4.132.146.000,00	4.133.646.000,00	4.133.646.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.040.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.020.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.588.000,00	38.588.000,00	38.588.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	38.588.000,00	38.588.000,00	38.588.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.588.000,00	38.588.000,00	38.588.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.165.000,00	5.165.000,00	5.165.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.165.000,00	5.165.000,00	5.165.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5.165.000,00	5.165.000,00	5.165.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.079.373.000,00	4.080.873.000,00	4.080.873.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.758.513.000,00	3.758.513.000,00	3.758.513.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.758.513.000,00	3.758.513.000,00	3.758.513.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	163.056.000,00	163.056.000,00	163.056.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.016.000,00	2.016.000,00	2.016.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.726.000,00	2.726.000,00	2.726.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153.070.000,00	153.070.000,00	153.070.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.164.000,00	4.164.000,00	4.164.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.620.000,00	76.120.000,00	76.120.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.500.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.620.000,00	55.620.000,00	55.620.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.184.000,00	83.184.000,00	83.184.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.534.000,00	79.534.000,00	79.534.000,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
7.01.0.00.0.00.04.0000	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33.915.928.916,00	33.915.928.916,00	33.915.928.916,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	33.915.928.916,00	33.915.928.916,00	33.915.928.916,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	33.915.928.916,00	33.915.928.916,00	33.915.928.916,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	745.777.100,00	745.777.100,00	745.777.100,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	745.777.100,00	745.777.100,00	745.777.100,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	745.777.100,00	745.777.100,00	745.777.100,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	28.822.454.516,00	28.822.454.516,00	28.822.454.516,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	28.822.454.516,00	28.822.454.516,00	28.822.454.516,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	27.918.440.800,00	27.918.440.800,00	27.918.440.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	785.573.716,00	785.573.716,00	785.573.716,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	103.990.000,00	103.990.000,00	103.990.000,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	14.450.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	123.250.000,00	123.250.000,00	123.250.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	123.250.000,00	123.250.000,00	123.250.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	123.250.000,00	123.250.000,00	123.250.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	135.030.400,00	135.030.400,00	135.030.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	135.030.400,00	135.030.400,00	135.030.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	67.692.350,00	67.692.350,00	67.692.350,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	67.338.050,00	67.338.050,00	67.338.050,00

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.089.416.900,00	4.089.416.900,00	4.089.416.900,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.916.747.000,00	3.916.747.000,00	3.916.747.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.858.927.000,00	3.858.927.000,00	3.858.927.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	57.820.000,00	57.820.000,00	57.820.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.307.400,00	62.307.400,00	62.307.400,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.206.700,00	1.206.700,00	1.206.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.063.000,00	1.063.000,00	1.063.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.067.700,00	52.067.700,00	52.067.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.970.000,00	4.970.000,00	4.970.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.790.000,00	18.790.000,00	18.790.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.790.000,00	6.790.000,00	6.790.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.572.500,00	91.572.500,00	91.572.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.822.500,00	80.822.500,00	80.822.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00
TOTAL							1.410.266.289.565,00	1.410.266.289.565,00	1.434.455.209.989,69

Kab. Bangli, 20 September 2024

Bupati



SANG NYOMAN SEDANA ARTA



KABUPATEN BANGLI
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM
PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	697.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.009.000,00	0,00
2	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.573.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.020.000,00	0,00
4	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	114.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000.000,00	0,00
6	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.174.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.486.000,00	0,00
7	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	731.443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.443.000,00	0,00
8	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	668.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.446.000,00	0,00
11	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	87.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.550.000,00	0,00
12	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	415.066.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.066.500,00	0,00
13	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	42.225.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.225.700,00	0,00
14	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	48.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.595.000,00	0,00
16	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32.446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.446.000,00	0,00
17	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.433.533.600,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000.000,00	0,00	12.617.333.850,00	0,00	16.300.867.450,00	0,00
18	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540.000,00	0,00
20	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	45.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.750.000,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
21	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86.934.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.934.000,00	0,00
22	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	58.427.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.427.700,00	0,00
23	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
24	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
25	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
26	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	451.719.400,00	0,00	8.271.352.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723.071.850,00	0,00
27	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.708.784.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708.784.400,00	0,00
29	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.025.655.650,00	0,00	82.710.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.108.366.000,00	0,00
30	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Kintamani	42.609.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.609.200,00	0,00
31	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	276.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.700.000,00	0,00
33	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	149.712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.712.000,00	0,00
TOTAL					16.951.853.150,00	0,00	8.354.062.800,00	0,00	2.250.000.000,00	0,00	12.617.333.850,00	0,00	40.173.249.800,00	0,00

Kab. Bangli, 20 September 2024

Bupati

SANG NYOMAN SEDANA ARTA



KABUPATEN BANGLI
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e						1		1
Golongan IV/d		1	3			22		26
Golongan IV/c		20				101		121
Golongan IV/b		10	21			245	1	277
Golongan IV/a			75	7		259	17	358
Golongan III/e								
Golongan III/d			35	50	2	576	87	750
Golongan III/c				20	6	411	140	607
Golongan III/b					2	246	259	531
Golongan III/a						144	442	588
Golongan II/e								
Golongan II/d						24	407	431
Golongan II/c						14	121	135
Golongan II/b						6	45	51
Golongan II/a						3	35	38
Golongan I/e								
Golongan I/d							44	44
Golongan I/c							5	5
Golongan I/b							1	1
Golongan I/a								
PPPK							649	649

Kab. Bangli, 20 September 2024

Bupati

SANG NYOMAN SEDANA ARTA



Lampiran XI : Peraturan Daerah
Nomor : 12 Tahun 2024
Tanggal : 20 September 2024

KABUPATEN BANGLI
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Kab. Bangli, 20 September 2024

Bupati



SANG NYOMAN SEDANA ARTA